

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2013 – 2017



PEMERINTAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA



PUSAT PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJASAMA



BUPATI PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2013 – 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RP-JMD) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2013-2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Puncak Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut

RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi, strategi, kebijakan dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat uraian anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur-unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang memberikan gambaran tingkat capaian sasaran, dalam konteks makro maupun mikro, yang ditargetkan dalam suatu Misi;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau akhir periode RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan uraian program-program indikatif, termasuk indikasi jumlah dan sumber dana yang diperlukan, untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
16. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 adalah untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan di daerah terdiri dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah.
- (2) Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya adalah
 - a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD, APBN dan sumber-sumber pembiayaan lain;
 - b. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
 - c. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan dapat memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Puncak Jaya;
 - d. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna; serta
 - e. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan pembangunan daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD meliputi :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Bab VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN
KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAANNYA

Bab XI PENUTUP

(2) Dokumen RPJMD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan Kabupaten Puncak tahun 2013-2017 adalah
TAHUN 2017 KABUPATEN PUNCAK JAYA MENJADI DAERAH
YANG SEMAKIN MANDIRI, MAJU DAMAI DAN SEJAHTERA
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA DENGAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
- (2) Misi Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017
adalah
 - a. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang
Transportasi, Energi, Pemukiman, Telekomunikasi.
 - b. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas
Pelayanan Pendidikan dan kesehatan.
 - c. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur
serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - d. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Masyarakat
Berbasis Potensi Lokal.
 - e. Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Pembangunan
Sosial dan Kerukunan Hidup Masyarakat.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),
dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SKPD, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- (2) SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- (3) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD ini dengan Renstra SKPD;
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD sampai ditetapkan RPJMD periode berikutnya dan tetap berpedoman pada RPJPD sesuai periode tahapan pembangunan;

- (2) RKPD yang disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada periode berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal, 16 Januari 2014
BUPATI PUNCAK JAYA,

CAP/TTD

HENOK IBO

Diundangkan di Mulia

pada tanggal 16 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. PUNCAK JAYA

CAP/TTD

YUNI WONDA, S. Sos, S. IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750622 199610 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2014
NOMOR 2**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 JANUARI 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2013-2017



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
1.5. Maksud dan Tujuan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	10
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah	11
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	18
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	18
2.1.4. Demografi	20
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	23
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	23
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	30
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	38

2.3. Aspek Pelayanan Umum	39
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	39
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pilihan	62
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	68
2.4.1. Fokus Kemampuan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	69
2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah	77
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia	83
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	85
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	86
3.1.1 Pendapatan Daerah	87
3.1.2. Belanja Daerah	92
3.1.3 Pembiayaan Daerah	97
3.2. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu	99
3.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	106
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	112
4.1. Permasalahan Pembangunan	113
4.1.1. Lingkungan Hidup	113
4.1.2. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	113
4.1.3. Sosial Dan Budaya	115
4.1.1. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, kesejarahan;	119
4.1.2. Pemerintahan dan Politik	120
4.1.3. Prasarana Wilayah	121
4.2. Isu Strategis	124
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	126
5.1. Visi	127
5.2. Misi	129
5.3. Tujuan dan Sasaran	130

Bab VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	147
6.1.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman dan Telekomunikasi	149
6.2.	Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	152
6.2.1.	Pelayanan Pendidikan	152
6.2.2.	Pelayanan Kesehatan	156
6.3.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Pemerintahan	160
6.4.	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	162
6.5.	Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	165
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	169
7.1.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	170
7.1.1.	Pengembangan Infrastruktur Transportasi. Dengan Prioritas pembangunan sebagai berikut:	170
7.1.2.	Pengembangan Infrastruktur Energi. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:	170
7.1.3.	Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:	170
7.1.4.	Pengembangan Infrastruktur Pemukiman. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:	171
7.2.	Percepatan Pembangunan dalam Bidang Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	176
7.2.1.	Peningkatan ketersediaan pelayanan pendidikan dasar	176
7.2.2.	Peningkatan ketersediaan pelayanan pendidikan menengah	176
7.2.3.	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan	

	pendidikan	176
7.2.4.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	177
7.2.5.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	177
7.2.6.	Pengoptimalan operasionalisasi pelayanan kesehatan	177
7.2.7.	Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan	177
7.2.8.	Peningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	178
7.2.9.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	178
7.2.10.	Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan	178
7.3.	Pembangunan Aparatur Pemerintahan	186
7.3.1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	186
7.3.2.	Optimalisasi komitmen aparatur	186
7.3.3.	Peningkatan kualitas penyediaan data, informasi dan instrumen survei yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	187
7.3.4.	Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran	187
7.3.5.	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	187
7.4.	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	191
7.4.1.	Peningkatan iklim usaha dan perdagangan	191
7.4.2.	Pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja	192
7.4.3.	Peningkatan produktivitas potensi pertanian	192
7.4.4.	Peningkatan produktivitas perkebunan	192
7.4.5.	Peningkatan produktivitas peternakan	193
7.4.6.	Peningkatan produktivitas perikanan	193
7.4.7.	Pengembangan daerah wisata	193
7.4.8.	Pengembangan industri kreatif	193
7.4.9.	Penguatan ketahanan pangan kabupaten	194

7.4.10.	Penguatan kesadaran membayar pajak	194
7.5.	Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	198
7.5.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	198
7.5.2.	Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial	199
7.5.3.	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	199
7.5.4.	Peningkatan penanggulangan kemiskinan	199
7.5.5.	Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan	199
7.5.6.	Peningkatan ketersediaan data kependudukan sebagai basis pengambilan kebijakan	200
7.5.7.	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	200
7.5.8.	Peningkatan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara	200
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	206
8.1.	Urusan Wajib	207
8.2.	Urusan Pilihan	209
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	238
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	261
10.1.	Pedoman Transisi	261
10.2.	Kaidah Pelaksanaan	262
BAB XI	PENUTUP	265



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kampung di Kabupaten Puncak Jaya	13
Tabel 2. 2	Ketinggian Wilayah Menurut Distrik	14
Tabel 2. 3	Kondisi Geologi Menurut Distrik Kabupaten Puncak Jaya (km ²)	15
Tabel 2. 4	Tata Guna Tanah di Kabupaten Puncak Jaya	17
Tabel 2. 5	Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Jenis Kelamin Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013	21
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012	22
Tabel 2. 7	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2007-2011	24
Tabel 2. 8	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Per Sektor Tahun 2012 (juta rupiah)	25
Grafik 2.1	Kontribusi Masing-Masing Sektor pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010	26
Tabel 2. 9	PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2011(dalam rupiah)	27
Tabel 2. 10	Persentase Pemerataan Pendapatan Penduduk Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2011	28
Tabel 2. 11	Persentase Kemiskinan Tahun 2009-2011	29
Tabel 2. 12	Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2009-2011	30
Tabel 2. 13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009-2011	31

Tabel 2. 14	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011	31
Tabel 2. 15	Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011	32
Tabel 2. 16	Persentase Bayi Gizi Buruk Tahun 2009-2010	33
Tabel 2. 17	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2011	34
Tabel 2. 18	Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas berdasarkan Jenis Kegiatan Utama Tahun 2011	35
Tabel 2. 19	Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2008-2012	36
Tabel 2. 20	Komposisi Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama	37
Tabel 2. 21	Data Persebaran Suku di Tiap Distrik	38
Tabel 2. 22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010 dan 2011	39
Tabel 2. 23	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	41
Tabel 2. 24	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Distrik di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011	42
Tabel 2. 25	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Atas menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011	43
Tabel 2. 26	Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008- 2011	44
Tabel 2. 27	Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011	44
Tabel 2. 28	Persentase Penolong Persalinan Puncak Jaya Tahun 2011	46
Tabel 2. 29	Jenis Penyakit Terbanyak yang Diderita Penduduk Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011	46
Tabel 2. 30	Rencana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Puncak Jaya	48

Tabel 2. 31	Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang (km) Tahun 2007-2011	49
Tabel 2. 32	Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (km) Tahun 2007-2011	51
Tabel 2. 33	Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Tahun 2007-2011	52
Tabel 2. 34	Produksi Pos Menurut Jenisnya Di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2011	55
Tabel 2. 35	Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2011	56
Tabel 2. 36	Jenis Lantai, Dinding dan Atap Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010-2011	57
Tabel 2. 37	Banyaknya Jumlah Pelanggan, KVA Terpasang Tahun 2003	60
Tabel 2. 38	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Distrik di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011	63
Tabel 2. 39	Banyaknya Pedagang di Kabupaten Puncak Jaya Menurut Distrik Tahun 2011	64
Tabel 2. 40	Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011	65
Tabel 2. 41	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011	66
Tabel 2. 42	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Kabupaten Puncak Jaya	67
Tabel 2. 43	Jumlah Peserta KB Aktif	68
Tabel 2. 44	Tingkat Pengangguran	69
Tabel 2. 45	Pertumbuhan Hasil Komoditas per Sektor (dalam ton)	70
Tabel 2. 46	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Distrik Tahun 2011	71

Tabel 2. 47	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung dan Kedelai Menurut Distrik Tahun 2011	72
Tabel 2. 48	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Distrik dan Jenis Sayuran (Ha)Tahun 2011	73
Tabel 2. 49	Banyaknya Hotel dan Rumah Makan Tahun 2007-2011	76
Tabel 2. 50	Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur Tahun 2007-2011	77
Tabel 2. 51	Daya Listrik Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik Tahun 2007-2011	78
Tabel 2. 52	Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang (km) Tahun 2007-2011	79
Tabel 2. 53	Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (km) Tahun 2007-2011	80
Tabel 2. 54	Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Tahun 2007-2011	81
Tabel 2. 55	Data Kepegawaian berdasar Golongan	83
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007 – 2011	88
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007 – 2011	93
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007 – 2011	98
Tabel 3.4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007-2010	100
Tabel 3.5	Pertumbuhan Persentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007-2011	102
Tabel 3.6	Realisasi Surplus/Defisit APBD Kabupaten Puncak Jaya, 2007-2011	105
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Misi 1: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi	132

Tabel 5.2.	Tujuan dan Sasaran Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	135
Tabel 5.3.	Tujuan dan Sasaran Misi 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	139
Tabel 5.4.	Tujuan dan Sasaran Misi 4: Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	142
Tabel 5.5.	Tujuan dan sasaran Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	145
Tabel 6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman dan Telekomunikasi	150
Tabel 6.2a.	Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	153
Tabel 6.2b.	Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	157
Tabel 6.3.	Misi 3: Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur Serta Akuntabilitas Pemerintahan	161
Tabel 6.4.	Misi 4: Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	163
Tabel 6.5.	Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	166
Tabel 7.1.	Kebijakan Umum & Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017	172
Tabel 7.2.	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017	179

Tabel 7.3.	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Aparatur Kabupaten Puncak Jaya 2013 – 2017	189
Tabel 7.4.	Kebijakan Umum & Program Prioritas Pembangunan Ekonomi Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017	195
Tabel 7.5.	Kebijakan Umum Pengembangan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017	201
Tabel 8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Puncak Jaya	211
Tabel 8.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Puncak Jaya	216
Tabel 8.3.	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Misi 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	225
Tabel 8.4.	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Misi 4: Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	229
Tabel 8.5.	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Misi 5: Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	234
Tabel 9.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya	240



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan	6
Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Puncak Jaya	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) membawa nuansa baru bagi penyelenggaraan otonomi daerah sehingga daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsekuensinya, akan terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mendasar baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, demikian pula pada paradigma perencanaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan

tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Puncak Jaya merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Puncak Jaya yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 dalam penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Papua. Di samping itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengingat peran dan fungsi RPJMD sangat penting bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan pembangunan, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Untuk menyusun RPJMD yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas

pemangku kepentingan pembangunan. Maka dari itu, dilakukan tahapan penyusunan RPJMD sebagai berikut:

1. Penyiapan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Puncak Jaya guna mendapatkan gambaran awal dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.
2. Penyiapan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang bertujuan merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang sesuai tugas dan fungsi SKPD agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah.
3. Penyusunan Rancangan RPJMD Daerah yang mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan rancangan Renstra SKPD.
4. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah.
5. Penyusunan Rancangan akhir RPJMD dimana seluruh masukan dari musrenbang menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJMD, selanjutnya disampaikan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah terpilih.
6. Penetapan RPJMD menjadi Peraturan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya adalah:

- a. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Mimika dan Kota Sorong;

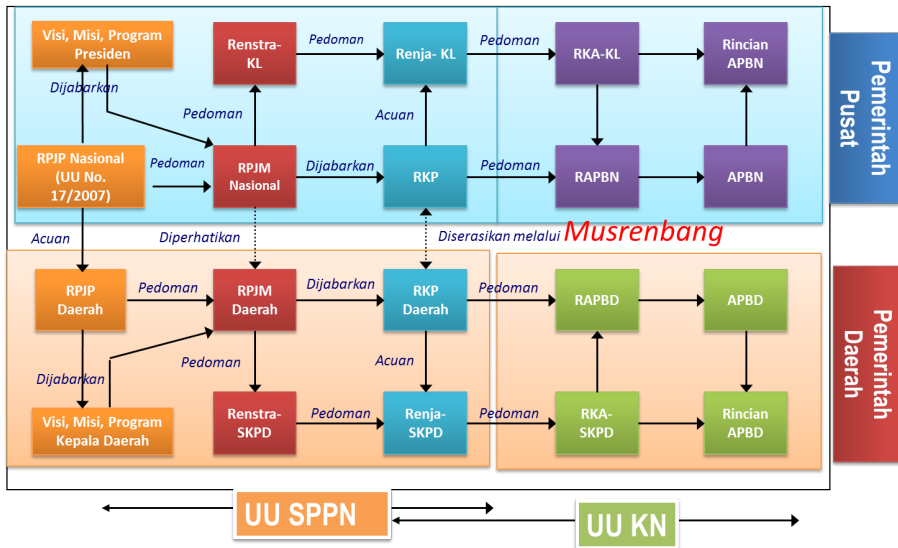
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- o. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018;
- p. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009;
- q. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Maka dari itu, RPJMD harus selaras dan sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Posisi dan alur hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.1
Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan



RPJMD Kabupaten Puncak Jaya diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2012-2017. Idealnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Puncak Jaya. Namun demikian, dikarenakan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya belum tersedia maka RPJMD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2013-2017 berlandaskan pada RPJMD Provinsi Papua dan RPJM Nasional. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2013-2017 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua dan RPJM Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah

ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Puncak Jaya digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Oleh karena itu, RPJMD sangat penting karena merupakan rujukan bagi perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	3.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1. Permasalahan Pembangunan
	4.2. Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
	5.1. Visi
	5.2. Misi
	5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X	PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta merumuskan program pembangunan daerah selama

lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program dilakukan melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat disusun dengan baik apabila data dan informasi mengenai kondisi daerah dapat teridentifikasi dengan baik. Deskripsi kondisi daerah menjadi basis penyusunan rencana pembangunan daerah, yaitu memberikan landasan bagi analisis lingkungan dan perumusan isu-isu strategis.

Deskripsi mengenai kondisi daerah pada bab ini terbagi ke dalam empat aspek, yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Tiga aspek yang terakhir lebih banyak memaparkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan capaian-capaian yang relevan dengan masing-masing aspek.

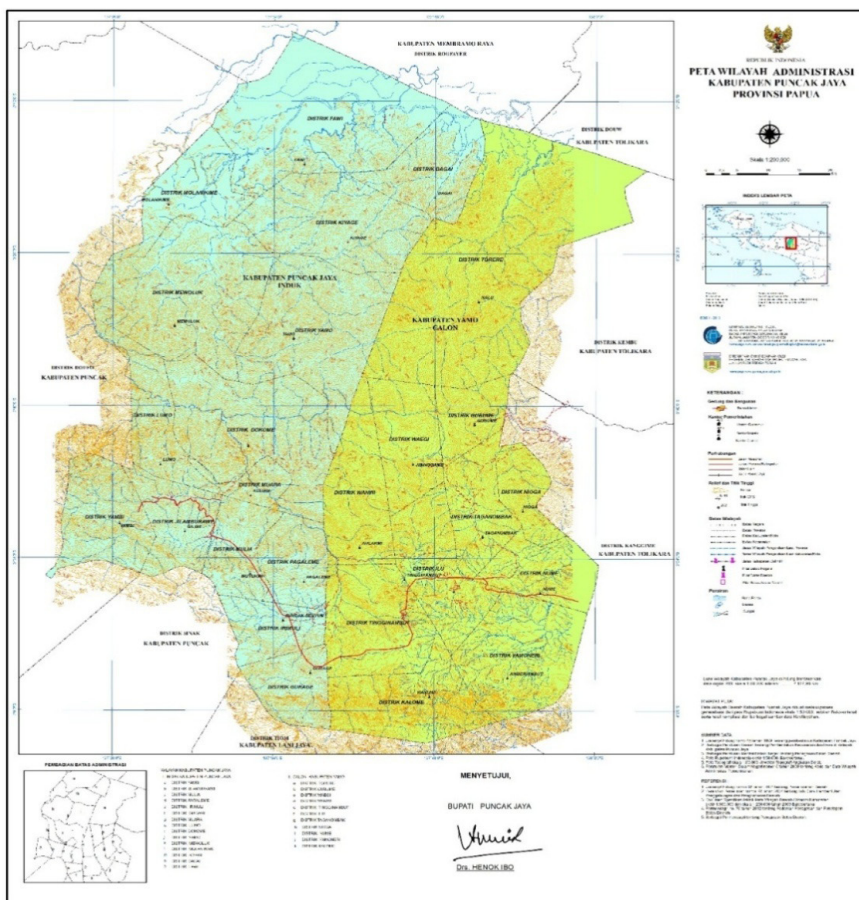
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten dengan luas wilayah 14.532 km² sekitar 3,42 % dari luas wilayah Provinsi Papua yang seluas 317.062 km². Namun, setelah terbentuknya Kabupaten Puncak maka luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya menjadi 6.477 km² dan terbagi menjadi 26 Distrik dengan Mulia sebagai ibukota kabupaten. Batas batas wilayah Kabupaten Puncak Jaya adalah:

Sebelah Utara	: Kabupaten Memberamo Raya
Sebelah Barat	: Kabupaten Puncak
Sebelah Selatan	: Kabupaten Puncak dan Kabupaten Lanny Jaya
Sebelah Timur	: Kabupaten Tolikara

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Puncak Jaya



Sumber: Bagian Tata pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak Geografis Puncak Jaya antara 134°50' -138°15' Bujur Timur dan 2°15' - 4°10' Lintang Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Puncak Jaya terletak di 3° 55'-4°10' Lintang Selatan dan 136°52'-

138°15' Bujur Timur. Kabupaten Puncak Jaya memiliki 302 Kampung dan 26 Distrik. Berikut di bawah ini adalah distrik di Kabupaten Puncak Jaya beserta luasan wilayah dan jumlah penduduknya:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kampung di Kabupaten Puncak Jaya

NO	DISTRIK	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK
1.	Mulia	397	9	27.753
2.	Pagaleme	199	5	12.349
3.	Gurage	327	11	8.672
4.	Irimuli	244	9	11.538
5.	Muara	128	7	11.428
6.	Ilamburawi	219,4	6	6203
7.	Yambi	426,2	9	13.185
8.	Mewoluk	243	9	8.039
9.	Lumo	275	9	10.505
10.	Molanikime	85	4	3.347
11.	Yamo	598	14	11.392
12.	Dokome	401	9	5287
13.	Tingginambut	611	23	11.604
14.	Kalome	661	19	11.318
15.	Wanuwi	820	19	9.064
16.	Ilu	480	20	11.678
17.	Yamoneri	665	17	10.097
18.	Waegi	374	16	13.044
19.	Nume	280	12	2.156
20.	Nioga	200	13	13.866
21.	Gubume	312	11	5.112
22.	Taganombak	301	11	4.939
23.	Fawi	2692	11	7.527
24.	Dagai	646	8	3.047
25.	Kiyage	213	8	5.916
26.	Torere	385	13	3.405

Sumber: RTRW Puncak Jaya 2013

2.1.1.3. Topografi

Secara topografi Kabupaten Puncak Jaya hampir sebagian besar daerah bergelombang dengan kemiringan 2-40% atau sangat curam dengan ketinggian 5.00-4.500 diatas permukaan laut. Daerah datar dengan tingkat kemiringan 0-2% hanya seluas 944,58 km², daerah bergelombang sekitar 2-15 % seluas 5.304,18 km², daerah curam dengan kemiringan antara 15-40 % seluas 4.504,92 km² dan daerah sangat curam merupakan kawasan pegunungan dengan kemiringan antara > 40% seluas 3.778,32 km².

Tabel 2. 2
Ketinggian Wilayah Menurut Distrik

Ketinggian	Fawi	Ilu	Jigo- nikme	Mewo- luk	Mulia	Tinggi- nambut	Torere	Yamo
< 500	2254,43	0	0	0	0	0	294,82	0
500 - 1000	579,26	0	0	0	0	0	165,22	0
1000 - 1500	440,44	0	0	32,20	16,61	1,44	135,06	22,07
1500 - 2000	282,19	11,51	6,49	54,78	80,04	54,87	113,63	67,30
2000 - 2500	172,37	56,59	58,05	76,00	101,54	69,69	89,27	67,56
2500 - 3000	67,10	88,58	94,06	60,43	66,70	83,55	53,56	53,82
3000 - 3500	19,35	129,24	61,22	17,89	112,32	102,93	20,02	20,75
3500 - 4000	2,60	48,14	18,92	1,50	38,36	10,80	0,39	1,34
Luas Total	3817,74	334,06	238,73	242,80	415,57	323,29	871,97	232,84

Sumber: RTRW Puncak Jaya 2013

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Puncak Jaya umumnya bergelombang, berbukit dengan lereng yang relatif terjal menyebabkan pola perkembangan kegiatan wilayah yang terpusat, tidak ekspansif, dan tersebar secara sporadis (cluster). Hal ini

berakibat juga pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur karena jauhnya jarak daerah-daerah yang dihubungkan dan kendala fisik terkait, misalnya sulitnya pencapaian melalui jalur darat

2.1.1.4. Geologi

Secara umum Kabupaten Puncak Jaya tersusun oleh jenis batuan dan tanah yang cukup bervariasi, yaitu alluvium, batuan malihan derewo, batuan terobosan timepa, batuan ultramafic, batuan paniai, dan batuan konglomerat diwewew. Jenis batuan dan tanah tersebut tersebar di sepanjang wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Berikut di bawah ini adalah gambaran geologis Kabupaten Puncak Jaya menurut distrik:

Tabel 2. 3
Kondisi Geologi Menurut Distrik Kabupaten Puncak Jaya (km²)

Struktur Geologi	Distrik								Total
	Fawi	Ilu	Jigo-nikme	Mewo-luk	Mulia	Tinggi-nambut	Torere	Yamo	
Alluvium	2044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,35	0,00	2202,12
Batuan Malihan Derewo	244,66	119,65	208,85	242,80	174,24	139,44	477,91	232,84	1840,39
Batuan Terobosan Timepa	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	23,21
Batuan Ultramafik	1520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,34	0,00	1739,53
Batuan Paniai	0,00	214,41	24,04	0,00	241,32	183,86	0,00	0,00	663,62
Konglomerat Diwewewa	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
Luas Total	3817,74	334,06	238,73	242,80	415,57	323,29	871,97	232,84	6477,00

Sumber: RTRW Puncak Jaya 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar struktur geologi di Kabupaten Puncak Jaya adalah struktur aluvial. Struktur tersebut mencapai 34% dari luas total wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Tidak salah jika kemudian kondisi tanah di Kabupaten Puncak Jaya sangat subur. Struktur terkecil adalah konglomerat diwewewa yang hanya mencapai 0.1%.

2.1.1.5. Hidrologi

Ditinjau dari keberadaan sungai, pola aliran sungai di Kabupaten Puncak Jaya dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

- Sungai-sungai mengalir ke arah utara dan tergolong dalam sungai besar terdiri dari sungai Rouffear dan sungai Vandalen
- Sungai-sungai yang mengalir keselatan bermata air di pegunungan Puncak Jaya dan Pegunungan Jayawijaya.

Keadaan sungai umumnya bertebing curam, sungai-sungai tersebut antara lain sungai Mapai, sungai Uta, sungai Otakwa dan sungai Lemaru.

2.1.1.6. Klimatologi

Kawasan Puncak Jaya beriklim Tropis, kecepatan angin berkisar 2.4 – 3.5 knot dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 3,935 mm pertahun, jumlah hari hujan rata-rata pertahun 206 hari, curah hujan tertinggi pada bulan Januari 456 mm dan curah hujan terendah pada bulan November 203 mm. Suhu udara berkisar antara 17,80 C sampai dengan 230 C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 83,9%. Kabut sering terjadi pada pagi dan sore hari sehingga sering mengganggu jadwal penerbangan.

Penyinaran matahari antara 75-85% dengan angka tahunan 78%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

2.1.1.7. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh kegiatan tak terbangun yaitu berupa kawasan yang belum dimanfaatkan secara ekonomi seperti semak belukar dan padang rumput. Secara singkat gambaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4
Tata Guna Tanah di Kabupaten Puncak Jaya

No	Jenis	Luas (Ha)				
		2001	2002	2003	2004	2005
1.	Hutan	8,719.2	8,719.2	8,719.2	8,719.2	8,719.2
2.	Persawahan	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
3.	Lahan Kering	112	112	112	112	112
4.	Kolam air tawar	2,615.8	2,615.8	2,615.8	2,615.8	2,615.8
5.	Lainnya	2539.5	2539.5	2539.5	2539.5	2539.5

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa kawasan hutan merupakan pemanfaatan lahan yang paling dominan yang merata di seluruh wilayah terutama berupa hutan lahan kering primer. Pola tata guna lahan terdiri dari wilayah hutan, lahan persawahan, lahan kering, lahan industri, lahan pertambangan, kolam air tawar, tambak ikan,

permukiman, padang rumput alam, tanah tandus dan tanah, dengan sebaran perumahan sebesar 1.162 km², wilayah hutan 8.719 km², lahan kering 581 km², Sawah sebesar 76 km², Penggunaan lainnya yang meliputi kolam air tawar sebesar 2.615 km², pertambangan sebesar 145 km², tanah terlantar 287 km², dan industri sebesar 72 km².

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW Puncak Jaya 2011-2031, Kabupaten Puncak Jaya memiliki 4 Satuan Wilayah Pengembangan yang terdiri atas:

1. **SWP I**, dengan pusat kegiatan adalah Mulia di Distrik Mulia, yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Yamo dan Distrik Moweluk.
2. **SWP II**, dengan pusat kegiatan adalah Ilu di Distrik Ilu, yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Jigonikme dan Distrik Tingginambut
3. **SWP III**, dengan pusat kegiatan adalah Fawi di Distrik Fawi yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Fawi.
4. **SWP IV**, dengan pusat kegiatan adalah Tingginambut di distrik Tingginambut yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Tingginambut dan Distrik Torere.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan dibagian selatan dan

berupa dataran rendah dan rawa di bagian utara yaitu disekitar Distrik Fawi. Sebagian besar merupakan kawasan yang mempunyai kemiringan sangat curam/terjal. Daerah-daerah yang mempunyai kemiringan besar yang memungkinkan terjadinya gerakan tanah dijumpai pada bagian tengah mengarah ke timur. Kemungkinan adanya bencana gerakan tanah sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain:

a. Tanah longsor

Mayoritas wilayah di Kabupaten Puncak Jaya merupakan daerah pegunungan dengan lereng terjal. Kemiringan lereng yang cukup terjal ini potensial untuk terjadinya gerakan tanah. Kemiringan lereng yang ada bervariasi mulai dari 10% hingga 90%. Di sisi lain, Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh struktur batuan yang terdiri atas batu gamping dan endapan sedimen lain seperti batu pasir, batu lumpur dan batu lanau. Secara fisik batuan-batuan penyusun ini sudah sangat kompak sehingga stabil bila akan dimanfaatkan sebagai infrastruktur sarana prasarana. Tetapi harus juga dilihat dengan prioritas yang mempunyai kemiringan yang kecil. Untuk kemiringan yang terjal, tetap harus diwaspadai terjadinya tanah longsor terutama jika terjadi hujan deras dan gempa tektonik.

b. Gempa Bumi

Wilayah Kabupaten Puncak Jaya merupakan wilayah termasuk ke dalam kawasan rawan gempa bumi dengan intensitas skala gempa V – VI. Dengan intensitas skala tersebut, sangat cepat memicu terjadinya bencana longsor

pada daerah-daerah dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang labil ketika terjadi gempa bumi.

c. Banjir

Untuk bencana alam banjir sering terjadi di sekitar Distrik Fawi, banyak terjadi genangan yang diakibatkan oleh meluapnya air sungai di wilayah tersebut, yaitu sungai Roffear dan sungai Van Dalen beserta anak-anak sungainya. Genangan terutama terjadi di sekitar sungai serta beberapa daerah yang berawa, biasanya genangan tersebut akan surut dengan sendirinya, namun seiring dengan adanya rencana pengembangan distrik Fawi sebagai wilayah pertanian, perlu dipikirkan saluran untuk membuang air genangan serta pembangunan tanggul.

2.1.4. Demografi

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi SDM yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Tabel berikut akan memberikan gambaran jumlah penduduk di masing-masing distrik di Puncak Jaya yang secara tidak langsung memberikan gambaran potensi SDM yang ada.

Tabel 2. 5
Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Jenis Kelamin
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013

NO	DISTRIK	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK	
			Laki Laki	Perempuan
1.	Mulia	27.753	14.961	12.792
2.	Pagaleme	12.349	6.855	5.494
3.	Gurage	8.672	4.761	3.911
4.	Irimuli	11.538	6.253	5.285
5.	Muara	11.428	6.091	5.337
6.	Ilamburawi	6203	3.259	2.944
7.	Yambi	13.185	7.396	5.789
8.	Mewoluk	8.039	4.419	3.620
9.	Lumo	10.505	5.817	4.688
10.	Molanikime	3.347	1.800	1.547
11.	Yamo	11.392	6.245	5.147
12.	Dokome	5287	2.904	2.383
13.	Tingginambut	11.604	6.309	5.295
14.	Kalome	11.318	6.040	5.278
15.	Wanuwi	9.064	4.824	4.240
16.	Ilu	11.678	6.186	5.492
17.	Yamoneri	10.097	5.153	4.944
18.	Waegi	13.044	7.015	6.029
19.	Nume	2.156	1.174	982
20.	Nioga	13.866	7.436	6.430
21.	Gubume	5.112	2.662	2.450
22.	Taganombak	4.939	2.695	2.244
23.	Fawi	7.527	4.287	3.240
24.	Dagai	3.047	1.630	1.417
25.	Kiyage	5.916	3.228	2.688
26.	Torere	3.405	1.760	1.645

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui Kabupaten Puncak Jaya memiliki 26 distrik. Jumlah penduduk terbanyak ada di distrik Mulia yang merupakan Ibukota Kabupaten, yaitu mencapai 27.753 jiwa atau sekitar 24% dari keseluruhan penduduk Puncak Jaya. Jumlah penduduk paling jarang berada di Distrik Numeyang hanya berpenduduk 2.156 jiwa.

Sedangkan mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Puncak Jaya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	6777	6120	12897
05 – 09	6433	5969	12402
10 – 14	7145	5587	12732
15 – 19	5529	4076	9605
20 – 24	4218	4676	8894
25 – 29	4513	5095	9608
30 – 34	4660	5122	9782
35 – 39	4500	4305	8805
40 – 44	4338	3715	8053
45 – 49	4069	2429	6498
50 – 54	2030	1198	3228
55 – 59	1012	458	1470
60 – 64	457	194	651
65 - 69	165	87	252
70 – 74	89	94	183
75 +	179	93	272
Jumlah	56114	49218	105332

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka, 2012

Dari tabel tersebut diketahui bahwa penduduk Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan angka yang masih ideal antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok usia anak-anak dan pemuda (0-14), dan usia produktif (15-54). Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia tua semakin sedikit. Hal ini merupakan komposisi yang wajar dan cukup baik bagi pembangunan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2011 sebesar 6,74 persen. Ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Papua pada tahun 2011 yang hanya mencapai 1,27%. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan paling besar yaitu 14,71 persen. Berikutnya adalah sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan mengalami pertumbuhan sebesar 10,30 persen.

Tabel 2.7
Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan
Harga Konstan (Hk) Tahun 2007-2011

No	Sektor	2007		2008		2009		2010		2011	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian	-	4,12	18,93	8,02	6,60	6,60	7,27	2,98	10,30	4,55
2.	Pertambangan & penggalian	-	8,84	17,19	7,91	17,94	17,94	18,64	10,64	14,71	7,95
3.	Industri pengolahan	-	7,85	22,18	7,77	12,76	12,76	17,88	8,24	8,37	2,46
4.	Listrik, gas & air bersih	-	27,77	41,66	32,39	48,58	48,58	-7,16	-10,26	5,47	2,93
5.	Konstruksi	-	19,87	34,47	19,31	26,58	26,58	13,63	12,63	3,98	1,68
6.	Perdagangan, hotel, & restoran	-	10,04	25,30	12,79	26,52	26,52	22,92	11,47	5,60	1,60
7.	Pengangkutan & komunikasi	-	33,51	29,30	12,52	24,68	24,68	10,09	5,76	6,79	1,45
8.	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	-	7,41	23,51	14,45	23,60	23,60	21,67	18,53	-2,47	-2,45
9.	Jasa-jasa	-	10,69	138	121,43	24,96	24,96	27,87	12,59	4,50	1,04
10.	PDRB	-	8,83	36,83	24,07	17,52	17,52	15,04	7,95	6,74	2,83

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Puncak Jaya adalah 2,83 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Papua yaitu 5,67%. Seperti pada PDRB atas harga berlaku, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan paling cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 7,95 persen. Diikuti oleh sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,55 persen.

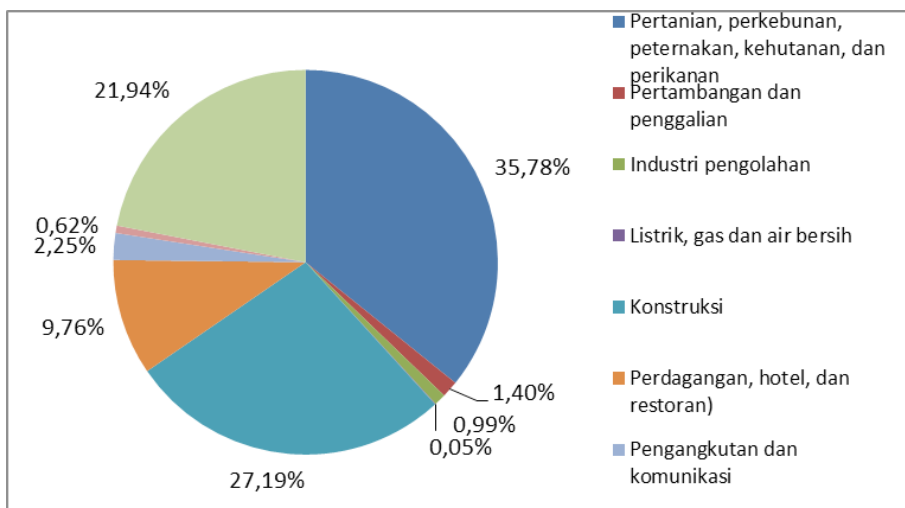
Tabel 2. 8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Per Sektor Tahun 2012 (juta rupiah)

No.	Sektor	Harga Berlaku	Harga Konstan
1.	Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan	229.470,60	100.569,40
2.	Pertambangan dan Penggalian	9.030,36	3.852,86
3.	Industri Pengolahan	6.409,56	1.798,30
4.	Listrik, gas dan air Bersih	331,16	153,16
5.	Konstruksi	174.355,79	42.520,45
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	62.607,35	22.568,22
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	14.444,01	6.238,34
8.	Keuangan, sewa, dan jasa Perusahaan	3.955,68	1.813,91
9.	Jasa-jasa	140.699,03	51.149,87
Total PDRB		641.303,55	230.664,51

Sumber: LPPD Puncak Jaya 2013

Sampai tahun 2012, pendapatan Puncak Jaya paling besar disumbang oleh sektor non industri. Pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi penyumbang PDRB yang paling dominan, disusul oleh sektor konstruksi dan jasa. Sementara itu sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan merupakan penyumbang paling sedikit terhadap PDRB. Melihat fakta tersebut, untuk tahun-tahun mendatang, Puncak Jaya harus lebih menggiatkan sektor keuangan dan jasa perusahaan, dengan salah satu caranya meningkatkan iklim usaha.

Grafik 2.1
Kontribusi Masing-Masing Sektor pada PDRB Kabupaten
Puncak Jaya Tahun 2010



Sumber: Puncak Jaya dalam angka 2012

Pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012, sektor pertanian menyumbangkan kontribusi paling besar. Akan tetapi pertumbuhan sektor pertanian masih lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian.

2.2.1.2. PDRB Perkapita

Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, nilai PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya mengalami kenaikan. Tumbuhnya perekonomian daerah berdampak pada naiknya tingkat pendapatan perkapita masyarakat.

Tabel 2. 9
PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2007-2011(dalam rupiah)

No.	Tahun	PDRB Perkapita
1.	2007	4.151.654,11
2.	2008	5.247.839,91
3.	2009	5.705.899,36
4.	2010	6.120.384,40
5.	2011	6.188.226,36

Sumber: PDRB Kabupaten Puncak Jaya 2011

Pada tahun 2011, PDRB perkapita Kabupaten Puncak Jaya sebesar 6.188.226,36. Angka tersebut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Papua yang sebesar 24,54 juta rupiah. Supaya dapat meningkatkan PDRB perkapita, perlu ditingkatkan PDRB baik atas harga berlaku maupun atas dasar konstan terutama dari sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Puncak Jaya.

2.2.1.3. Pemerataan Pendapatan dan Ketimpangan (Indeks Gini)

Pengukuran indeks gini penduduk Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011 sebesar 0,2419 atau indeks gini kurang dari 0,4. Dengan demikian, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Puncak Jaya masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Sementara itu, indeks gini menurut Bank Dunia menunjukkan data yang lebih lengkap. Sebanyak 41,67 persen penduduk Kabupaten Puncak Jaya memiliki pendapatan sedang. Angka ini berada di atas kriteria Bank Dunia yang mensyaratkan 40 persen penduduk berpendapatan sedang. Sebesar 34,57 persen penduduk berpendapatan tinggi. Angka ini berada di bawah kriteria Bank Dunia, bahwa 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Tabel 2. 10
Persentase Pemerataan Pendapatan Penduduk Berdasarkan
Kriteria Bank Dunia Tahun 2011

Kriteria	Persentase Pendapatan Penduduk
Penduduk berpendapatan rendah	23,80
Penduduk berpendapatan sedang	41,67
Penduduk berpendapatan tinggi	34,57
Total	100,00

Sumber: Bank Dunia

Sisanya, sebanyak 23,80 persen penduduk berpendapatan rendah. Angka ini lebih rendah dari kriteria Bank Dunia, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Berdasarkan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, distribusi pendapatan

Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2011 masuk dalam kategori ketidakmerataan rendah.

2.2.1.4. Persentase Kemiskinan

Persentase kemiskinan Kabupaten Puncak Jaya pada tahun sebesar 40,25 persen atau sebanyak 43.601 jiwa penduduk miskin. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua yang hanya sebesar 31,98 persen. Bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional, yaitu 12,49 persen.

Tabel 2. 11
Persentase Kemiskinan Tahun 2009-2011

No.	Tahun	Persentase Kemiskinan
1.	2009	46,92
2.	2010	43,81
3.	2011	40,25

Sumber: Bank dunia

Di Kabupaten Puncak Jaya, setiap individu mengeluarkan uang senilai Rp. 358.876,00 per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan. Angka tersebut adalah garis kemiskinan di Kabupaten Puncak Jaya. Garis kemiskinan Kabupaten Puncak Jaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Papua maupun secara nasional. Garis kemiskinan Provinsi Papua adalah 276,116 Rp/Kap/Bulan. Sedangkan secara nasional, garis kemiskinan sebesar 233,740 Rp/Kap/Bulan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Tahun 2010 Angka Melek Huruf Kabupaten Puncak Jaya menduduki peringkat 10 dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Propinsi Papua. Tahun 2011 persentase melek huruf Kabupaten Puncak Jaya mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 12
Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2009-2011

Variabel	2009	2010	2011
Persentase penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	86,81	86,81	86,82

Sumber: IPM Kabupaten Puncak Jaya 2011

Pada tahun 2011, persentase melek huruf Kabupaten Puncak Jaya lebih tinggi dibandingkan persentase melek huruf Propinsi Papua yang sebesar 72,92 persen. Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan angka melek huruf secara nasional yang pada tahun 2010 sudah mencapai 92 persen.

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah, Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Puncak Jaya adalah 6,11 tahun. Capaian tersebut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pencapaian aktual rata-rata lama sekolah secara ideal, yaitu 15 tahun. Penduduk di Kabupaten Puncak Jaya

belum menikmati Program Wajib Belajar 9 Tahun karena pada umumnya berpendidikan sampai lulus SD.

Tabel 2. 13
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009-2011

No.	Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
1.	2009	-
2.	2010	6,10 tahun
3.	2011	6,11 tahun

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka 2012

Baik angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni Kabupaten Puncak Jaya masih jauh di bawah angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni Provinsi Papua. Secara nasional, berturut-turut dari SD, SMP, dan SMU angka partisipasi kasar adalah 102,58 persen, 89,57 persen, dan 64,66 persen. Angka partisipasi kasar di Provinsi Papua SD sebesar 91,89 persen, SMP sebesar 51,56 persen, dan SMU sebesar 40,83 persen.

Tabel 2. 14
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011

No.	Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi	
		APK (%)	APM (%)
1.	SD	40,32	35,38
2.	SMP	45,26	22,40
3.	SMU	23,99	23,27

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka 2012

Angka partisipasi murni secara nasional adalah SD sebesar 91,03 persen, SMP sebesar 68,12 persen, dan SMU sebesar 47,97 persen. Sedangkan angka partisipasi murni Provinsi Papua sebesar 69,64 persen, 34,98 persen, dan 28,72 persen. Untuk meningkatkan kualitas SDMnya, Kabupaten Puncak Jaya perlu mengupayakan peningkatan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

Persentase pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Puncak Jaya pada tabel berikut berdasarkan penduduk berusia di atas 15 tahun yang memiliki ijazah tertinggi. Persentase pendidikan yang ditamatkan paling besar pada tingkat SD. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Puncak Jaya hanya bersekolah sampai tingkat SD. Hal ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun belum berjalan dengan baik.

Tabel 2. 15
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011

No.	APT	Tahun 2011 (%)
1.	Belum/tidak mempunyai ijazah	7,20
2.	SD	41,40
3.	SMP	27,10
4.	SMA	11,70
5.	Perguruan Tinggi	12,60

Sumber: IPM Kabupaten Puncak Jaya 2011

Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua maupun secara nasional, persentase pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Puncak Jaya lebih tinggi. Persentase pendidikan yang ditamatkan di Propinsi

Papua berdasarkan Sakernas Agustus 2011 untuk SD ke bawah sebesar 21,58 persen, untuk SMP sebesar 15,08 persen, dan untuk SMA ke atas sebesar 63,33 persen. Sementara itu, secara nasional berturut-turut dari belum/tidak mempunyai ijazah, SD, SMP, dan SMA yaitu 6,41 persen, 28,72 persen, 20,74 persen, dan 29,44 persen.

2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup di Kabupaten Puncak Jaya mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Faktor pendorong meningkatnya angka harapan hidup Kabupaten Puncak Jaya salah satunya adalah meningkatnya kesadaran penduduk terhadap kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pemanfaatan tenaga medis dalam persalinan dan pengobatan gratis di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

2.2.2.4. Persentase Bayi dengan Gizi Buruk

Persentase bayi gizi buruk di Kabupaten Puncak Jaya masih tinggi. Bahkan mengalami trend kenaikan.

Tabel 2. 16
Persentase Bayi Gizi Buruk Tahun 2009-2010

No.	Tahun	Bayi Gizi Buruk (%)
1.	2009	1,56
2.	2010	8,86

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka Tahun 2012

Tingginya persentase bayi yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Puncak Jaya mengindikasikan rendahnya perekonomian dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi

makanan bergizi di Kabupaten Puncak Jaya. Banyaknya bayi gizi buruk ini juga bisa disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran ibu melahirkan untuk melakukan inisiasi menyusui dini.

2.2.2.5. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Puncak Jaya adalah 85,53 persen. TPAK laki-laki 93,05 persen dan TPAK perempuan 76,95 persen.

Tabel 2. 17
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2011

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	TPAK (%)
1.	SD ke bawah	97,50
2.	SLTP	48,21
3.	SLTA ke atas	100

Sumber: Kabupaten Puncak Jaya dalam Angka 2012

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPAK tertinggi berasal dari lulusan SLTA ke atas.

2.2.2.6. Penduduk Usia Kerja

Beberapa tahun terakhir, penduduk usia produktif di Kabupaten Puncak Jaya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang bermigrasi ke luar untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Sedangkan pada tahun 2012, penduduk usia kerja di Kabupaten Puncak Jaya berjumlah 135.975 jiwa atau 53,05%. Jumlah penduduk belum produktif adalah 61.341 jiwa atau 23,93%. Sedangkan jumlah penduduk tidak produktif adalah 58.998 jiwa atau 23,01%.

2.2.2.7. Rasio Penduduk yang Bekerja

Berdasarkan Puncak Jaya dalam Angka tahun 2012, rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2011 adalah 0,96. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 96 persen atau sebanyak 66.278 jiwa dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja. Sebaliknya, 4 persen atau sebanyak 2.441 masih mencari kerja atau pengangguran.

Tabel 2. 18
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas berdasarkan
Jenis Kegiatan Utama Tahun 2011

No.	Jenis Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I.	Angkatan Kerja	39.835	28.884	68.719
	Bekerja	39.165	27.113	66.278
	Penganggur	670	1.771	2.441
II.	Bukan Angkatan Kerja			
	Sekolah	2.976	1.890	4.866
	Mengurus Rumah Tangga	0	6.762	6.762
	Lainnya	1.069	671	1.740
	Jumlah	42.811	37.536	80.347

Sumber: Kabupaten Puncak Jaya dalam Angka 2012

Pada akhir tahun 2011, akumulasi jumlah pencari kerja sebanyak 1.888 orang, 274 orang sudah ditempatkan. Dari total pencari kerja yang terdaftar, sebanyak 98,36 persen berpendidikan SLTA keatas.

2.2.2.8. Angka Beban Tanggungan

Berdasarkan tabel, angka beban tanggungan sebesar 35,91. Artinya bahwa setiap 100 orang produktif di Kabupaten Puncak

Jaya harus menanggung kurang lebih 35 orang belum produktif atau non produktif.

Tabel 2. 19
Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
		0-14	15-64	65+	
1.	2008	23.267	89.915	38.434	151.616
2.	2009	24.551	95.321	42.111	161.983
3.	2010	38.165	92.972	40.321	171.458
4.	2011	43.256	95.889	41.604	180.749
5.	2012	61.341	135.975	58.998	256.314

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Pada tahun 2012 komposisi penduduk Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh golongan usia produktif 15-50 tahun yang berjumlah 102.275 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyangkatan kerja di Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu, golongan usia yang memiliki jumlah terbanyak adalah usia 65-69 tahun yaitu 29.824 jiwa. Sedangkan golongan usia paling kecil adalah usia 60-64 tahun yang berjumlah 10.151 orang.

2.2.2.9. Komposisi Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kabupaten Puncak Jaya adalah berkebun dan meramu dengan usaha sendiri maupun dibantu oleh orang lain. Pekerjaan ini banyak digeluti oleh penduduk suku-suku asli pemilik ulayat karena sudah menjadi pekerjaan turun-temurun. Sebagian kecil penduduk bekerja

sebagai buruh tetap atau buruh bebas atau menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan kayu yang ada di Kabupaten Puncak Jaya maupun di kabupaten lain. Selain itu, terdapat penduduk yang menjadi TNI dan Polri.

Tabel 2. 20
Komposisi Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama

No.	Status Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Berusaha sendiri	5.221	4.632	9.853
2.	Berusaha dibantu orang lain	233	112	345
3.	Berusaha dengan buruh	1.223	988	2.211
4.	Buruh/karyawan	2.231	1.665	3.896
5.	Pekerjaan bebas pertanian	61.532	55.321	116.853
6.	Pekerjaan bebas non pertanian	1.121	998	2.119
7.	Pekerjaan keluarga	213	123	336
Jumlah		71.774	63.839	135.613

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Status pekerjaan tersebut menciptakan perbedaan yang mendasar dalam hal pendapatan. Masyarakat yang bekerja di kebun dan meramu cenderung tidak memiliki uang tunai secara berkesinambungan karena sangat tergantung dengan produk yang dihasilkan dan daya beli pasar. Berbeda dengan para buruh perusahaan yang memiliki uang tunai secara rutin karena adanya sistem pengupahan.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kebudayaan

Kabupaten Puncak Jaya memiliki keragaman budaya/suku yang terdiri dari 8 suku/etnis. Dalam konteks ini diperlukan toleransi antar sesama dan penyelesaian berbagai konflik akibat perbedaan budaya dan suku tanpa kekerasan yang berkepanjangan serta penafsiran dan aplikasi kebersamaan menjadi sempit dalam kelompok-kelompok suku yang lebih kecil. Sehingga diperlukan upaya pembangunan yang berdasarkan kearifan-kearifan lokal, keteladanan kepada para pemimpin, budaya patuh pada hukum dan keinginan untuk berperestasi/maju dari cepatnya penetrasi budaya global yang negatif.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan terbukanya wilayah Kabupaten Puncak Jaya, maka banyak suku-suku lain yang berdatangan dan bertempat tinggal di Kabupaten tersebut. Untuk suku-suku asli sudah mendiami wilayah tersebut sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun sebelumnya.

Berikut adalah peta persebaran suku di Kabupaten Puncak Jaya:

Tabel 2. 21
Data Persebaran Suku di Tiap Distrik

Suku	Distrik yang Ditinggali
Suku Dani	Tersebar di semua distrik
Suku Lani	Mulia, Ilu, Torere, Mewoluk, dan Yamo
Suku Wano	Mewoluk dan Yamo
Suku Lem	
Suku Nduga	
Suku Turun	Fawi
Suku Pendatang (Jawa, Toraja, Bugis, Madura)	Tersebar di semua distrik

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Tahun2006

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Distrik Mewoluk dan Yamo adalah dua distrik yang paling banyak didiami oleh beragam suku yaitu Dani, Lani, Wano, Lem, Nduga, dan suku-suku pendatang. Selain itu suku aski Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Suku Dani tersebar disemua distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Begitu juga distrik pendatang yang juga tersebar disemua distrik.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah memperhitungkan perubahan penduduk, terutama usia muda. Berdasarkan data Puncak Jaya Dalam Angka 2012, terjadi penurunan Angka Partisipasi Sekolah dari tahun 2010 ke tahun 2011. Berikut ini tabel Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2010 dan 2011.

Tabel 2. 22
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2010 dan 2011

Angka Partisipasi Sekolah	2010 (%)	2011 (%)
7 - 12	52,27	36,13
13 - 15	52,94	34,81
16 - 18	85,71	47,32

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2010, sebanyak 52,27% penduduk usia 7-12 tahun mendapatkan layanan pendidikan, sehingga masih ada 47,73% penduduk pada usia tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan. Untuk usia 13-15 tahun, sebanyak 52,94% penduduk telah mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan 47,06% tidak mendapatkan layanan pendidikan. Sebanyak 85,71% penduduk pada usia 16-18% mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan 14,29% penduduk pada usia tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan. Sementara itu, pada tahun 2011, sebanyak 36,13% penduduk usia 7-12 tahun mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan 63,87% penduduk pada usia tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan. Untuk usia 13-15 tahun, sebanyak 34,81% penduduk mendapatkan layanan pendidikan, sehingga 65,19% dari jumlah penduduk pada usia tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan. Untuk usia 16-18 tahun, 47,32% penduduk mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan 52,68% dari jumlah penduduk pada usia tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan.

Penurunan Angka Partisipasi Sekolah tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya proporsi penduduk usia muda. Penurunan tersebut menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di sebuah wilayah ditunjukkan dengan persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Tabel di bawah adalah gambaran APK dan APM Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012.

Tabel 2. 23
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi	
	APK	APM
SD	40,32	35,38
SMP	45,26	22,40
SMA	23,99	23,27

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Angka Partisipasi Murni (APM) Puncak Jaya masih sangat rendah yaitu 35,38%. Angka ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan APM Provinsi Papua yang mencapai 70% atau Papua Barat yang sudah mencapai 88%.

2.3.1.1.2. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid digunakan untuk mengetahui ketersediaan tenaga pengajar dan mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru demi mencapai pengajaran yang berkualitas. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N0. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar oleh kabupaten/kota adalah 1:32 untuk jenjang SD/MI dan 1:36 untuk jenjang SMP/MTs.

Tabel 2. 24
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut
Distrik di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011

No.	Distrik	SD			SMP		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1.	Mulia	81	2.169	1:27	23	558	1:25
2.	Yamo	12	708	1:59	2	100	1:50
3.	Mewoluk	4	157	1:40	2	52	1:26
4.	Tingginambut	13	944	1:73	4	101	1:26
5.	Ilu	26	1.090	1:42	17	379	1:23
6.	Jigonikme	14	534	1:39	4	73	1:19
7.	Torere	0	0	0	0	0	0
8.	Fawi	4	225	1:57	4	109	1:28
Puncak Jaya		154	5.827	1:38	56	1.372	1:25

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Rasio guru terhadap murid Kabupaten Puncak Jaya untuk jenjang SD di atas angka nasional, yaitu 1:38. Artinya, 1 guru mengajar 38 siswa. Angka tersebut mengindikasikan kurangnya ketersediaan tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar mengajar belum efektif. Hanya Kota Mulia yang memiliki rasio guru terhadap murid di bawah angka nasional. Sebaliknya, rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP berada di bawah angka nasional, yaitu 1:25. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan guru SMP sudah mencukupi, namun kondisi ini juga mengindikasikan sedikitnya siswa SD yang melanjutkan ke jenjang SMP. Kondisi ini terjadi hampir di semua distrik kecuali Yamo dengan angka rasio guru terhadap murid 1:50.

Tabel 2. 25
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Atas
menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011

Jenis Sekolah	Murid			Jumlah Guru			Rasio
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	
SMA	328	94	422	11	13	24	1:18
SMK	291	168	459	16	20	36	1:13

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa jumlah peserta didik setiap rombongan belajar untuk SMA dan SMK adalah 32 orang. RASio guru terhadap murid di Kabupaten Puncak Jaya untuk jenjang SMA adalah 1:18 dan untuk jenjang SMK adalah 1:13. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan tenaga pengajar jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Puncak Jaya sudah mencukupi atau jenjang pendidikan SMA dan SMK di Kabupaten Puncak Jaya masih kekurangan murid.

2.3.1.2. Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya masih sangat minim. Berdasarkan Puncak Jaya dalam Angka 2012, tidak ada penambahan pembangunan fasilitas kesehatan pada kurun waktu tahun 2010 sampai 2011. Jenis dan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 26
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2008- 2011

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/ Balai Kesehatan	Polindes
2010	2	-	8	102	-	-
2011	2	0	8	102	0	0

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Catatan : Jumlah Puskesmas tidak termasuk Pusling dan Pustu, Polindes, praktek bidan

Disamping itu, jumlah tenaga kesehatan yang bekerja juga masih kurang. Total jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Puncak pada tahun 2011 adalah 252 orang. Jumlah tersebut tersebar pada unit-unit kerja berikut:

Tabel 2. 27
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011

Unit Kerja	Tenaga Medis			Tenaga Nonmedis				Kesehatan Masyarakat
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis*) Sanitasi		
Puskesmas	10	106	12	0	2	0	0	2
Instalasi Farmasi	0	0	0	0	0	0	0	0
Labkesda	0	0	0	0	0	0	0	0
Dinkes	3	16	7	1	2	0	1	11
Rumah Sakit	9	41	18	3	3	1	0	4
Jumlah	22	163	37	4	7	1	1	17

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

*) Termasuk Ahli Radiologi, Fisioterapi, Penata Anastesi

Dari sisi ketersediaan sarana, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Rumah Sakit berjumlah 2 buah yang terdiri dari 1 RS Umum Pusat, dan RS Umum Daerah. Dalam kurun 2 tahun, Kabupaten Puncak Jaya tidak menambah jumlah fasilitas RS dan Puskesmas.

Jumlah dokter di Kabupaten Puncak Jaya adalah 22 orang. Jumlah ini tentu sangat kurang apabila dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya yang pada tahun 2011 mencapai 101.148 jiwa. Standar SPM kesehatan memberikan batas rasio ideal adalah 1 dokter melayani 2.500 penduduk atau 40:100.000. Melihat standar ideal tersebut, kabupaten Puncak Jaya masih membutuhkan minimal 20 orang dokter.

Pada tahapan lebih lanjut, keterbatasan di atas dapat menyebabkan, tingginya tingkat penggunaan jasa dukun bayi, di mana hanya 37,5% kelahiran bayi yang ditolong tenaga medis. Sebesar 51,2% persalinan di Kabupaten Puncak Jaya dibantu oleh keluarga. Selain disebabkan terbatasnya jumlah bidan, budaya memegang peran penting terhadap tingginya kelahiran bayi yang dibantu oleh keluarga. Dengan demikian, perlu penyadaran kepada masyarakat tentang persalinan aman sekaligus penambahan jumlah bidan di Kabupaten Puncak Jaya. Antisipasi yang sudah dilakukan untuk persoalan ini adalah diadakannya pelatihan kader bidan khusus untuk persalinan. Kader tersebut biasanya berasal dari gereja-gereja setempat yang bertugas untuk menolong persalinan dalam keadaan darurat.

Tabel 2. 28
Persentase Penolong Persalinan Puncak Jaya Tahun 2011

Penolong Persalinan	Jumlah (%)
Tenaga Kesehatan	37,5
Dukun	11,3
Keluarga	51,2

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Penyakit yang paling banyak diderita penduduk Kabupaten Puncak Jaya adalah ISPA. Salah satu penyebab tingginya penyakit ISPA adalah tidak adanya ventilasi pada honai, rumah adat masyarakat lokal. Honai berfungsi sebagai rumah, dapur, sekaligus perapian. Struktur honai yang sengaja dibuat tanpa ventilasi bertujuan untuk meminimalisasai udara dingin masuk. Akan tetapi, asap dari aktivitas memasak dan perapian yang selalu dinyalakan sepanjang malam menyebabkan penghuni honai rentan terhadap ISPA. Berikut tabel jenis penyakit terbanyak yang diderita penduduk Kabupaten Puncak pada tahun 2011:

Tabel 2. 29
Jenis Penyakit Terbanyak yang Diderita Penduduk Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011

No.	Jenis Penyakit	Jumlah
1.	ISPA	3271
2.	Malaria	2843
3.	Rematik	2335
4.	Cacingan	1797
5.	Diare	1626

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Selain berbagai jenis penyakit pada tabel tersebut, beberapa penduduk di Kabupaten Puncak Jaya terjangkit HIV. Berdasarkan Puncak Jaya Dalam Angka tahun 2011, terdapat 19 kasus HIV dengan sebaran terbanyak di Mulia, yaitu 12 kasus. Dari semua kasus HIV yang sudah terdeteksi, 99% diantaranya berujung pada kematian. Hal tersebut disebabkan karena keterlambatan dalam diagnosa dan penanganan.

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

2.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah (Sistem Pengelolaan Persampahan)

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya berencana melaksanakan sistem pengelolaan sampah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan perjalanan serta pengelolaan akhir di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah. Rencananya, TPA sampah Kabupaten Puncak Jaya akan dibangun di Kulirik, Distrik Mulia. Sementara itu, di setiap ibukota distrik akan dibangun Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) untuk menampung dan mengolah sampah yang tidak dapat diangkut ke TPA. Sarana pengangkutan sampah akan menggunakan truk sampah terutama pelayanan pada lingkungan permukiman dan areal komersial.

2.3.1.3.2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Jaringan Air Minum)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011-2031, masyarakat Kabupaten Puncak Jaya menggunakan sumber-sumber mata air dan sungai-sungai kecil untuk memenuhi kebutuhan akan air baku yang juga dimanfaatkan sebagai air minum. Sumber mata air tersebar di seluruh distrik. Sementara itu, pemanfaatan air sungai mengandalkan Sungai Raufer dan Sungai Van Dalen.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya terhadap air bersih sebesar 23.466.139 ltr/hari dengan kebutuhan debit perdetik sebesar 362 liter. Penggunaan air bersih tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik (rumah tangga) dan non domestik (sosial). Penyaluran air bersih di Kabupaten Puncak Jaya rencananya akan menggunakan sistem jaringan perpipaan. Menurut IPM Kabupaten Puncak Jaya, pada tahun 2011 sebesar 89,5 % rumah tangga di Kabupaten Puncak Jaya menggunakan fasilitas sumber air minum yang berasal dari mata air terlindung dan tak terlindung. Sedangkan 8,9 % rumah tangga masih menggunakan sumber air minum yang berasal dari sungai.

Bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk menyediakan sistem air bersih di wilayah-wilayah permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan.

Tabel 2. 30
Rencana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Puncak Jaya

No.	Jenis Sistem Penyediaan	Sumber Air	Kawasan Layanan	Distrik
1.	Sambungan langsung	PDAM	Perkotaan, pusat kegiatan komersial, pusat industri, dan pusat pemerintahan	Mulia, Ilu, Fawi
2.	Sambungan halaman (kran/hidran umum)	PDAM atau mata air setempat	Daerah yang tidak termasuk kawasan perkotaan	Yamo, Mewoluk, Tingginambut, Jigonikme, Torere
3.	Swalayan murni dari masyarakat	Mata air setempat	Wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM	Yamo, Mewoluk, Tingginambut, Jigonikme, Torere

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011-2031

Sementara itu, sistem jaringan air minum akan menggunakan sistem jaringan pipa primer dan pipa sekunder yang diambil langsung dari mata air dan bak penampungan air yang ada. Pembangunan sistem jaringan air minum diutamakan di Kawasan Perkotaan Mulia dan ibukota-ibukota distrik.

2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

2.3.1.4.1. Transportasi¹

2.3.1.4.1.1. Angkutan Darat

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Tabel berikut menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2011 menurut pemerintahan yang berwenang.

Tabel 2. 31
Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang (km)
Tahun 2007-2011

Jenis Jalan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Jalan Negara	-	-	-	-	-
Jalan Provinsi	-	-	-	-	-
Jalan Kabupaten	960,01	753,90	772,09	788,01	800,93
Jumlah	960,01	753,90	772,09	788,01	800,93

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka 2012

1 Data transportasi darat diambil dari Puncak Jaya dalam Angka tahun 2012.

Dalam 5 tahun terakhir (2007-2011), hanya jalan kabupaten yang mengalami perubahan panjang jalan meskipun cenderung mengalami pengurangan karena tidak terdapat jalan negara dan provinsi. Jalan kabupaten berfungsi menghubungkan antardistrik di Kabupaten Puncak Jaya. Pada tahun 2007, panjang jalan kabupaten mencapai 960, 01 km sedangkan pada tahun 2008-2010 panjang jalan berkurang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007. Namun demikian, panjang jalan kabupaten bertambah pada tahun 2011 hingga menjadi 800,93 km.

Sedangkan jalan negara dan jalan provinsi sama sekali belum dibangun di Kabupaten Puncak Jaya. Padahal, jalan provinsi dibutuhkan untuk menghubungkan Kabupaten Puncak Jaya dengan kabupaten lain, misalnya Timika. Sedangkan ketiadaan jalan provinsi yang berfungsi menghubungkan Kabupaten Puncak Jaya dengan ibukota provinsi dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan darat menuju Ibukota Provinsi Papua, Jayapura.

Pada dokumen RTRW Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011-2031, terdapat rencana sistem jaringan jalan, meliputi:

1. Jaringan jalan kolektor primer, adalah jalan berstatus Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Wamena – Tolikara – Ilu – Tingginambut – Mulia – Sinak – Ilaga – Timika.
2. Jaringan jalan lokal primer; adalah jalan berstatus Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara PPL yang satu dengan PPL lainnya atau pusat kegiatan kampung lainnya, yaitu:
 - a. Ruas Jalan Jigonikme
 - b. Ruas Jalan Torere – Ilu

- c. Ruas Jalan Fawi – Yamo – Mulia
- d. Ruas Jalan Mewoluk - Yamo
- e. Ruas Jalan Ilu – Tiom/ ke arah perbatasan Lanny Jaya

Sampai tahun 2012, capaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Puncak Jaya meliputi jalan dalam Kota Mulia, ruas jalan Ilu-Jigonikme, ruas jalan Ilu-Tiom, dan taman pembatas jalan.

Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2011 dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu aspal, kerikil, tanah, dan lainnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32
Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (km) Tahun 2007-2011

Jenis Permukaan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Diaspal	27,38	29,70	36,07	36,36	40,67
Kerikil	8,67	8,67	3,83	4,28	7,59
Tanah	923,96	923,96	732,15	747,37	752,67
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	960,01	962,33	772,65	788,01	800,93

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Berdasarkan jenis permukaan jalan pada tahun 2007-2011 terjadi perubahan yang cukup signifikan pada panjang jalan di Kabupaten Puncak Jaya. Dalam kurun waktu 5 tahun, panjang jalan diaspal mengalami peningkatan (27,38 km-40,67 km). Sebagai dampak pengaspalan jalan, maka panjang jalan kerikil dan tanah

tahun 2008-2011 cenderung berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2007. Sementara itu, jalan kerikil dan tanah pada tahun 2009-2011 justru meningkat padahal jalan diaspal meningkat tiap tahunnya. Besar kemungkinan jalan diaspal tersebut adalah jalan baru.

Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 33
Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan
(Unit) Tahun 2007-2011

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Sedan	0	0	0	0	0
Jeep	0	0	0	1	1
Bus	2	1	2	2	2
Pic up	5	9	12	18	28
Truck	4	7	8	13	13
Alat besar/berat	0	0	0	0	0
Sepeda motor	927	1.134	1.169	1.249	1.434
Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	938	1.151	1.191	1.283	1.478

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Dalam kurun waktu 5 tahun, secara keseluruhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Puncak Jaya mengalami peningkatan. Jumlah terbesar pada tahun 2011, yaitu 1.478 unit, sedangkan jumlah paling rendah adalah tahun 2007, yaitu 938 unit.

Jika dibedakan menurut jenisnya, jumlah sepeda motor adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan jenis kendaraan lain seperti pick up, truk, bus, dan jeep. Pengguna sepeda motor juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan kendaraan jenis sedan dan alat besar/berat tidak digunakan sebagai alat transportasi di Kabupaten Puncak Jaya.

2.3.1.4.1.1. Angkutan Udara

Kondisi geografis Kabupaten Puncak Jaya yang sebagian besar berupa pengunungan terjal cenderung membutuhkan sarana transportasi udara, dari pada sarana transportasi darat. Sarana transportasi udara sangat dibutuhkan untuk menjangkau distrik dan kampung yang tidak bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat. Jenis sarana transportasi udara tersebut berupa helikopter dan pesawat terbang perintis yang dikelola oleh maskapai penerbangan swasta.

Oleh sebab itu, ketersediaan dan peningkatan kualitas bandar udara sangat penting untuk diupayakan. Berikut bandar udara dan lapangan terbang di Kabupaten Puncak Jaya:

- a. Bandar Udara Mulia di Distrik Mulia, panjang lapangan 900 m, lebar 18 m.
- b. Lapangan Terbang Ilu di distrik Ilu, panjang 700 meter dan lebar 18 meter.
- c. Lapangan Terbang (lapter) Fawi di Distrik Fawi, panjang 600 m, lebar 18 m.
- d. Lapangan Terbang (lapter) Torere.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berupaya untuk meningkatkan ketersediaan pesawat terbang perintis. Meskipun demikian, upaya peningkatan pelayanan transportasi udara menghadapi tantangan besar, terutama dari kondisi cuaca yang tidak stabil dan sulitnya medan topografi sehingga rawan terjadi kecelakaan penerbangan.

2.3.1.4.2. Fasilitas Pos

Aktivitas komunikasi merupakan salah satu langkah untuk meminimalisasi keterisolasian masyarakat. Selain itu, penggunaan media telekomunikasi dapat menjadi tolok ukur tingkat literasi masyarakat. Data pada tabel berikut menunjukkan aktivitas surat-menyurat (surat masuk dan surat keluar) di Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 2. 34
Produksi Pos Menurut Jenisnya Di Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2007-2011

Jenis Surat	Satuan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
Surat Pos						
<i>a. Dalam Negeri</i>						
- Biasa	Lembar	35	63	78	98	100
- Tercatat	Lembar					
- Kilat Biasa	Lembar	805	1.065	2.153	3.665	3.805
- Kilat Khusus	Lembar	95	83	85	94	95
- Kilat Tercatat	Lembar					
- Faksimile	Lembar					
<i>b. Luar Negeri</i>						
- Biasa	Lembar					
- Tercatat	Lembar					
Paket Pos						
<i>a. Dalam Negeri</i>	KG	0.485	0.692	0.392	0.385	0.485
<i>b. Luar Negeri</i>	KG					
Wesel Pos	Ribu					
<i>a. Dikirm</i>	.	4500	25.000	185.000	542.435	545.935
<i>b. Dibayar</i>	Rupiah	3000	14.000	36.500	16.905	19.905

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Secara umum, penggunaan pelayanan pos mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data paling menarik adalah adanya peningkatan signifikan dalam proses penerimaan dan pengiriman wesel pos. Pengiriman wesel pos mengalami total kenaikan sejumlah Rp, 541.435,00 selama tahun 2007-2011.

2.3.1.4.3. Hotel dan Rumah Makan

Sebagai kabupaten objek daerah tujuan wisata, Kabupaten Puncak Jaya memiliki 1 buah hotel nonbintang. Berikut tabel jumlah

akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang ada di Kabupaten Puncak Jaya dalam kurun waktu tahun 2007-2011.

Tabel 2. 35
Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia di
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2011

Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
2007	1	5	9
2008	1	5	9
2009	1	5	9
2010	1	5	9
2011	1	5	9
Jumlah	5	25	45

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun, tidak ada penambahan jumlah kamar hunian di Kabupaten Puncak Jaya. Data ini menunjukkan stagnasi dalam bidang usaha jasa perhotelan dan penginapan di Kabupaten Puncak Jaya.

2.3.1.4.4. Perumahan/Permukiman²

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat yaitu rumah dengan luas lantai minimal per kapita 10 m². Pada tahun 2011, 13,50 % rumah di Kabupaten Puncak Jaya memiliki luas lantai di atas 10m². Sedangkan 86,50 % rumah di Kabupaten Puncak Jaya masih memiliki luas lantai per kapita kurang dari 10 m². Sebagian besar rumah di Kabupaten Puncak Jaya belum memenuhi kriteria rumah sehat sehingga dikhawatirkan

2 Data tentang perumahan, telekomunikasi, jaringan air bersih, prasarana persampahan, dan jaringan listrik diambil dari draft RPJMD Puncak Jaya

menimbulkan ketidaknyamanan serta dapat menurunkan derajat keehatan penghuninya. Permasalahan perumahan ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk.

Selain itu, jenis lantai, atap, dan dinding terluas yang digunakan juga menjadi kriteria kualitas rumah sehat. Berikut tabel jenis lantai, dinding, dan atap bangunan tempat tinggal masyarakat Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan data Susenas Tahun 2011.

Tabel 2. 36
Jenis Lantai, Dinding dan Atap Bangunan Tempat Tinggal di
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010-2011

Kualitas Tempat Tinggal		Tahun	
		2010	2011
Jenis Lantai	Bukan Tanah	29,17	30,50
	Tanah	70,83	69,50
Jenis Dinding	Kayu	98,96	97,80
	Bukan Kayu	1,04	2,20
Jenis Atap	Ijuk, Ilalang dan Lainnya	82,29	84,6
	Genteng dan Seng	17,71	15,4

Sumber: IPM Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011

Sebagian besar rumah di Kabupaten Puncak Jaya menggunakan atap berbahan dasar alang-alang sebab honai masih menjadi hunian pilihan utama masyarakat setempat.

2.3.1.4.5. Telekomunikasi

Salah satu cara membangkitkan daya dan partisipasi masyarakat adalah melalui penyediaan informasi yang tepat. Akan tetapi sarana media belum dapat menjangkau semua wilayah. Hal

ini disebabkan wilayah yang masih sulit diakses dan keterbatasan sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur telematika. Rendahnya kemampuan masyarakat khususnya di Kabupaten Puncak Jaya yang sebagian besar berada pada daerah pedalaman dan perkampungan untuk dapat mengakses informasi menyebabkan adanya kesenjangan informasi.

Jaringan telekomunikasi yang dapat digunakan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya adalah jaringan telekomunikasi nirkabel. Jaringan tersebut berupa jaringan satelit dan selular, untuk jaringan satelit sudah bisa mencakup seluruh wilayah kabupaten, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Jaringan satelit disebut oleh masyarakat sebagai wartel karena dapat dipergunakan oleh masyarakat lain, seperti yang terdapat di Distrik Ilu, Tinggimambut dan beberapa distrik lainnya. Sedangkan telepon selular hanya dapat digunakan di daerah yang tersedia pemancar BTS yang lingkupnya relatif lebih kecil daripada telepon satelit. Hingga kini hanya Kota Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya yang telah memiliki pemancar BTS Telkomsel.

2.3.1.4.6. Jaringan Listrik

Kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten Puncak Jaya digunakan untuk perumahan, perkantoran, rumah sakit serta fasilitas lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan akan penerangan listrik masyarakat di Kabupaten Puncak ini bersumber dari jaringan listrik dengan menggunakan PLTA yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Unit pembangkit listrik tersebut hanya terdapat di Distrik Mulia dengan kapasitas daya 100 KVA. Untuk Distrik Mulia dengan kapasitas daya 100 KVA, tetapi kenyataannya

kapasitas daya yang terpasang hanya sebesar 35 KVA, sehingga pelayanan terhadap kebutuhan listrik tidak optimal dengan seringnya terjadi pemadaman listrik.

Untuk Distrik Mulia panjang jaringan menengah sudah mencapai 1.5 KM dan terdapat 1 buah gardu. Untuk menanggulangi kekurangan daya listrik tersebut masyarakat setempat menggunakan genset/mesin diesel, selain itu juga dapat dikatakan bahwa tidak semua distrik terlayani oleh pembangkit listrik yang ada. Untuk distrik lainnya, saat ini masih banyak yang belum mendapatkan aliran listrik, sehingga perlu dikembangkan lagi teknologi-teknologi terbaru dalam penyediaan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Sumber-sumber tenaga listrik yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya adalah:

1. Tenaga surya (*solar cell*)

Tenaga surya banyak digunakan oleh kantor, gereja, dan rumah penduduk dalam memenuhi kebutuhan akan listrik. Penggunaan solar cell cukup membantu masyarakat dan perkantoran di Kabupaten Puncak Jaya.

2. Tenaga angin

Menurut Bidang Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, tenaga angin di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya Distrik Mulia, dapat menggerakkan dinamo sebagai penghasil listrik. Penggunaan tenaga angin ini dimungkinkan bila memperhatikan data Stasiun Meteorologi Kelas III, kecepatan angin tercatat antara 1.5-2.4 knot.

3. Mikrohidro

Kabupaten Puncak Jaya terletak pada hamparan dataran tinggi hingga dataran rendah di Distrik Fawi (antara 500-5000 dpl). Pola aliran sungai berpola dendritik dan masing-masing sungai membentuk pola menyebar mengalir ke hilir. Bentuk sungai Yamo, Sungai Berrase, dan Sungai Van Daalen mengalir dari Selatan ke Timur menuju Utara dan bersatu di Sungai Memberamo. Sungai Memberamo menyimpan potensi energi alternatif.³

Pemenuhan kebutuhan listrik di kabupaten Puncak Jaya berasal dari PLN di 2 unit pembangkit listrik (PLTA) yang berada di Distrik Beoga dan Mulia dengan kapasitas masing-masing 25 KVA dan 100 KVA. Namun, jaringan listrik tersebut belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Puncak Jaya di mana hanya dapat menjangkau 3 kampung saja atau 180 pelanggan.

Tabel 2. 37
Banyaknya Jumlah Pelanggan, KVA Terpasang Tahun 2003

No.	Distrik	Pelanggan	Jumlah Unit	KVA Terpasang	Jumlah Gardu
1	Beoga	30	1	25	1
2	Mulia	150	1	100	1
Jumlah		180	2	125	2

Sumber : RTRW Kabupaten Puncak Jaya, 2011-2031

Masalah pemenuhan tenaga listrik di Kabupaten Puncak Jaya harus dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

3 Diambil dari: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2012. Hlm 18-19.

1. Bekerjasama dengan PLN dengan membangun Sumber Pembangkit Listrik.

Mengembangkan Pembangkit Listrik tenaga air dan angin dengan memanfaatkan potensi Kabupaten Puncak Jaya yang bergunung-gunung dengan air yang melimpah.

Sungai di Papua cukup potensial untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro karena secara teknis memenuhi syarat menjadi sumber energi. Sungai di Papua rata-rata memiliki debit air yang tersedia sepanjang waktu, termasuk saat musim kemarau, sehingga potensial dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Sungai di Papua baik besar maupun kecil memenuhi syarat teknis tersebut sehingga memungkinkan dikembangkan sebagai sumber tenaga listrik yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah.⁴

Beberapa sungai di Kabupaten Puncak Jaya terutama di Distrik Mulia digunakan untuk tenaga listrik mikrohidro. Namun demikian, pada musim kemarau debit sungai berkurang yang menyebabkan tidak bergeraknya kincir angin sehingga dinamo listrik tidak bekerja. Selain itu, penurunan debit sungai dikarenakan perladangan juga menyebabkan tidak berfungsinya tenaga listrik mikrohidro. Bidang Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puncak Jaya berencana memanfaatkan Sungai Yamoneri sebagai alternatif penggerak PLTA dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Puncak Jaya.

4 Dikutip dari pendapat Dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Cenderawasih (Uncen) Yosef Lefaan MT pada artikel <http://regional.kompas.com/read/2010/06/30/10071363/Sungai.Papua.Potensial.untuk.PLTMH> diakses pada Jumat, 2 Agustus 2013, pukul 10.04 WIB.

Kapasitas saat ini untuk mikrohidro yang terdapat di Distrik Mulia adalah Mikro Hidro di Mulia 1 dengan kapasitas 30 KW, Mulia 2 dengan kapasitas 15 KW dan Mulia 3 dengan kapasitas 40 KW. Salah satu sungai di Papua yang cukup besar menghasilkan daya listrik adalah Mamberamo. Sungai yang panjangnya mencapai 800 kilometer ini mampu menghasilkan daya sebesar 9.932 megawatt (MW). Oleh sebab itu, sumber daya sungai menjadi salah satu alternatif yang potensial sebagai sumber tenaga listrik untuk masyarakat.⁵

2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.5. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi merupakan salah satu pelayanan penunjang yang dimiliki oleh daerah untuk menggerakkan perekonomian. Semua distrik di Kabupaten Puncak Jaya sudah memiliki Koperasi Unit Desa (KUD). Selain KUD, juga terdapat Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dan Koperasi Kariyawan (KOPWAN). Berikut tabel jumlah koperasi menurut jenis dan distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

5 1 Dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2010/06/30/100713613/Sungai.Papua.Potensial.untuk.PLTMH> diakses pada Jumat, 2 Agustus 2013, pukul 10.04 WIB.4

Tabel 2. 38
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Distrik di
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011

Distrik	Jenis Koperasi			
	KUD	KPN	KOPWAN	JUMLAH
Mulia	6	1	3	10
Yamo	1	-	-	1
Mewoluk	1	-	-	1
Tingginambut	1	-	-	1
Ilu	3	1	-	4
Jigonikme	1	-	-	1
Torere	1	-	-	1
Fawi	1	-	-	1
Jumlah	15	2	3	20

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Sementara itu, sektor perdagangan di Kabupaten Puncak Jaya masih digerakkan oleh pedagang kecil. Terdapat 239 pedagang kecil yang tersebar di semua distrik. Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, memiliki jumlah pedagang kecil terbanyak dibandingkan dengan distrik lainnya, yaitu 100 pedagang kecil.

Tabel 2. 39
Banyaknya Pedagang di Kabupaten Puncak Jaya Menurut
Distrik Tahun 2011

Distrik	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
Mulia	-	-	100
Yamo	-	-	2
Mewoluk	-	-	11
Tingginambut	-	-	30
Ilu	-	-	50
Jigonikme	-	-	30
Torere	-	-	4
Fawi	-	-	12
Jumlah	-	-	239

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

Selain koperasi, pedagang kecil ini sangat membantu menggerakkan perekonomian Kabupaten Puncak Jaya. Keberadaan pedagang kecil menjadi peluang dikembangkannya potensi lokal menjadi komoditas ekonomi produktif.

2.3.2.2. Kependudukan

2.3.2.2.1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

Tabel 2. 40
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011

Kelompok Umur	Penduduk (Orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	6.777	6.120	12.897
5 – 9	6.433	5.969	12.402
10 – 14	7.145	5.587	12.732
15 – 19	5.529	4.076	9.605
20 – 24	4.218	4.676	8.894
25 – 29	4.513	5.095	9.608
30 – 34	4.660	5.122	9.782
35 – 39	4.500	4.305	8.805
40 – 44	4.338	3.715	8.053
45 – 49	4.069	2.429	6.498
50 – 54	2.030	1.198	3.228
55 – 59	1.012	458	1.470
60 -64	457	194	651
65 – 69	165	87	252
70 – 74	89	94	183
75 +	179	93	272
Jumlah	56.114	49.218	105.332

Sumber: Puncak Jaya Dalam Angka 2012

2.3.2.3. Ketenagakerjaan

2.3.2.3.1. Angkatan Kerja

Tabel 2. 41
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Puncak Jaya 2011

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15 – 24	8.010	6.372	14.328
25 – 54	29.173	20.741	49.914
55 +	1.982	0	1.982
Jumlah	39.165	27.113	66.278

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka 2012

2.3.2.3.2. Produktivitas Kerja

Data yang ada menunjukkan bahwa angka PDRB 2011 adalah 660.815.940. Sementara jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011 adalah 66.278 jiwa. Berdasarkan data-data tersebut, maka diperoleh hasil penghitungan produktivitas kerja yaitu 9970,4.

2.3.2.3.3. Pengangguran

Pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja di kabupaten Puncak Jaya berjumlah 80.347 orang yang terdiri dari 68.719 orang angkatan kerja dan sisanya bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2011 mencapai 85,53 persen sementara tingkat pengangguran mencapai 3,55 persen.

Data dari Survei Tenaga Kerja Nasional menunjukkan tren kenaikan jumlah penganggur di Puncak Jaya. Jumlah penganggur pada tahun 2009 adalah 54 orang, naik menjadi 169 orang di tahun 2010 dan pada tahun 2011 naik drastis menjadi 2.441 orang.

2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.4.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2. 42
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Kabupaten Puncak Jaya

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan
SD	69	3
SLTP	67	13
SLTA	489	139
Diploma	139	77
S1	334	119
S2	16	-
S3	-	-
jumlah	1.114	351

Sumber: Puncak Jaya dalam angka 2012

Melihat data dalam tabel, jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Puncak Jaya masih terbilang jauh lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki. Dengan jumlah yang hanya mencapai 351 orang pegawai perempuan, rasio pegawai perempuan dan laki-laki menunjukkan skala 1 : 3.

2.3.2.5. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.3.2.5.1. Rasio Akseptor KB

Tabel 2. 43 Jumlah Peserta KB Aktif

Jumlah Pasangan Usia Subur	Jumlah Peserta KB Aktif	Rasio
16.710	1.294	13 : 1

Sumber: Puncak Jaya dalam angka 2012

Rasio jumlah PUS dengan jumlah peserta KB di puncak Jaya adalah 13:1. Meskipun demikian, dalam isu kependudukan di Papua pada umumnya belum terlalu menuntut upaya penekanan jumlah penduduk karena Papua tidak mengalami ledakan jumlah penduduk. Usaha yang paling penting dilakukan adalah penggalakan pemakaian kondom untuk mengantisipasi penyakit menular seksual.

2.3.2.5. Penyelenggaraan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat

2.3.2.5.1. Jumlah Polisi Pamong Praja

Berdasarkan data dalam Puncak Jaya dalam Angka 2012, jumlah PNS di kantor Polisi Pamong Praja hanya 18 orang. Data keseluruhan pamong praja termasuk non PNS tidak tersedia.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah mencakup komoditas-komoditas

daerah yang mampu menopang kebutuhan daerah. Daya saing daerah mencakup komoditas-komoditas maupun tingkat produktivitas daerah dalam sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan maupun pertambangan. Sampai saat ini, data pemetaan daya saing daerah di Kabupaten Puncak Jaya masih sebatas pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.

2.4.1. Fokus Kemampuan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengangguran

Tabel 2. 44
Tingkat Pengangguran

2009	2010	2011
0,11%	0,26%	3,55%

Sumber: Profil Daerah 2012

Tingkat pengangguran di Kabupaten Puncak mengalami kecenderungan terus meningkat. Tingkat pengangguran naik 2,29% dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan ini semakin besar skalanya dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0.15%.

2.4.1.2. Pertanian

Luas panen padi (padi sawah dan padi ladang) pada tahun 2011 adalah 112 Ha. Distrik Fawi merupakan satu-satunya penghasil

utama produksi padi. Komoditi ubi jalar yang merupakan produksi terbesar nomor dua di Indonesia yaitu 629 Ha. Distrik Yamo dan Mewoluk penghasil terbesar ubi jalar di Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 2. 45
Pertumbuhan Hasil Komoditas per Sektor (dalam ton)

Sektor	2007	2008	2009	2010
Tanaman Bahan Pangan	3,9	8,35	3,44	6,5
Tanaman Perkebunan	5,85	3,75	4,05	8,47
Peternakan dan Hasilnya	2,28	8,66	2,42	6,86
Perikanan	6,83	6,79	7,8	6,2
Kehutanan	7,44	5,32	7,8	6,2
Pertanian	4,12	8,02	3,5	6,48

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka 2012

Produksi tanaman sayur-sayuran pada tahun 2011 paling banyak diproduksi di Distrik Ilu yang menghasilkan bawang merah, cabe, kentang, kubis dan petsai dapat tumbuh subur. Demikian juga pada sub kelompok buah-buahan. Secara umum Distrik Yamo paling banyak dalam produksi buah mangga, jeruk, pisang dan pepaya.

Produksi padi di Kabupaten Puncak Jaya hanya ada di distrik Fawi dengan kapasitas produksi sebanyak 13,91 ton/tahun. Kondisi topografi di sebagian besar distrik di Puncak Jaya memang tidak mendukung untuk sawah sebagai lahan penanaman padi. Distrik Fawi yang berada di daerah landai menjadikannya distrik dengan produktivitas padi tertinggi di Puncak Jaya.

Sementara itu, hasil bumi Puncak Jaya yang mampu memenuhi pangan pokok adalah ubi. Dalam tabel 2.40 berikut dijabarkan jumlah produksi ubi di seluruh wilayah Puncak Jaya.

Tabel 2. 46
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu dan Ubi Jalar
Menurut Distrik Tahun 2011

Distrik	Ubi Kayu			Ubi Jalar		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kuintal/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kuintal/Ha)
Mulia	6	31,7	52,83	48	421,4	87,79
Yamo	6	31,7	52,83	103	904,3	87,80
Mewoluk	4	21,1	52,75	111	974,6	87,80
Tingginambut	6	31,7	52,83	89	781,4	87,80
Ilu	8	42,2	52,75	63	553,1	87,79
Jigonikme	13	68,6	52,77	91	799,0	87,80
Torere	14	73,9	52,78	65	570,7	84,80
Fawi	18	95,0	52,78	59	518,0	87,80
Puncak Jaya	75	395,9	57,79	629	5.522,6	87,80

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya 2012

Hampir setiap distrik di Puncak Jaya memiliki produktivitas ubi yang cukup. Tidak ada perbedaan mencolok kuantitas produksi ubi antara satu distrik dengan distrik lainnya. Melihat produktivitas ubi yang cukup, perlu juga ada upaya penunjang untuk meningkatkan ragam pengolahan ubi agar komoditas ubi mampu menjadi makanan pokok utama pengganti beras di Puncak Jaya.

Komoditas jagung di Puncak Jaya adalah kedua setelah ubi sebagai pengganti beras. Jumlah produksinya pun hampir merata di semua distrik. Sementara itu, jumlah produksi kedelai masih rendah di seluruh wilayah Puncak Jaya dengan luas panen terendah di distrik Mulia, Yamo dan Mewoluk, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 47
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung dan Kedelai
Menurut Distrik Tahun 2011

Distrik	Jagung			Kedelai		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(Ton)	(kuintal/Ha)	(Ha)	(Ton)	(kuintal/Ha)
Mulia	8	8,2	10,25	1	0,7	7
Yamo	7	7,2	10,28	1	0,7	7
Mewoluk	4	4,1	10,25	1	0,7	7
Tingginambut	4	4,1	10,25	2	1,4	7
Ilu	7	7,2	10,28	6	4,3	7,17
Jigonikme	4	4,1	10,25	2	1,4	7
Torere	8	8,2	10,25	17	12,2	7,18
Fawi	12	12,4	10,33	32	23	7,19
Puncak Jaya	54	55,6	10,30	62	44,5	7,18

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya 2012

Komoditas pertanian yang lain adalah sayur mayur. Untuk setiap komoditas yang meliputi cabe, kentang, kubis, wortel dan petsai, luas lahan panennya hanya berkisar antara 1 – 5 hektar. Luas lahan panen tersebut tentu saja masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan keseluruhan luas area di kabupaten Puncak Jaya yang prospektif untuk ditanami. Fakta ini menyiratkan bahwa masih diperlukan usaha peningkatan keterampilan bertani kepada masyarakat Puncak Jaya serta peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya sayuran, agar tercipta kemandirian pangan di Puncak Jaya.

Tabel 2. 48
Luas Panen Tanaman Sayuran
Menurut Distrik dan Jenis Sayuran (Ha) Tahun 2011

Distrik	Bawang Merah	Cabe	Kentang	Kubis	Wortel	Petsai	Lainnya
Mulia	0	0,20	2	5	2	5	0
Yamo	0	2,00	1	2	1	2	0
Mewoluk	0,5	3,00	1	2	1	1	0
Tingginambut	0,2	1,00	2	1	1	1	0
Ilu	2,0	0	2	3	2	3	0
Jigonikme	0	0	1	1	1	2	0
Torere	0	0,25	0	0	0	0	0
Fawi	0	0,30	0	0	0	0	0
Puncak Jaya	2,7	6,75	9	14	8	14	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya 2012

Berdasarkan data dalam tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk asli Puncak Jaya bergantung pada ketela, umbi dan jagung sebagai makanan pokoknya. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya lahan persawahan (hanya ada di distrik Fawi) dan topografi Puncak Jaya yang merupakan dataran tinggi.

Puncak Jaya memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan kopi. Lahan yang bisa dimanfaatkan sebenarnya sangat luas, namun belum adanya keterampilan dalam mengolah perkebunan oleh penduduk lokal menjadi penghambat tersendiri. Pada tahun 2011, produksi tanaman kopi di Distrik Mulia mencapai 3.5 ton, Di Yamo mencapai 5 ton, di Mewoluk 0.5 ton, tingginambut 1 ton dan di Ilu mencapai 0.8 ton.

Kopi organik adalah komoditi perkebunan di Puncak Jaya yang paling banyak dan juga paling mudah dibudayakan mengingat

topografi daerah. Namun, berdasarkan RKPD Puncak Jaya, belum ada investor yang masuk ke bidang perkebunan atau pengolahan kopi.

2.4.1.3. Kehutanan

Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik masyarakat di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhutbun No. 891/Kpts-IV/1999 tanggal 14 Oktober 1999) Kabupaten Puncak Jaya termasuk kedalam kawasan Hutan Lindung Van Daalen seluas ± 483.093 Ha (74,59%) dan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 140.712 Ha (21,72%), Suaka Margasatwa (SM) 21.264 Ha (3,28%), Taman Nasional (TN) 2.631 Ha (0,41%) serta 482.418 Ha (74,48%) wilayahnya merupakan hutan primer. Curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten ini sebesar 3.505 mm dan terletak pada ketinggian 1.500-3.900 mdpl, serta temperatur harian berkisar 25,83oC.

Sampai saat ini, tidak terdapat pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa areal di kabupaten

ini tidak layak untuk dikelola sebagai unit produksi. Pada umumnya kondisi areal tersebut berada di wilayah yang bergambut, berbatu/kerikil dan berada pada hulu-hulu sungai serta ketinggian di atas 2.000 m dpl. Kondisi areal yang sangat sulit tentunya akan menjadi kendala baik pada kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu, selain itu juga dalam kegiatan pengelolaannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, akibatnya kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan cenderung tidak menguntungkan.

Atas dasar hal tersebut maka menjadikan sebagian besar wilayah kabupaten Puncak Jaya menjadi kawasan lindung merupakan hal sangat bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten ini terdiri atas tanaman sarang semut, rotan, kulit masohi dan kulit buaya. Potensi hasil hutan non kayu ini antara lain terdapat di Distrik Fawi. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang hasil hutan non kayu ini.

2.4.1.4. Pariwisata

Tabel di bawah ini menunjukkan data jumlah dan jenis hotel, jumlah serta restoran/rumah makan di Kabupaten Puncak Jaya yang tercatat selama tahun 2007-2011.

Tabel 2. 49
Banyaknya Hotel dan Rumah Makan Tahun 2007-2011

Tahun	Hotel		Restoran/Rumah Makan
	Berbintang	Non Bintang	
2007	0	1	
2008	0	1	
2009	0	1	
2010	0	1	
2011	0	1	
Jumlah	0	1	

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka 2012

Berdasarkan data tersebut jumlah hotel di Kabupaten Puncak Jaya selama 4 tahun tidak mengalami penambahan baik hotel berbintang dan nonbintang. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat okupansi di Kabupaten Puncak Jaya. Tidak adanya penambahan unit hotel dan restoran sangat mungkin disebabkan buruknya kondisi keamanan di Puncak Jaya. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat kunjungan ke Puncak Jaya. Oleh karena itu, apabila Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berkeinginan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, maka kondisi keamanan yang kondusif merupakan prasyaratnya.

Selain itu, indikator lain yang dapat menjelaskan tingkat okupansi adalah ketersediaan akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 50
Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur Tahun 2007-2011

Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
2007	1	5	9
2008	1	5	9
2009	1	5	9
2010	1	5	9
2011	1	5	9
Jumlah	5	25	45

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka 2012

Tabel di atas merinci jumlah hunian di Puncak Jaya. Dalam kurun waktu 4 tahun, tidak ada penambahan jumlah kamar hunian di Puncak jaya. Data ini menunjukkan stagnasi dalam bidang usaha jasa perhotelan dan penginapan di Kabupaten Puncak Jaya.

2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

2.4.2.1. Energi

Ketersediaan energi listrik menjadi faktor pendukung pembangunan di suatu wilayah. Kemajuan suatu wilayah ditentukan salah satunya dengan ketersediaan energi listrik. Data tentang Daya Listrik Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik di Puncak Jaya dalam kurun waktu 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51
Daya Listrik Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik
Tahun 2007-2011

Tahun	Daya Terpasang (KVA)	Produksi Listrik (KVA)	Listrik Terjual (KVA)	Dipakai Sendiri (KVA)	Susut/ Hilang (KVA)
2007	-	-	--		-
2008	90	90	90		-
2009	90	90	90		-
2010	90	90	90		-
2011	90	90	90		-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puncak Jaya 2012

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan listrik di Kabupaten Puncak Jaya baru dimulai pada tahun 2008. Dari tahun 2008 hingga 2011 daya listrik terpasang adalah 90 KVA. Sama halnya dengan produksi listrik, listrik, dan listrik dipakai sendiri adalah sebesar 90 KVA. Artinya bahwa selama 4 tahun energi listrik di Kabupaten Puncak Jaya tidak mengalami penambahan daya (KVA).

2.4.2.2. Transportasi

2.4.2.2.1. Transportasi Darat

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Tabel di bawah ini menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2011 menurut pemerintahan yang berwenang.

Tabel 2. 52
Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang (km)
Tahun 2007-2011

Jenis Jalan	2007	2008	2009	2010	2011
Jalan Negara	-	-	-	-	-
Jalan Provinsi	-	-	-	-	-
Jalan Kabupaten	960,01	753,90	772,09	788,01	800,93
Jumlah	960,01	753,90	772,09	788,01	800,93

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam Puncak Jaya dalam Angka tahun 2012

Dalam 5 tahun terakhir (2007-2011), hanya jalan kabupaten yang mengalami perubahan panjang jalan meskipun cenderung mengalami pengurangan karena tidak terdapat jalan negara dan provinsi. Jalan kabupaten berfungsi menghubungkan antardistrik di Kabupaten Puncak Jaya. Pada tahun 2007, jalan kabupaten mencapai 960, 01 km sedangkan pada tahun 2008-2010 panjang jalan berkurang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Namun, panjang jalan kabupaten bertambah pada tahun 2011 hingga menjadi 800,93 km.

Sedangkan jalan negara dan jalan provinsi sama sekali belum dibangun di Kabupaten Puncak Jaya. Padahal, jalan provinsi dibutuhkan untuk menghubungkan Kabupaten Puncak Jaya dengan kabupaten lain, misalnya Timika. Sedangkan ketiadaan jalan provinsi yang berfungsi menghubungkan Kabupaten Puncak Jaya dengan ibukota provinsi dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan darat menuju Ibukota Provinsi Papua, Jayapura.

Pada dokumen RTRW Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011-2031, terdapat rencana sistem jaringan jalan yang meliputi:

1. Jaringan jalan kolektor primer; adalah jalan berstatus Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara: Wamena – Tolikara – Ilu – Tingginambut – Mulia – Sinak – Ilaga – Timika
2. Jaringan jalan lokal primer; adalah jalan berstatus Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara PPL yang satu dengan PPL lainnya atau pusat kegiatan kampung lainnya, yaitu :
 - a. Ruas Jalan Jigonikme
 - b. Ruas Jalan Torere – Ilu
 - c. Ruas Jalan Fawi – Yamo – Mulia
 - d. Ruas Jalan Mewoluk - Yamo
 - e. Ruas Jalan Ilu – Tiom/ ke arah perbatasan Lanny Jaya

Sampai tahun 2012, capaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Puncak Jaya meliputi: jalan dalam Kota Mulia, ruas jalan Ilu-Jigonikme, ruas jalan Ilu-Tiom, dan taman pembatas jalan.

Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2011 dikelompokkan menjadi 4 jenis: aspal, kerikil, tanah, dan lainnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 53
Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (km)
Tahun 2007-2011

Jenis Permukaan	2007	2008	2009	2010	2011
Diaspal	27,38	29,70	36,07	36,36	40,67
Kerikil	8,67	8,67	3,83	4,28	7,59
Tanah	923,96	923,96	732,15	747,37	752,67
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	960,01	962,33	772,65	788,01	800,93

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam Puncak Jaya dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan jenis permukaan jalan (tabel 2.17) pada tahun 2007-2011 terjadi perubahan yang cukup signifikan pada panjang jalan di Kabupaten Puncak Jaya. Panjang jalan diaspal dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan (27,38 km-40,67 km). Sebagai dampak pengaspalan jalan, maka panjang jalan kerikil dan tanah tahun 2008-2011 cenderung berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2007. Sementara itu, jalan kerikil dan tanah pada tahun 2009-2011 justru meningkat padahal jalan diaspal meningkat tiap tahunnya. Besar kemungkinan jalan diaspal tersebut adalah jalan baru.

Sementara itu jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 54
Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Tahun 2007-2011

Jenis Kendaraan	2007	2008	2009	2010	2011
Sedan	0	0	0	0	0
Jeep	0	0	0	1	1
Bus	2	1	2	2	2
Pic up	5	9	12	18	28
Truck	4	7	8	13	13
Alat besar/berat	0	0	0	0	0
Sepeda motor	927	1.134	1.169	1.249	1.434
Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	938	1.151	1.191	1.283	1.478

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka tahun 2012

Dalam kurun waktu 5 tahun, secara keseluruhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Puncak Jaya mengalami peningkatan. Jumlah terbesar adalah pada tahun 2011 (1.478 unit), sedangkan jumlah paling rendah adalah tahun 2007 (938 unit).

Jika dibedakan menurut jenisnya, jumlah sepeda motor adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan jenis kendaraan lain seperti: pick up, truk, bus, dan jeep. Pengguna sepeda motor juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan kendaraan jenis sedan dan alat besar/berat tidak digunakan sebagai alat transportasi di Kabupaten Puncak Jaya.

2.4.2.2.2. Transportasi Udara

Sarana transportasi yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya sebagian besar berupa angkutan udara, baik itu helikopter maupun pesawat terbang. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari kabupaten Puncak Jaya sebagian besar berupa pegunungan, sehingga untuk menjangkau distrik dan kampung tidak bisa menggunakan angkutan darat ataupun angkutan laut.

Transportasi udara di Kabupaten Puncak Jaya menggunakan penerbangan perintis dari maskapai penerbangan swasta. Namun, kapasitas pelayanan sulit ditingkatkan karena kondisi cuaca yang tidak stabil dan topografi yang berat sehingga rawan terjadi kecelakaan penerbangan.

- a. Bandar Udara dan Lapangan Terbang yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya yaitu:
- b. Bandar Udara Mulia di Distrik Mulia, panjang lapangan 900 m, lebar 18 m.

- c. Lapangan Terbang Ilu di distrik Ilu, panjang 700 meter dan lebar 18 meter.
- d. Lapangan Terbang (lapter) Fawi di Distrik Fawi, panjang 600 m, lebar 18 m.
- e. Lapangan Terbang (lapter) Torere.
- f. Lapangan Terbang Sinak
- g. Lapangan Terbang Beoga

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan suatu daerah sangat tergantung juga pada kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Sumber daya manusia meliputi masyarakat dan aparatur pemerintahnya. Tabel 2.44 berikut adalah data kepegawaian berdasarkan golongan tahun 2002-2006 dan 2011 di Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 2. 55
Data Kepegawaian berdasar Golongan

DATA KEPEGAWAIAN	JUMLAH/TAHUN					
	2002	2003	2004	2005	2006	2011
Golongan IV	18	20	20	26	34	119
Golongan III	193	280	463	380	452	703
Golongan II	564	740	933	900	1,020	584
Golongan I	143	154	159	134	154	59
Jumlah	918	1,194	1,575	1,440	1,660	1.465

Sumber : Profil daerah Kabupaten Puncak Jaya 2012

Sesuai data tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya didukung oleh aparatur sebanyak 1,465 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2006 karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Dengan 22 SKPD, Puncak Jaya masih memerlukan tambahan pegawai serta peningkatan kapasitas aparturnya dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

Kualitas aparatur pemerintahan turut mempengaruhi perbaikan kualitas pelayanan publik di suatu wilayah. Salah satu indikator kualitas adalah tingkat pendidikan aparatur pemerintahan. Tabel di bawah menyajikan data jumlah PNS Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.



BAB III

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Prinsip desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia berimplikasi pada transfer kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lahirnya UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah tidak hanya memberi ruang bagi desentralisasi politik dan administrasi pemerintahan tapi juga desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan mengarahkan kebijakan keuangannya.

Dalam kasus Papua, fakta tersebut diperkuat dengan adanya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) melalui pembentukan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Regulasi tersebut membuka ruang yang lebih besar kepada pemerintahan

di Papua untuk bisa menjalankan pemerintahannya secara otonom termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu, kebijakan tersebut juga berimplikasi pada besarnya penyaluran dana dari pusat dalam bentuk dana penyesuaian dari Otonomi Khusus yang didistribusikan kepada seluruh kabupaten/ kota termasuk Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan landasan tersebut, dokumen RPJMD yang merumuskan kerangka kerja selama lima tahun ke depan perlu melihat sejauh mana kapasitas keuangan daerah Kabupaten Puncak Jaya. Karena itu, Bab ini hendak menganalisis gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Puncak Jaya termasuk melihat kapasitas fiskalnya selama lima tahun terakhir. Pembacaan terhadap kapasitas fiskal dapat menggambarkan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menyokong rencana kerja selama lima tahun periode RPJMD.

Secara umum, gambaran pengelolaan daerah dapat dilihat dari tiga aspek penting, yaitu: kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat dari kapasitas keuangan dari masing-masing pos pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara garis besar, penilaian kinerja keuangan daerah masa lalu mengurai perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Puncak Jaya selama

lima tahun berturut-turut. Uraian tersebut berguna untuk melihat arah kapasitas keuangan dan menelusuri faktor-faktor penyebab timbulnya masalah dalam pelaksanaan APBD serta mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan kapasitas keuangan pada masa berikutnya.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan dana penerimaan dari sumber lain. Semua komponen tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang disusun setiap tahun. Untuk melihat pendapatan daerah Kabupaten Puncak Jaya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada poin 1.1, 1.2 dan poin 1.3 yang terangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007 – 2011

Jenis Pekerjaan	2007	2008	2009	2010	2011
I. Total Pendapatan	579,547.89	611,386.65	481,268.78	566,454.16	640,720.28
1.1. Pendapatan Asli Daerah	23,056.54	13,983.62	22,671.70	16,405.55	15,638.02
- Pajak Daerah	120.58	100.80	300.60	167.60	255.78
- Retribusi daerah	457.08	907.51	789.37	443.03	650.04
- Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	19,542.71	2,852.88	2,852.88	3,268.21	3,876.21
- Lain-lain PAD yang sah	2,936.17	10,122.43	18,728.85	12,526.71	10,855.99
1.2. Dana Perimbangan	476,756.17	510,325.49	384,501.59	489,162.85	525,097.54
- Dana bagi pajak/bagi Hasil bukan pajak	62,011.17	64,764.46	74,784.02	57,710.59	20,846.88
- Dana alokasi umum	361,492.00	388,175.03	243,315.57	381,412.86	413,412.86
- Dana alokasi khusus	53,253.00	57,386.00	66,402.00	50,039.40	90,837.80
1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	79,735.18	87,077.54	74,095.49	60,885.76	99,984.72
- Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemda lainnya	1,625.65	2,119.55	3,097.81	1,764.65	863.58
- Dana penyesuaian dari otonomi khusus	65,279.53	84,574.93	70,997.68	59,121.11	59,121.14
- Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemda lainnya	12,830.00	383.06	-	-	40,000.00

Sumber : Ringkasan APBD Kabupaten Puncak Jaya, 2007-2011

Pada tahun 2007, total pendapatan daerah Kabupaten Puncak adalah Rp 579,54 milyar dengan rincian kontribusi dari PAD sebesar 3,97%, dana perimbangan sebesar 82,26 %, dan hasil penerimaan lain-lain yang sah sebesar 13,7%. Bila dirinci secara lebih detail dari penerimaan PAD, maka kontribusi terbesar berasal dari dana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 84,75% dari total PAD. Sedangkan kontribusi sektor pajak dan retribusi hanya menyumbang sebesar 2,50 %. Untuk pendapatan dari dana perimbangan, sumbangan terbesar berasal dari dana DAU sebesar 75,82 %, disusul dana bagi hasil dan dana DAK masing-masing sebesar 13 % dan 11,16%. Sedangkan pendapatan dari penerimaan lain-lain terdiri dari dana otonomi khusus sebesar 81,86 % dan dana bantuan dari provinsi sebesar 16,09%.

Pada tahun 2008, total pendapatan Kabupaten Puncak mengalami kenaikan sebesar 5,49 % menjadi Rp 611,38 milyar. Besaran kontribusi PAD pada tahun 2008 adalah 2,29 % yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kontribusi dari dana perimbangan adalah sebesar 83,47% atau mengalami kenaikan satu digit dari tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi penerimaan dari hasil penerimaan lain-lain adalah 14,24%. Dari pos PAD penerimaan terbesar berasal dari dana lain-lain PAD yang sah sebesar 72,3%, melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 12,73 %. Sedangkan pemasukan dari dana penghasilan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 20,39 % turun dari tahun sebelumnya yang mampu 84,75%. Kontribusi dari pajak dan retribusi mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 7,21 %.

Untuk penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 510,32 milyar atau sekitar 83,47% naik satu digit

dari tahun sebelumnya. Dana DAU menyumbang sebesar 76,06 % terhadap total dana perimbangan atau mengalami kenaikan satu persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan dana bagi hasil dan DAK berkontribusi masing-masing sebesar 12,69% dan 11,24 %. Untuk pendapatan dari pos penerimaan lain-lain yang sah berkontribusi sebesar 14,24% yang terdiri dari dana otonomi khusus sebesar 97,12 % naik dari tahun sebelumnya yang hanya 81,86%.

Pada tahun 2009, total pendapatan adalah Rp 481,26 milyar mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 21,28 %. Rincian penerimaannya adalah: kontribusi PAD sebesar 4,71% yang mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun 2008; kontribusi dana perimbangan sebesar 79,89% sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya; kontribusi penerimaan lain-lain yang sah sebesar 15,39 %.Pos penerimaan dari PAD terbesar berasal dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 82,60 % dari total PAD dan kontribusi pajak dan retribusi hanya 4,80 % yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan komposisi dana perimbangan terdiri dari DAU sebesar 63,28 turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 76 %. Kontribusi dana bagi hasil dan DAK sebesar 19,44% dan 17,26%. Kedua komponen tersebut mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya. Dari pos pendapatan lain-lain yang sah terdiri dari dana otonomi khusus sebesar 95,1 % yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010, total pendapatan sebesar Rp 566,16 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 17,70 %. Persentase total kontribusi PAD pada tahun 2010 adalah sebesar 2,89 %, dan kontribusi dana perimbangan sebesar 86,35% serta kontribusi dana lain-lain yang sah sebesar 10,74 % yang mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya. Komposisi PAD pada tahun 2010 disokong oleh dana lain-lain PAD yang sah sebesar 76,35% yang turun dari kontribusi agregat pada tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi pajak dan retribusi bagi PAD hanya sebesar 5,52 % naik satu digit dari tahun sebelumnya. Sedangkan komponen dana perimbangan terdiri dari kontribusi DAU sebesar 77,97%, dana bagi hasil dan DAK masing-masing sebesar 11,79% dan 10,22 %. Secara agregat ketiga komponen dana perimbangan tersebut mengalami penurunan. Untuk komponen dana pendapatan lain-lain yang sah kontribusi terbesar berasal dari dana otonomi khusus sebesar Rp 59.12 milyar atau berkontribusi sebesar 97,10 % dari total penerimaan lain-lain yang berarti mengalami kenaikan agregat sebesar 2 digit.

Pada tahun 2011, total pendapatan daerah adalah Rp 640,72 milyar mengalami kenaikan sebesar 13,11%. Pada tahun ini, kontribusi PAD sebesar 2,44 % yang tidak jauh berbeda dari angka agregat pada tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi dana perimbangan adalah 81,95 % yang secara agregat turun 5 digit dari tahun sebelumnya. Untuk kontribusi dana lain-lain yang sah adalah 15,60 % mengalami kenaikan agregat hampir lima persen. Realisasi PAD disumbang oleh pos penerimaan lain-lain PAD sebesar 69,42 % dan pajak dan retribusi sebesar 5,78% masing-masing mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan untuk dana perimbangan, sumbangan agregat DAU sebesar 78,73 %, DAK sebesar 17,32 % dan dana bagi hasil sebesar 3,97 %. Untuk komponen dana penerimaan lain-lain yang sah, sumbangan terbesar masih dari dana otonomi sebesar 59,13 % dan dana bantuan dari provinsi sebesar 40 % dari total penerimaan lain-lain yang sah. Kontribusi agregat dana otonomi mengalami penurunan signifikan meskipun secara absolut bersifat

stabil.

Dari kinerja keuangan selama lima tahun, terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Puncak masih tergantung pada pos dana perimbangan. Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan dana bagi hasil berkontribusi antara 79,89 hingga 86,35 %. Di samping dana perimbangan, pos pendapatan lain-lain yang sah di mana mencakup dana otonomi khusus - berkontribusi 10 % hingga 15% - merupakan elemen terbesar kedua yang menyokong pendapatan daerah Kabupaten Puncak

3.1.2. Belanja Daerah

Selain melihat aspek pendapatan, untuk mengukur kapasitas keuangan Kabupaten Puncak Jaya juga perlu melihat pos belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan jumlah pendapatan dan belanja akan memperlihatkan sejauhmana kapasitas keuangan Kabupaten Puncak Jaya dan juga melihat seberapa besar defisit ataupun surplus anggaran pada tiap tahunnya. Nilai total belanja juga mengurai banyak pos baik dari sisi belanja langsung maupun belanja tidak langsung seperti dapat dicermati pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007 - 2011

Jenis Pekerjaan		2007	2008	2009	2010	2011
II. Total Belanja		615,741.99	715,219.36	514,258.08	627,720.65	626,499.78
2.1. Belanja tidak langsung		176,724.17	229,174.53	142,925.39	192,453.71	200,939.41
- Belanja pegawai		85,088.19	97,229.67	92,984.75	119,679.89	161,828.35
- Belanja bunga		-				
- Belanja subsidi		-	5,496.00	-	-	-
- Belanja Hibah		24,111.75	44,683.49	18,070.00	26,000.50	22,800.00
- Belanja bantuan sosial		17,585.54	52,762.70	31,839.70	11,344.50	-
- Belanja bantuan keu kpd Prov/Kab/Kota dan Pedes		14,958.03	10,000.00	-	-	-
- Belanja tidak terduga		34,980.66	19,002.67	30.94	35,428.82	16,311.06
2.2. Belanja Langsung		439,017.82	486,044.83	371,332.69	435,266.94	425,560.37
- Belanja pegawai		51,801.56	37,753.81	39,120.24	40,115.73	51,932.14
- Belanja barang dan jasa		233,675.58	192,995.71	179,057.21	179,874.60	167,315.44
- Belanja Modal		153,540.68	255,295.31	153,155.24	215,276.61	206,312.79

Sumber : Ringkasan APBD Puncak Jaya, 2007-2011

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2007 total belanja daerah adalah Rp 615,74 milyar dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar 28,70 % dan belanja langsung sebesar 71,29%. Pada pos belanja tidak langsung pengeluaran terbesar adalah belanja pegawai sebesar 48,14% dan belanja tidak terduga yang mencapai 19,7 %. Sisanya terserap pada belanja hibah dan bansos masing-masing sebesar 13,64% dan 9,95 %. Pada pos belanja langsung, belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran terbesar yaitu Rp 233,6 milyar atau setara dengan 53,22 % . Sisanya terserap di belanja modal sebesar 34,97 % dan belanja pegawai sebesar 1,79 %.

Pada tahun 2008, total belanja daerah menjadi Rp 715,21 milyar atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 16,15 %. Dana belanja tersebut dikeluarkan untuk belanja tidak langsung sebesar 32,04 % yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya baik secara agregat maupun praktis. Sedangkan serapan untuk dana langsung adalah 67,95 % atau mengalami penurunan tiga titik. Perincian belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar 42,42 %, disusul belanja sosial 23,02% serta belanja hibah sebesar 19,49. Dibandingkan pada tahun 2007, nilai absolut dan agregat dari belanja sosial dan belanja hibah mengalami kenaikan. Pada pos belanja langsung komposisi belanja modal merupakan terbesar yaitu sebesar 52,52 % naik sekitar 16 % sedangkan belanja barang dan jasa berada di posisi kedua dengan nilai agregat 39,70 % serta belanja pegawai sebesar 7,76% dari total belanja langsung.

Menginjak tahun 2009, total belanja Kabupaten Puncak Jaya turun menjadi Rp 514,25 milyar atau mengalami penurunan sebesar 28,09 % dari tahun 2008. Dari total belanja tersebut

realisasi belanja tidak langsung sebesar 27,70 % turun lima persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja langsung naik menjadi 72,30 % naik dari tahun sebelumnya yang hanya 67,95%. Perincian dari belanja tidak langsung tersebut adalah proporsi belanja pegawai sebesar 65,27%, melonjak dari tahun sebelumnya, disusul belanja bansos 22,38 % dan belanja hibah 12,68 %. Kedua nilai agregat tersebut mengalami penurunan. Sedangkan dari sisi belanja langsung, berbeda dari tahun sebelumnya yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 48,44% naik hampir 10 % dari tahun sebelumnya, disusul belanja modal sebesar 41,24% atau turun beberapa digit secara agregat, serta belanja pegawai sebesar 10,32 % yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2010, total realisasi belanja adalah Rp 627,72 milyar, naik dari 22,06 % dari tahun 2009. Dari dana tersebut, porsi belanja tidak langsung adalah 30,65% naik 2 persen dari tahun sebelumnya, dan belanja langsung 69,35%. Dari total belanja tidak langsung, realisasi belanja pegawai masih mendominasi yaitu 62,18 %, disusul belanja hibah 13,51 % dan belanja sosial 5,89 %. Sedangkan untuk belanja langsung, belanja modal adalah 49,45 %, disusul belanja barang dan jasa sebesar 41,32 %, dan belanja pegawai 9,21 %. Secara absolut semua komponen belanja langsung mengalami kenaikan, namun secara agregat menunjukkan angka yang stabil.

Terakhir pada tahun 2011, total realisasi belanja adalah Rp 626,49 milyar atau mengalami penurunan kurang dari satu persen. Komposisi realisasi belanjanya adalah belanja tidak langsung sebesar 32,07 % naik dua digit dari tahun sebelumnya, disusul belanja langsung sebesar 67,0%. Rincian realisas belanja

tidak langsung adalah belanja pegawai sebesar 80,53% melonjak 20 persen dari tahun sebelumnya, disusul belanja hibah sebesar 19,47% naik sekitar 4 persen dari tahun sebelumnya. Dari sisi belanja langsung, komposisi terbesar adalah belanja modal sebesar 48,48%, belanja barang dan jasa 39,31 % dan belanja pegawai 12,21 %. Ketiga komponen belanja langsung tersebut tidak mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, dari trend belanja daerah Kabupaten Puncak, realisasi belanja masih banyak terserap pada pos belanja langsung pada kisaran 67 % hingga 73 % yang dominan untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa. Meski begitu, belanja tidak langsung untuk pos belanja pegawai merupakan pos yang banyak menyerap anggaran dan terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Nilai agregatnya terus naik dari 48% pada tahun 2007 menjadi 80an persen pada tahun 2011 dari total belanja tidak langsung. Di samping itu, pengeluaran untuk belanja pegawai juga terdapat pada pos belanja langsung sehingga realisasi belanja pegawai menyerap anggaran sangat besar.

Dari kedua realisasi pendapatan dan belanja daerah di atas, dapat ditemukan bahwa kapasitas keuangan daerah Kabupaten Puncak dari 2007 hingga 2010 terus mengalami defisit. Pada tahun 2007, kondisi keuangan Puncak Jaya mengalami defisit sebesar Rp 36,19 milyar, disusul pada 2008 Rp 103,83 milyar, dan 2009 Rp 32,98 milyar serta 2010 defisit Rp 61,26 milyar. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 103,83 milyar. Namun pada tahun 2011 kapasitas keuangan dapat meraih surplus sebesar Rp 14,22 milyar.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi. Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menyikapi *trend* defisit kapasitas keuangan seperti dielaskan sebelumnya, juga juga perlu melihat pos pembiayaan daerah. Analisis terhadap pembiayaan daerah Kabupaten Puncak Jaya sangat penting untuk melihat kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi defisit anggaran yang membandingkan total pendapatan dan total belanja daerah. Selama periode 2007-2011, neraca keuangan Kabupaten Puncak Jaya lebih banyak mengalami defisit anggaran. Karena itu, pembiayaan daerah menjadi instrumen Pemerintah dalam menutupi defisit. Realisasi Pembiayaan daerah terdiri dari aspek penerimaan dan pengeluaran seperti terlihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007 – 2011

Jenis Pekerjaan	2007	2008	2009	2010	2011
Pembiayaan	13,194.08	32,304.22	9,190.36	4,022.77	-
Penerimaan	15,194.08	33,304.22	10,190.36	6,022.77	-
SILPA T Asebelumnya	15,194.08	33,304.22	10,190.36	6,022.77	-
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	-	-	-	-
Pengeluaran	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
Pembentukan dan Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan modal (investasi) Daerah	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
Pembelian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
Pembayaran kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan pajak ketiga	-	-	-	-	-

Sumber : Ringkasan APBD Puncak Jaya, 2007-2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2007 adalah Rp 13,194 milyar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 15,19 milyar yang berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Total realisasi pembiayaan daerah 100% berasal dari SILPA tahun sebelumnya. Dari total SILPA tersebut sebesar 13,16 % digunakan untuk penyertaan modal daerah atau investasi di perusahaan daerah. Sedangkan pada tahun 2008, penerimaan pembiayaan daerah naik sebesar 119,19 % menjadi Rp 33,30 milyar. Namun sebaliknya, pengeluaran pembiayaan hanya sebesar Rp 1 milyar pada penyertaan modal daerah. Pada tahun 2009 dan 2010, realisasi penerimaan pembiayaan mengalami penurunan 69,40 % atau menjadi Rp 10,19 milyar pada tahun 2009 dan penurunan 40,89% menjadi hanya Rp 6,02 milyar pada tahun 2010. Pada tahun 2010, pengeluaran

pembiayaan naik 100% dari tahun 2009 yaitu menjadi Rp 2 milyar yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.

Dengan demikian, selama tahun 2007 hingga 2010 realisasi pembiayaan daerah mengalami pasang surut. Pada tahun 2008, realisasi pembiayaan sempat mengalami kenaikan sebesar 144,83 %. Tapi kenaikan tersebut terus mengalami trend penurunan pada tahun 2009 dan 2010. Pada 2009 realisasi pembiayaan turun sebesar 71,55% menjadi hanya Rp 9,19 milyar. Dan pada tahun 2010 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 56,22 % menjadi Rp 4,02 milyar. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah uang yang digunakan untuk menutupi defisit mengalami pasang surut, demikian halnya dengan penerimaan pembiayaan yang tidak stabil.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

Dari gambaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah Kabupaten Puncak Jaya selama lima tahun terakhir dapat dilihat tren kenaikan dan penurunan dari masing-masing pos APBD. Selain itu, juga dapat dianalisis berbagai persoalan, hambatan, dan tantangan dalam mengelola stabilitas anggaran daerah. Sub bab ini akan khusus melihat kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang menganalisis berbagai hal tersebut. Secara umum, gambaran pendapatan daerah Kabupaten Puncak Jaya terlihat masih mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan pendapatan terlihat jelas pada periode 2008-2009 akibat adanya pemekaran Kabupaten Puncak Jaya yang membentuk Kabupaten Puncak.

Aspek Pendapatan Daerah.Secaraa umum, realisasi pendapatan masih bersifat stagnan terutama dari sisi PAD sehingga pemerintah Kabupaten Puncak Jaya masih mengalami ketergantungan terhadap dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan dana bagi hasil serta pendapatan dari dana otonomi khusus. Sementara itu, pendapatan dari PAD masih sangat kecil apalagi bila dilihat dari angka agregat kontribusi pajak dan retribusi daerah. Berikut adalah tabel yang memuat data agregat pertumbuhan pendapatan daerah berdasarkan kontribusi masing-masing pos:

Tabel 3.4
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, 2007-2010

Sumber Pendapatan	Persentase Terhadap Total Pendapatan				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan Asli Daerah	3,97%	2,29%	4,71%	2,89%	2,44%
Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi hasil	82,26%	83,47%	79,89%	86,35%	81,95%
Pendapatan lain-lain yang sah terutama Dana Otonomi Khusus	13,7%	14,24%	15,39%	10,74%	15,39%

Sumber :Diolah dari data Ringkasan APBD Puncak Jaya, 2007-2011

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2007 tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang berkontribusi lebih dari 95%. Kontribusi PAD hanya sebesar 3,97 %, itupun terdiri dari tiga komponen termasuk pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Demikian halnya pada tahun 2008, PAD malah mengalami penurunan sedangkan dana perimbangan dan dana otonomi khusus naik masing-masing satu

digit. Pada tahun 2009, pendapatan dari PAD dan dana otonomi khusus terus naik meski dana perimbangan turun. Menurunnya kontribusi dana perimbangan disebabkan oleh menurunnya DAU dan DAK karena adanya pemekaran Kabupaten Puncak Jaya. Pada tahun 2010 dan 2011, kontribusi PAD terlihat stabil di kisaran 2%, turun dari tahun sebelumnya. Meski dana perimbangan turun sekitar 5% tapi pendapatan dari dana otonomi khusus malah naik sekitar 5% pada tahun 2011.

Dari trend data pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan keuangan daerah Kabupaten Puncak Jaya selama lima tahun masih mengalami ketergantungan yang kuat. Kontribusi PAD masih sangat kecil secara agregat bila dibandingkan dengan dua pos pendapatan dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Kecilnya kontribusi PAD disebabkan oleh belum tergarapnya potensi-potensi pendapatan daerah termasuk dari pajak dan retribusi. Komponen pajak dan retribusi diyakini masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Aspek Belanja Daerah. Seperti aspek pendapatan yang masih menyisakan beberapa persoalan, aspek belanja daerah di Kabupaten Puncak Jaya juga menemui beberapa persoalan serius. Berdasarkan data belanja yang dicantumkan di atas, pada tahun 2007 hingga tahun 2012, realisasi belanja Kabupaten Puncak Jaya mengalami pasang surut yang mengalami kenaikan pada tahun 2007-2008, tapi juga mengalami penurunan pada tahun 2009. Hal itu disebabkan oleh adanya pembentukan Kabupaten Puncak yang memekarkan dari Kabupaten Puncak Jaya. Pada kurun waktu 2010-2011, belanja Kabupaten Puncak Jaya mulai mengalami kenaikan kembali. Pada periode itu, pemerintah Kabupaten Puncak

Jaya telah menentukan prioritas belanja daerah pada belanja operasional terutama terkait aktivitas umum pemerintahan dan berbagai belanja hibah. Fokus pada aktivitas umum pemerintahan dilakukan mengingat Kabupaten Puncak Jaya merupakan kabupaten yang masih mengalami limitasi dalam hal penyediaan pelayanan publik. Berikut adalah tabel pertumbuhan realisasi belanja berdasarkan data agregat:

Tabel 3.5
Pertumbuhan Persentase Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Puncak Jaya, 2007-2011

Realisasi Belanja	Persentase Terhadap Total Belanja				
	2007	2008	2009	2010	2011
Belanja Pegawai (langsung dan tidak langsung)	22,23%	18,87%	25,68%	25,45%	34,11%
Belanja Barang dan Jasa	37,95%	26,98%	34,81%	28,65%	26,70%
Belanja Modal	24,93%	35,69%	29,78%	34,29%	32,93%
Belanja Bantuan Sosial dan Hibah	6,77%	13,62%	9,70%	5,94%	3,63%
Belanja Tak Terduga dan Belanja lainnya	8,12%	4,84%	0,03%	5,67%	2,63%

Sumber : diolah dari data Ringkasan APBD Puncak Jaya, 2007-2011

Dari aspek belanja pegawai, data di atas menunjukkan adanya fluktuasi dalam berbagai komponen belanja. Secara umum terdapat beberapa poin penting yang menggambarkan orientasi kebijakan belanja selama lima tahun, yaitu :

Pertama, proporsi realisasi belanja masih terserap pada tiga pos besar yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja pegawai. Urutan tersebut tidak banyak berubah pada

tahun-tahun berikutnya dengan beberapa perubahan. Pada tahun 2008, belanja bantuan hibah dan bantuan sosial, belanja modal mengalami kenaikan, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami penurunan secara agregat meski naik secara nilai absolut.

Kedua, pada tahun 2009 porsi belanja pegawai mengalami kenaikan lebih sekitar 7%. Hal itu diakibatkan oleh adanya pemekaran Kabupaten Puncak Jaya sehingga menurunnya jumlah pegawai. Selain itu, penurunan juga terlihat pada belanja bantuan hibah dan bantuan sosial menjadi hanya 9,70%. *Ketiga*, pada tahun 2010 dan 2011 terlihat kenaikan proporsi belanja pegawai menjadi pos belanja terbesar yang mencapai 34,11% pada tahun 2011. Sejalan dengan itu, komponen belanja yang lain justru mengalami penurunan pada tahun 2011 dari tahun 2010.

Keempat, dari data tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pos belanja pegawai pada dua pos belanja langsung dan belanja tidak langsung seperti terlihat pada tabel 3.2. Hal itu menunjukkan pos belanja pegawai disedot untuk banyak keperluan kepegawaian yang tidak hanya untuk membayar gaji rutin pegawai tapi pengeluaran lain untuk menunjang kepegawaian. Maka dari itu, adanya rangkap pos ini perlu diperhatikan untuk menciptakan efisiensi belanja pegawai. *Keempat*, dari sisi belanja dapat dianalisis bahwa fluktuasi semua pos belanja dan trend kenaikan pada belanja pegawai menunjukkan bahwa orientasi kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Puncak Jaya masih belum terarah dari tahun ke tahunnya. Dengan demikian, Pengelolaan keuangan daerah dari sisi belanja menunjukkan adanya persoalan serius dalam hal prioritas anggaran belanja.

Aspek Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya Permendagri 13 tahun 2006 maka struktur APBD tahun 2010-2012 mengalami perubahan nomenklatur pembiayaan yang berfungsi untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah. Di dalam komponen pembiayaan ini terdapat pos penerimaan daerah dan pos pengeluaran daerah yang memungkinkan daerah melakukan pinjaman sebagai penutup defisit anggaran ataupun pos sisa lebih anggaran tahun berjalan untuk mengakomodasikan surplus anggaran.

Arah kebijakan yang dilakukan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 - 2010 disusun dengan mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (KUA) Kabupaten Puncak Jaya dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) serta Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 - 2010 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Selama periode 2007-2010, kinerja neraca keuangan Kabupaten Puncak Jaya mengalami fluktuasi yang lebih banyak pada sisi defisit. Perkembangan ralisasi surplus dan defisit anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Realisasi Surplus/Defisit APBD Kabupaten Puncak Jaya, 2007-2011

Tahun	Surplus / Defisit (+/-) (dalam jutaan rupiah)
2007	36.194,10
2008	103.832,71
2009	32.989,3
2010	61.266,00
2011	+ 14.220,00

Sumber : diolah dari data Ringkasan APBD Puncak Jaya, 2007-2011

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2010, kapasitas fiskal Kabupaten Puncak Jaya mengalami defisit. Puncak defisit terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah defisit Rp103,83%. Sedangkan mulai tahun 2011, perkembangan neraca keuangan memperlihatkan kondisi surplus sebesar Rp 14,22 milyar. Gambaran keuangan yang menunjukkan defisit tersebut disebabkan oleh banyak faktor termasuk rendahnya pendapatan di satu sisi dan tingginya kebutuhan belanja pada sisi lain. Di samping itu, terjadinya defisit juga bisa disebabkan oleh belum tertatanya dan belum terarahnya belanja yang berdasarkan prioritas kebutuhan daerah sehingga pengelolaan keuangan tidak efektif dan efisien.

Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah Puncak Jaya telah melakukan langkah-langkah intervensi dalam pos pembiayaan daerah. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh anggaran dari SILPA. Realisasi pembiayaan pada 2007 adalah Rp 13,19 milyar yang naik 119,19 % pada 2008 menjadi Rp 32,30 milyar. Kenaikan realisasi pembiayaan tersebut dilakukan

untuk menutupi defisit yang tinggi pada tahun 2008. Pada tahun 2009 hingga 2011, realisasi pendapatan daerah terus mengalami penurunan. Kinerja realisasi pendapatan daerah Kabupaten Puncak Jaya selama lima tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif akibat belum berfungsinya pos-pos penerimaan pembiayaan selain dari SILPA.

3.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub bagian I dan II masing-masing telah menjelaskan kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Puncak Jaya selama periode lima tahun (2007-2011). Dari aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan daerah masih terdapat banyak persoalan. Isu kemandirian fiskal menjadi cita-cita ideal yang belum bisa diraih oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang lebih banyak mengalami defisit anggaran dibanding surplus. Berdasarkan catatan data keuangan, terlihat bahwa dari 2007 hingga 2011 pemerintah mengalami empat kali defisit anggaran dan hanya satu kali surplus yaitu pada 2011. Dengan demikian, arah kebijakan selanjutnya harus diarahkan adalah memperbaiki kinerja APBD demi mewujudkan kemandirian fiskal.

Pada intinya, kemandirian fiskal dibutuhkan untuk menopang kinerja pemerintahan secara umum dan memperbaiki kualitas layanan publik. Bila dirinci lebih jauh, kemandirian fiskal ditujukan untuk :

- 1) Menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kinerja pemerintahan dalam rangka pelayanan publik
- 2) Mendukung kinerja pemerintahan yang stabil dengan daya dukung finansial yang kuat
- 3) Menciptakan kinerja keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
- 4) Menciptakan stabilitas keuangan daerah untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pengalaman pengelolaan keuangan di Puncak Jaya yang lebih banyak mengalami defisit, maka bisa dirumuskan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang dalam aspek pendapatan, penerimaan, dan pembiayaan. Arah kebijakan ini lebih bersifat strategi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam ketiga aspek tersebut.

Pertama, aspek pendapatan. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, masih terlihat bahwa aspek penerimaan Kabupaten Puncak Jaya masih secara umum masih mengalami ketergantungan pada pemerintah pusat. Pendapatan dari pos dana perimbangan (DAU dan DAK) dan dana otonomi khusus menyokong lebih dari 81 persen. Artinya realisasi pendapatan Puncak Jaya tergantung sepenuhnya pada dana-dana dari luar. Sedangkan pendapatan dari PAD hanya berkontribusi sekitar 15 persen dari total pendapatan.

Pada aspek pendapatan ini terdapat dua strategi umum

dalam penyelesaian persoalan ketergantungan keuangan yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengelola PAD. Program intensifikasi bisa diterapkan dengan meningkatkan nilai ekonomi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah berupa maksimalisasi pengelolaan kekayaan daerah. Selain itu, intensifikasi juga dapat diterapkan dengan memaksimalkan objek pajak dan retribusi supaya bisa memberikan pemasukan yang lebih besar. Di samping strategi intensifikasi, juga dapat diambil langkah ekstensifikasi, yaitu perluasan target dan objek pendapatan salah satunya dengan cara memperbanyak objek pajak dan retribusi.

Upaya peningkatan pendapatan daerah secara umum dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui :

- a. Peningkatan penerimaan pajak, dengan cara :
 - Penyusunan data potensi pembayar pajak atau retribusi
 - Penentuan basis atau objek pajak atau retribusi
 - Penentuan tingkat/rate pajak atau retribusi
 - Pengembangan administrasi pemungutan pajak/ retribusi
 - Evaluasi Perda untuk retribusi
- b. Pengembangan inovasi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, dengan cara :
 - Perbaikan iklim investasi daerah
 - Pengelolaan dan perbaikan lingkungan dan aktivitas ekonomi

- Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Perbaikan layanan publik oleh pemerintah daerah

Ketiga langkah di atas dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dengan bertahap dan dikontekstualisasikan dengan kondisi dan keadaan daerah.

Kedua, aspek belanja. Seperti dijelaskan di sub bagian sebelumnya, realisasi belanja di Kabupaten Puncak Jaya mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal itu menunjukkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Untuk memperbaiki realiasi belanja daerah dengan cara meningkatkan daya serap sesungguhnya bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas program dalam rangka pelayanan publik. Selain meningkatkan sisi penyerapan anggaran, aspek belanja juga harus memperhatikan proporsi alokasi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan pos penerimaannya misalnya dengan mengalokasikan penerimaan pajak dan retribusi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan objek penerimaan. Pada aspek belanja, langkah-langkah yang bisa digunakan adalah :

- 1) Peningkatan Belanja Pembangunan (Infrastruktur)
- 2) Peningkatan akses infrastruktur untuk pemerataan antar wilayah
- 3) Peningkatan belanja infrastruktur dengan skema pinjaman
- 4) Penentuan prioritas belanja dengan prioritas pembangunan daerah
- 5) Penggunaan aplikasi online untuk proses anggaran
- 6) Penyesuaian anggaran tahunan dan perencanaan prioritas program jangka menengah

7) Evaluasi alokasi anggaran untuk prioritas program pengeluaran

8) Mengoptimalkan kinerja BUMD

Ketujuh program tersebut dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas keuangan Kabupaten Puncak Jaya. Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan tata kelola (*governance*) tentang keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah dengan optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Ketiga, aspek pembiayaan. Terjadinya defisit anggaran pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Puncak selama lima tahun harus segera diantisipasi. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menata APBD dengan beberapa cara penting, yaitu :

- Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA);
- Penggunaan dana cadangan
- Penyediaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan
- Pinjaman Daerah

Dengan demikian, usaha menutup defisit dapat dilakukan

dengan menyediakan lebih banyak pemasukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham di BUMD dan pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya. Dalam konteks Puncak Jaya, penataan pembiayaan daerah merupakan langkah penting yang harus dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan daerah tatkala terjadi defisit.

Dengan demikian, usaha menciptakan kemandirian fiskal merupakan suatu agenda mendesak bagi Kabupaten Puncak Jaya. Selain untuk menghindari defisit anggaran juga untuk menjamin kinerja pemerintahan tidak terganggu. Agenda lain yang juga diperlukan adalah berupaya menghindari ketergantungan terhadap dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Maka dari itu, maksimalisasi PAD merupakan agenda mendesak yang harus segera dilakukan. Penataan terhadap kinerja keuangan daerah dalam hal ini merupakan langkah yang menentukan dalam rangka mensukseskan langkah perencanaan dalam dokumen RPJMD untuk lima tahun ke depan. Pada bab berikutnya akan dijelaskan isu-isu strategis di Kabupaten Puncak Jaya yang akan menjadi basis untuk menyusun perencanaan pembangunan.



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Bab ini secara khusus akan menganalisis isu-isu strategis yang diawali dari proses identifikasi permasalahan pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan akan digunakan untuk merumuskan isu strategis yang bermuara pada pencarian solusi atas permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Lingkungan Hidup

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan lingkungan hidup adalah masih rendahnya pemahaman pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai sebuah fungsi ekosistem yang mendukung keberlanjutan kehidupan, pemenuhan kebutuhan daerah yang memicu dilakukannya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, serta peminggiran masyarakat adat dalam proses pembangunan.

4.1.2. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

4.1.2.1. Perekonomian Daerah

Belum efektifnya pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi persoalan mendasar perekonomian daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki potesi pasar. Lebih lanjut, sebagai kabupaten yang berlokasi di wilayah pegunungan, investasi di kabupaten Puncak Jaya masih sangat terbatas. Investasi yang adapun mayoritas berasal dari dalam dan hanya sedikit yang berasal dari luar daerah. Dengan keterbatasan tersebut, mesin penopang kemajuan ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya adalah investasi pemerintah itu sendiri. Fenomena ini dapat dipahami mengingat berbagai keterbatasan terkait infrastruktur yang dipaparkan sebelumnya di tengah beragamnya potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dasar penopang roda

perekonomian seperti infrastruktur transportasi dan energi mutlak diperlukan.

Selain terbatasnya investasi, piranti-piranti dasar penopang roda perekonomian juga masih terbatas. Hal itu dapat dilihat dari terbatasnya jumlah dan skala operasi perusahaan, industri kecil, hingga koperasi. Piranti-piranti yang ada pun belum bisa dikatakan modern jika melihat pola manajemennya. Bahkan dapat dikatakan bahwa mayoritas aktivitas ekonomi masih bergerak di sektor tradisional yang bersifat subsisten. Hal ini perlu mendapat perhatian serius mengingat banyaknya potensi lokal yang bisa dimanfaatkan. Sejalan dengan problem investasi, upaya menghidupkan dan mengembangkan piranti perekonomian non-negara dapat dilakukan jika terdapat sistem insentif atau struktur kesempatan yang memadai. Pembenahan tata kelola dan penyediaan infrastruktur adalah prasyarat penting yang harus segera diwujudkan. Pembenahan tersebut juga harus dilakukan dalam skema afirmatif untuk mengelola dualisme sektor perekonomian antara perekonomian modern dan tradisional serta dualisme kelompok pelaku ekonomi antara pendatang dan penduduk setempat.

4.1.2.2. Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan dalam bidang ketahanan pangan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya adalah tingginya tingkat kerawanan pangan. Sementara itu terdapat pergeseran pola konsumsi masyarakat asli Papua dari sagu, umbi-umbian dan sejenisnya menjadi beras.

4.1.2.3. Pertanian

Dalam bidang pertanian, persoalan yang dihadapi adalah minimnya SDM, sarana dan prasarana penyuluhan, produktivitas dan kualitas produksi pertanian yang baik tidak dibarengi dengan ketersediaan pasar yang mampu menyerap produksi pertanian dari Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dari hasil produksi pertanian tersebut.

4.1.2.4. Kehutanan

Dalam bidang kehutanan, persoalan yang dihadapi adalah belum optimalnya perlindungan hutan. Hal ini terkait juga dengan kepemilikan hutan yang masih dikelola secara adat. Lebih lanjut hal ini menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan ekosistem hutan. Persoalan lain yang juga dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan pendidikan.

4.1.3. Sosial Dan Budaya

4.1.3.1. Sosial

Lemahnya kohesi sosial merupakan persoalan mendasar di Kabupaten Puncak Jaya dalam bidang sosial. Secara sosio-kultural, masyarakat Puncak Jaya adalah masyarakat plural. Terdapat sejumlah kampung atau satuan etnis yang berbeda. Kondisi ini dapat dimaknai sebagai kekayaan budaya sejauh terdapat harmoni atau kohesi sosial antar kelompok tersebut. Realitasnya, sejalan dengan dinamika masyarakat, terjadi benturan horisontal antar

masyarakat maupun dengan kelompok militer yang seringkali menelan korban jiwa. Benturan horizontal ini kemudian berdampak pada munculnya gangguan keamanan di tengah masyarakat. Terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, 145 orang meninggal akibat gangguan keamanan tersebut. Sejumlah fasilitas publik, seperti sekolah, jembatan, puskesmas juga dirusak oleh kelompok pengacau keamanan tersebut.

Rendahnya kohesi sosial yang berdampak pada munculnya gangguan keamanan tersebut pada tatanan lebih lanjut menyebabkan tidak kondusifnya iklim pembangunan dan pemerintahan di Puncak Jaya. Hal itu diperburuk oleh absennya panutan sosial dalam masyarakat akibat monetisasi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Gereja dan para tokohnya yang sebelumnya sering dijadikan panutan masyarakat juga sudah semakin kehilangan peran sosialnya. Dalam kondisi yang seperti itu, pemerintah pun seperti kehilangan legitimasi di mata masyarakat sehingga potensi terjadi kekerasan dalam skala yang lebih luas sangatlah besar. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas pengelolaan pluralitas sosial untuk mengelola potensi konflik horizontal sehingga tercipta integrasi atau kohesi sosial.

4.1.3.2. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya adalah masih rendahnya kualitas kesehatan. Hal itu ditandai dengan sedikitnya jumlah dokter di kabupaten Puncak Jaya. Jumlah dokter di Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2011 adalah 22 orang. Jumlah ini tentu sangat kurang apabila dibandingkan jumlah

penduduk Puncak Jaya yang mencapai sekitar 105 ribu jiwa. Standar SPM kesehatan memberikan batas rasio ideal adalah 1 dokter melayani 2500 penduduk atau 40:100.000. Melihat standar ideal ini, kabupaten Puncak Jaya masih membutuhkan lebih banyak lagi dokter. Meskipun untuk konteks Papua, standar SPM ini sebenarnya kurang relevan jika diterapkan. Karena secara geografis dan demografis kondisinya sangat berbeda dengan kondisi daerah-daerah di luar Papua.

Gambaran kondisi pelayanan kesehatan di atas semakin diperparah oleh masih terbatasnya fasilitas, jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten Puncak Jaya masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya yang berlereng dan masih sulit dijangkau. Rumah Sakit masih 2 buah yang terdiri dari 1 RS Umum daerah dan 1 RS Umum. Dalam kurun 2 tahun, Kabupaten Puncak Jaya tidak menambah jumlah fasilitas RS dan Puskesmas.

Pada tahapan lebih lanjut, keterbatasan di atas menyebabkan, misalnya, masih tingginya tingkat penggunaan jasa dukun bayi di mana hanya 37.5 persen kelahiran bayi yang ditolong tenaga medis. Rata-rata persalinan di Puncak Jaya dibantu oleh keluarga (51.2%). Selain disebabkan terbatasnya jumlah bidan, kultur juga menjadi faktor penyebab keluarga menjadi penolong persalinan utama di Puncak Jaya. Masih perlu penyadaran kepada masyarakat tentang persalinan aman sekaligus penambahan jumlah bidan di Puncak Jaya. Antisipasi yang sudah dilakukan untuk persoalan ini adalah diadakannya pelatihan kader bidan khusus untuk persalinan. Kader tersebut biasanya berasal dari gereja-gereja setempat, yang dimaksudkan untuk menolong persalinan dalam keadaan darurat.

4.1.3.3. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya adalah rendahnya kualitas pendidikan. Data yang dipaparkan pada bab II memperjelas persoalan tersebut. Angka partisipasi murni Puncak Jaya masih sangat rendah yaitu 35,38%. Angka ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan APM Provinsi Papua yang mencapai 70% atau Papua Barat yang sudah mencapai 88%. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011 sebesar 6,12 tahun. Angka ini masih lebih baik dibandingkan kabupaten lain di Papua yang berada di pegunungan seperti Yahukimo dan Nduga. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,01. Dengan kata lain, secara umum penduduk di Kabupaten Puncak Jaya mengenyam pendidikan hingga lulus SD saja, sehingga belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Dalam hal ketersediaan guru, rasio guru dan murid di Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2011 adalah 1:38. Belum ada distrik yang memenuhi standar ideal rasio guru-murid, yaitu 1:20. Distrik yang paling memenuhi rasio ideal adalah Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya yaitu 1:27. Sedangkan distrik yang paling kekurangan guru adalah Tingginambut (1:73), distrik Yamo (1:59) dan distrik Fawi (1:57).

4.1.3.4. Kebudayaan

Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus

globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal menjadi persoalan utama dalam bidang kebudayaan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini pada tahapan lebih lanjut berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.

4.1.1. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, kesejarahan;

4.1.1.1. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

Persoalan mendesak dan mendasar yang dihadapi oleh Puncak Jaya dalam konteks anak dan remaja adalah keterlibatan anak usia sekolah dalam kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya serta pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja. Sementara itu dalam konteks pemberdayaan perempuan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang, dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.1.1.2. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi, persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja, pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang pada tahapan lebih lanjut berdampak pada tingginya angka pengangguran di Kabupaten Puncak Jaya; belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru; lemahnya perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; serta lemahnya kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi.

4.1.2. Pemerintahan dan Politik

4.1.2.1. Pemerintahan dan Politik

Dalam bidang pemerintahan dan politik di Puncak Jaya, kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik, pemerintah daerah dan adat belum mampu mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal.

4.1.2.2. Hukum

Secara umum permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya adalah akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat yang belum merata, kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum

di daerah masih kurang, pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal, penegakan supremasi hukum yang masih sangat lemah.

4.1.2.3. Kerjasama

Sementara itu persoalan mendasar yang dihadapi Puncak Jaya dalam hal kerjasama adalah belum maksimalnya kerjasama pada seluruh bidang pembangunan yang mendukung perekonomian rakyat.

4.1.3. Prasarana Wilayah

Terbatasnya prasarana wilayah/infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, telekomunikasi dan air bersih. Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut menjadi garansi minimal bagi meningkatnya mobilitas fisik sekaligus transaksi dan interaksi ide yang menjadi penggerak kemajuan.

4.1.3.1. Transportasi

Kondisi di Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan bahwa akses dari dan menuju ibukota kabupaten, hubungan antar distrik dan kampung serta antar kampung masih relatif terbatas. Dengan kondisi topografis yang berbukit dan berawa serta sebaran demografis yang merentang dari lereng atau punggung bukit hingga ke lembah, pilihan transportasi darat harus segera dibenahi dan dikembangkan serta dilengkapi dengan angkutan udara.

4.1.3.2. Sumber Daya Air

Persoalan mendasar dalam bidang sumber daya air di Kabupaten Puncak Jaya adalah belum optimalnya pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya air, lemahnya kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan dan peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;

4.1.3.3. Keciaptakaryaan

Persoalan mendasar dalam bidang keciaptakaryaan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagian besar masyarakat Kabupaten Puncak Jaya belum memiliki perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat. Lebih dari itu sebagian besar masyarakat Puncak Jaya belum terjangkau dengan fasilitas air dan kebutuhan air bersih. Sementara itu sanitasi lingkungan juga masih jauh dari standar.

4.1.3.4. Energi dan Sumberdaya Mineral

Demikian halnya dengan infrastuktur energi, terutama terkait energi listrik. Hal itu menjadi prasyarat mutlak tidak semata-mata bagi penerangan, tetapi terutama bagi optimalisasi pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Beberapa jenis obat dan fasilitas kesehatan sangat membutuhkan suplai listrik, baik untuk menyimpannya maupun untuk mengoperasikannya. Hal yang sama berlaku untuk peningkatan kesempatan belajar pada waktu malam hari bagi para siswa. Untuk itu upaya pemenuhan kebutuhan energi di Puncak Jaya melalui upaya penciptaan energi baru yang terbarukan, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro perlu mendapat perhatian besar untuk merealisasikannya dan mengoptimalkan pemanfaatannya.

4.1.3.5. Tata Ruang

Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata

ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan merupakan problem mendasar dalam konteks tata ruang di Puncak Jaya. Hal tersebut menimbulkan ketidak-konsistenan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Puncak Jaya.

Persoalan lain terkait dengan tata ruang yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya adalah tingginya disparitas antar wilayah yang membutuhkan percepatan, kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial;

4.1.3.6. Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kehadiran infrastruktur telekomunikasi juga mutlak diperlukan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik. Saat ini, infrastruktur informasi atau telekomunikasi di Kabupaten Puncak Jaya masih cukup rendah. Infrastruktur telekomunikasi yang lebih canggih harus menggunakan fasilitas satelit dengan biaya yang sangat mahal. Sementara ini teknologi komunikasi seluler yang sudah tersedia di Puncak Jaya adalah Telkomsel. Hadirnya saluran dan distribusi informasi yang baik, jelas akan sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perekonomian daerah serta pengelolaan masalah-masalah emergensi seperti bencana alam atau konflik secara lebih cepat.

Secara umum, jika dicermati lebih jauh, problem infrastruktur di Kabupaten Puncak Jaya dapat dipilah menjadi beberapa aspek, yakni ketersediaan, kualitas, maupun aksesnya. Tidak semua daerah bisa dijangkau dan menjangkau kebutuhan infrastruktur tersebut. Kalaupun bisa dijangkau atau menjangkau, kualitasnya pun masih harus ditingkatkan. Yang paling urgen pada saat ini

adalah aspek ketersediaan untuk infrastruktur transportasi yang merupakan kunci bagi mobilitas fisik sekaligus transaksi gagasan yang terjadi pada saat yang bersamaan. Hal ini jelas membutuhkan biaya yang mahal.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan di atas maka berikut ini dirumuskan sejumlah isu-isu pembangunan yang dinilai strategis, yaitu yang mampu menjadi solusi jangka menengah atas sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya, memiliki dampak besar apabila dilakukan, memerlukan dukungan sumberdaya yang besar, serta memerlukan keterlibatan banyak aktor dan pemangku kepentingan.

- a. Mendorong produktivitas perekonomian daerah melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur bidang transportasi (jalan) energi dan pemukiman.
- b. Peningkatan aksesibilitas antar distrik melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi.
- c. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan melalui penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM.
- d. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen aparaturserta akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah.

- e. Mendorong terciptanya perdamaian dan keamanan melalui pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan elaborasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta potensi dan peluang maupunantisipasi permasalahan di masa depan, perlu kiranya dirumuskan sebuah visi dan misi sebagai pedoman bagi pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya. Visi merupakan kondisi masa depan yang akan dicapai atau diharapkan dapat terwujud pada akhir periode perencanaan jangka panjang 20 tahun. Pada level yang lebih operasional visi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi panduan bagi para pelaku pembangunan dalam merumuskan dan mewujudkan agenda-agenda pembangunan. Pada bab ini akan diuraikan konsepsi visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Puncak Jaya.

5.1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Puncak Jaya baik aspek fisik, lingkungan sosial ekonomi politik dan budaya, dan kebutuhan yang harus dicapai dalam membangun daerah dan masyarakat, maka visi Kabupaten Puncak Jaya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017 adalah sebagai berikut:

“TAHUN 2017 KABUPATEN PUNCAK JAYA MENJADI DAERAH YANG SEMAKIN MAJU, MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”.

Rumusan visi tersebut merupakan landasan konseptual yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Adapun konsep-konsep yang berupa kondisi yang akan dicapai dalam pembangunan yang akan dilaksanakan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

- a. **Maju** dalam pengertian memiliki keterbukaan terhadap ide-ide baru, kreatif, inovatif, dinamis, optimis, visioner, berdaya tahan dan memiliki nilai-nilai kejuangan yang menyangkut kesadaran, dan etos kerja untuk membangun dan mengembangkan daerah yang dilakukan secara bersama-sama (bergotong royong) dalam kebersamaan

dan ikatan persatuan dan persaudaraan serta nilai-nilai religius-agama dan nilai-nilai budaya yang positif.

- b. **Mandiri** merupakan perwujudan dari suatu kondisi daerah dan masyarakatnya yang dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki dan dengan kemampuannya sendiri mengembangkan dan memajukan daerah dan masyarakatnya menjadi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.
- c. **Damai** yang dimaksudkan adalah daerah yang masyarakatnya mampu menumbuh kembangkan sikap hidup terbuka dan toleran, saling menghormati dan saling menghargai, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, golongan ataupun suku, sehingga tercapai keserasian hidup bersama dalam persatuan dan kesatuan yang menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, aman, tenteram dan damai, baik antara sesama anggota masyarakat, kelompok masyarakat maupun pemerintah. Sikap hidup yang demikian ini tidak akan menjadikan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat apakah itu perbedaan agama, suku, bahasa, adat istiadat, afiliasi politik dan sebagainya sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat.
- d. **Sejahtera** yang dimaksudkan adalah daerah yang masyarakatnya dapat tercukupi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin, jasmani maupun ruhani yang menyangkut kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, penerangan dan segala

sesuatu yang bersifat fisik lainnya maupun kebutuhan yang menyangkut pengembangan kapasitas kepribadian dan penghayatan dalam beragama.

- e. **Nilai agama dan budaya** dimaksudkan sebagai nilai dasar yang menjadi spirit dan fondasi dalam membangun daerah agar pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya sebagai bentuk kearifan lokal dalam memperkuat identitas daerah.
- f. **Tata kelola pemerintahan yang baik** dimaksudkan sebagai filosofi dan proses manajemen sebagai syarat yang dibutuhkan dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, kompetensi (memiliki kapasitas dan kapabilitas), integritas (jujur dan amanah), transparan dan akuntabel.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017 sebagai daerah yang mandiri, maju, damai dan sejahtera berlandaskan nilai agama dan budaya dengan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya misi sebagai bentuk dari penjabaraan visi yang ada. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017 adalah:

- a. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi
- b. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

- c. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
- e. Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

5.3. Tujuan dan Sasaran

Agar misi yang dicanangkan dapat diimplementasikan sebagai sebuah realitas praksis yang dapat dilaksanakan diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan bentuk operasional dari tujuan dengan tahap-tahap yang lebih spesifik. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dikemukakan disini akan mengikuti sistematika sebagaimana urutan yang terdapat pada misi.

Misi 1: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi

Infrastruktur dasar di bidang transportasi, energi, pemukiman dan telekomunikasi merupakan problema yang paling mendasar yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di Papua, tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya. Sulitnya kondisi geografis selain memerlukan biaya yang tinggi juga melahirkan kesulitan teknis yang juga tinggi untuk mewujudkan

ketersediaan infrastruktur dasar tersebut. Betapapun kesulitan yang dihadapi, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar tidak dapat dielakan karena pembangunan infrastruktur dasar menjadi indikasi kemajuan pembangunan suatu daerah selain juga menjadi faktor yang mendorong bagi pembangunan dan kemajuan di sektor-sektor lainnya. Oleh karenanya pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya memberikan perhatian pada pembangunan di bidang infrastruktur dasar ini sebagai prioritas dalam pembangunannya yang mencakup infrastruktur di bidang i) transportasi, ii) energi, iii) pemukiman, dan iv) telekomunikasi.

Pembangunan/pengembangan di bidang infrastruktur transportasi ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan darat dan perhubungan udara. Ini merupakan dua hal yang sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat khususnya dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat dengan pertukaran arus barang dan jasa. Pengembangan di bidang energi tujuannya adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur di bidang energi agar kebutuhan energi masyarakat dapat dipenuhi dengan pasokan listrik yang memadai bagi keperluan masyarakat baik untuk kegiatan ekonomi, industri maupun sosial. Pengembangan infrastruktur di bidang telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berkomunikasi dan dapat mengakses informasi. Dengan demikian masyarakat kabupaten Puncak Jaya tidak lagi terisolasi dari dunia luar dan dapat mempermudah hubungan komunikasi baik komunikasi antar kampung, antar distrik maupun dengan daerah lainnya. Sedangkan Pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman ditujukan untuk menyediakan kawasan pemukiman yang

sederhana namun sehat dengan lingkungan sanitasi dan sosial yang baik, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Secara lebih jelasnya tujuan dan sasaran dari misi satu yang menyangkut peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bidang transportasi, energi, pemukiman dan telekomunikasi dituliskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Misi 1: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana perhubungan darat	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan yang sudah ada 2. Tersedianya jaringan jalan antar distrik 3. Tersedianya jaringan jalan antar kampung 4. Tersedianya moda transportasi darat
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan udara	1. Meningkatnya kapasitas bandara Mulia 2. Terbangunnya bandara perintis
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur bidang energi	1. Berfungsinya fasilitas pembangkit listrik dan jaringan kelistrikan
Meningkatnya ketersediaan dokumen induk pembangunan	1. Tersedianya masterplan pembangunan daerah
Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	1. Meningkatnya sarana komunikasi 2. Meningkatnya jangkauan komunikasi 3. Meningkatnya sarana dan jangkauan jaringan internet
Mengembangkan infrastruktur pemukiman sederhana yang sehat	1. Tersedianya kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana 2. Berfungsinya sistem dan jaringan air bersih di setiap kampung 3. Tersedianya sistem sanitasi dan pengolahan limbah

Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Modal dasar pembangunan selain ditopang oleh sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah, yang lebih penting lagi adalah sumberdaya manusia yang melakukan pembangunan itu sendiri. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang melaksanakan pembangunan, oleh karenanya kualitas sumberdaya manusia menjadi faktor determinan yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan dan pembinaannya.

Di antara indikator dari kualitas sumberdaya manusia adalah pada pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjaga di masyarakat akan sangat menentukan tingkat kualitas dari masyarakat tersebut. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menyadari bahwa tingkat pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan masih jauh dari memadai, sehingga masyarakat kabupaten Puncak Jaya masih tertinggal dalam hal kualitas sumberdaya manusianya. Oleh karenanya pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya memprioritaskan dalam misi pembangunannya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi riil saat ini dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan masih belum merata dan jauh dari keterjangkauan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang rendah.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan tugas nasional bagi semua aparatur pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah. Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan telah diatur melalui Peraturan Menteri yakni Permendiknas nomor 15 Tahun 2010 tentang Standard

Pendidikan Minimum (SPM) bidang pendidikan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menyangkut empat aspek yaitu pelayanan dasar, pelayanan rujukan, tanggapan terhadap kejadian luar biasa, dan promosi kesehatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dua peraturan menteri tersebut. Dalam hal pelayanan pendidikan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Puncak Jaya adalah meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini sangat penting karena pelayanan pendidikan dasar dan menengah merupakan basis dari pemerataan di bidang pendidikan yang sarannya mencakup tersedianya fasilitas pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah yang memadai. Demikian juga dengan tenaga pengajar di setiap sekolah dan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pendidikan dan kependidikan. Tanpa tenaga pengajar yang memadai serta fasilitas tempat tinggal yang tidak memadai bagi tenaga pengajar maka akan sulit bagi tenaga pengajar untuk memberikan pelayanan pendidikan yang juga memadai. Dengan kondisi geografis yang sulit, pelayanan pendidikan juga tidak akan dapat dijangkau oleh siswa-siswa yang bertempat tinggal jauh dari lokasi-lokasi sekolah. Oleh karenanya untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan

perlu peningkatan akses masyarakat melalui sekolah berbasis asrama dengan biaya yang ditanggung pemerintah ataupun melalui pendidikan-pendidikan non formal yang dikembangkan di daerah.

Dalam hal pelayanan kesehatan, tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Puncak Jaya adalah mengoptimalkan operasionalisasi pelayanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pada tabel di bawah ini dipaparkan sasaran-sasaran dari setiap tujuan pada Misi Kedua.

Tabel. 5.2.
Tujuan dan Sasaran Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan dasar	1. Tersedianya fasilitas pendidikan dasar di setiap distrik dalam jumlah yang lebih memadai 2. Tersedianya tenaga pengajar di setiap sekolah dengan jumlah yang memadai 3. Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pendidik dan kependidikan
Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan menengah	1. Tersedianya fasilitas pendidikan menengah di setiap satuan wilayah pengembangan (SWP) 2. Tersedianya tenaga pengajar yang memadai di setiap sekolah 3. Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pendidik dan kependidikan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	1. Tersedianya asrama pelajar tingkat SMA di setiap SWP 2. Tersedianya dan tersaluranya bantuan biaya pendidikan bagi warga tidak mampu 3. Terselenggaranya pendidikan non formal

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	1. Meningkatnya kompetensi guru 2. Tersedianya insentif yang memadai bagi tenaga pengajar 3. Tersedianya sarana pendukung yang memadai di setiap sekolah
Mengoptimalkan operasionalisasi pelayanan kesehatan	1. Tersedianya layanan kesehatan yang fungsional 2. Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai di setiap Puskesmas dan Pustu 3. Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan 4. Tersedianya obat-obatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan
Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan	1. Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit yang lebih memadai 2. Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang lebih memadai di RSUD 3. Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan 4. Tersedianya obat-obatan yang memadai
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	1. Tersedianya layanan kesehatan keliling dan antar-jemput warga 2. Meningkatnya ketersediaan layanan perawatan di tingkat distrik 3. Terselenggaranya kemitraan dengan gereja dalam pengelolaan layanan kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya kapasitas SDM tenaga kesehatan 2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan	1. Tersedianya jumlah tenaga pengajar yang memadai di D3 Keperawatan 2. Tersedianya jumlah Tenaga Kependidikan yang memadai 3. Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pengajar D3 Keperawatan 4. Meningkatnya kualitas tenaga pengajar D3 Keperawatan 5. Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Belajar 6. Berubahnya status dari Program Khusus menjadi Program Studi (Prodi) D3 Keperawatan 7. Meningkatnya kualitas lulusan D3 Keperawatan

Misi 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan selain memerlukan komitmen dari aparatur pemerintahan juga perlu ditunjang dengan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Sebagaimana halnya dengan daerah otonomi baru hasil pemekaran, Kabupaten Puncak Jaya memiliki persoalan yang sama dalam hal sumberdaya manusia aparatur pemerintahannya meski telah menjadi daerah otonomi baru sejak tahun 1996. Setelah berpisah dengan Kabupaten Paniai berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996, kabupaten Puncak Jaya harus berjuang menegakan penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri. Tantangan yang dihadapi tentunya adalah ketersediaan infrastruktur atau sarana dan parasarana pemerintahan yang mampu memfasilitasi kinerja aparturnya agar dapat memberikan pelayanan dasar pemerintahan yang optimal kepada masyarakat. Masalah kedua adalah ketersediaan jumlah ideal SDM aparatur yang memenuhi tingkat kompetensi yang sesuai.

Setelah melewati masa kepemimpinan beberapa kepala daerah yakni Drs. Ruben Ambrau (1996 – 2000), Drs. Philipus Andreas Coem (2000- 2001), Drs. Elieser Renmaur dan Lukas Enembe, S.I.P. (2001-2006), (Lukas Enembe, S.I.P. dan Drs. Henok Ibo (2007-2012), Kabupaten Puncak Jaya telah memiliki struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah yang telah memadai dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian di era kepemimpinan

Drs Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos., M.Si. pada periode 2013-2017 untuk menjadikan daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagai daerah yang semakin mandiri, maju, damai dan sejahtera sebagaimana yang dikemukakan dalam visi kepemimpinannya, diperlukan kinerja perangkat daerah yang memiliki komitmen serta kapasitas yang memadai untuk dapat menjalankan visi kepemimpinan dari kepala daerah tersebut. Untuk itulah diperlukan keberadaan SDM aparatur yang memenuhi nilai fungsionalitas berbasis pada kompetensi yang dapat memberikan kinerja terbaiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang ada pada organisasi kerjanya. Kompetensi aparatur ini menjadi keniscayaan dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan pemerintahan.

Selain persoalan kompetensi yang terkait dengan kapasitas aparatur dan kelembagaan, persoalan lainnya adalah yang menyangkut komitmen aparatur dalam bentuk etos dan disiplin kerja. Aparatur yang memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya akan sangat membantu dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Oleh karenanya diperlukan penyiapan sistim dan instrumen yang mampu menumbuhkan etos kerja dan disiplin aparatur sebagai budaya organisasi aparatur pemerintahan dalam mencapai tujuan pemerintahan. Sesuai dengan kebutuhan yang ada terkait dengan kapasitas dan komitmen aparatur, maka tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dan kinerja aparatur pemerintahan. Secara lebih spesifik tujuan dari penjabaran misi tiga tentang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5.3.
Tujuan dan Sasaran Misi 3: Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan
Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kapasitas Aparatur	1. Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan
	2. Meningkatnya keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugasnya
Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan	1. Optimalnya Komitmen Aparatur
	2. Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data, Informasi dan Instrumen Survei yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan	1. Meningkatnya Kapasitas Perencanaan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
	2. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	3. Menguatnya Kapasitas Anggota DPRD
	4. Meningkatnya kualitas representasi

Misi 4: Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan menetapkan bahwa ketahanan pangan menyangkut tiga aspek, yakni 1) ketersediaan pangan yang cukup jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dalam hal jumlah maupun mutunya, 2) distribusi pangan yang dapat didistribusikan secara menyeluruh ke pelosok wilayah dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, 3) konsumsi pangan yang merujuk

pada kemampuan setiap rumah tangga mengekses pangan yang cukup serta mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian di atas, nyatalah bahwa apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pertanian tersebut belum dapat memberikan gambaran yang menggembirakan dalam konteks masyarakat Kabupaten Puncak Jaya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dapat dikatakan belum memenuhi harapan sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan minimal. Masalah ketahanan pangan sangat terkait dengan masalah pengembangan ekonomi. Sejak tahun 1996 fokus pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pada masalah pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka keterisolasian Kabupaten Puncak Jaya agar dapat terhubung dengan daerah lainnya. Sementara pengembangan di bidang perekonomian masyarakat masih belum tertangani dengan baik. Kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari kabupaten lain khususnya dari Wamena dengan menggunakan transportasi darat, atau dari Timika dan Jayapura dengan menggunakan transportasi udara. Implikasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi sangat tinggi karena tingginya biaya transportasi. Sementara produk lokal khususnya produk di bidang pertanian dan perkebunan belum dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan karena tidak kompetitif secara ekonomi.

Pemerintah daerah masih memusatkan peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi khususnya pembukaan jalan yang menghubungkan antar distrik dan kabupaten dan juga moda transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi khususnya untuk distribusi

komoditas yang bernilai ekonomi. Namun demikian, mengingat terbatasnya sumberdaya ekonomi yang ada, maka sumberdaya ekonomi tersebut harus dikembangkan sedemikian rupa agar lebih kompetitif dan memiliki nilai tambah yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam hal ini menetapkan pembangunan dan peningkatan produktifitas perekonomian lokal sebagai bagian dari misi pembangunan daerah. Peningkatan produktifitas perekonomian lokal akan menentukan tingkat produktifitas daerah. Seluruh potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan industri kecil perlu mendapatkan perhatian sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karenanya dalam mencapai misi empat tentang meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Penciptaan iklim usaha yang kondusif ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran peningkatan dan pengembangan iklim berwira usaha dan potensi perdagangan, serta pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan produktifitas ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal untuk melakukan peningkatan produktifitas pertanian dan perkebunan, peningkatan produksi peternakan, pengembangan perikanan, dan pengembangan potensi pariwisata. Dan yang lebih penting lagi dari semuanya adalah tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi produk lokal dengan sasaran perkembangan industri kreatif masyarakat. Hal terakhir ini menjadi penting agar keterbatasan sumberdaya yang ada dapat disubstitusi dengan pengembangan industri kreatif yang

bernilai ekonomi tinggi. Secara lebih ringkas tujuan dan sasaran dari misi empat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.
**Tujuan dan Sasaran Misi 4: Meningkatkan Produktivitas
Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal**

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan iklim usaha dan perdagangan	1. Menguatnya iklim berwirausaha dan potensi perdagangan 2. Meratanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja
Meningkatkan produktifitas ekonomi sesuai dengan potensi lokal	1. Meningkatnya produktivitas potensi pertanian 2. Meningkatnya produktivitas potensi perkebunan 3. Meningkatnya produksi peternakan 4. Berkembangnya budidaya perikanan 5. Berkembangnya daerah tujuan wisata 6. Berkembangnya industri kreatif rakyat
Menguatnya Ketahanan Pangan Kabupaten	1. Tersedianya Peta Data Kerawanan Pangan Kabupaten
Meningkatnya Hasil Pajak Daerah	1. Menguatnya kesadaran kewajiban membayar pajak

Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya pada dasarnya merupakan masyarakat yang terbuka kepada para pendatang. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para pendatang dari berbagai suku di luar Papua yang bermukim dan menjadai warga di kabupaten Puncak Jaya. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat pendatang menikah dengan warga setempat. Demikian juga dengan masyarakat lokal, meski terdiri dari beberapa suku sejauh ini tidak

ada konflik berarti yang menyebabkan terjadinya perang suku yang besar. Dapat dikatakan kehidupan sosial masyarakat di kabupaten Puncak Jaya relatif cukup kondusif dan harmonis. Kalaupun terjadi kerawanan sosial yang mengganggu kehidupan masyarakat Puncak Jaya adalah menyangkut masalah gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tidak dapat dipungkiri bahwa gangguan keamanan yang dilakukan oleh OPM memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan dalam menyikapi situasi kemasyarakatan yang ada, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melihatnya dalam perspektif sosial melalui pembangunan sosial dan menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Kondisi harmonis yang ada pada titik tertentu juga dapat menimbulkan potensi konflik yang ada di antara masyarakat baik antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang terkait dengan peluang ekonomi yang lebih didominasi oleh pendatang, antara sesama warga pendatang, maupun di antara sesama warga asli Papua sendiri. Dalam konteks yang demikian misi kewarganegaraan dan kerukunan hidup antar elemen masyarakat menjadi penting untuk mentransformasi potensi konflik ke dalam semangat menghargai kebhinekaan, pembangunan ruang inklusif dan integrasi sosial dalam masyarakat. Oleh karenanya tujuan dari misi ke lima utamanya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan sasaran tersedianya data base perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial, tersedianya pekerja sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial, tersedianya sarana dan prasarana sosial panti dan luar panti, dan terbentuknya mekanisme koordinasi penanganan masalah kesejahteraan sosial. Selain itu tujuannya adalah meningkatkan

perlindungan dan jaminan sosial, mendorong pemberdayaan sosial, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif.

Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial sasaran utamanya adalah pada tersedianya bantuan sosial bagi korban bencana alam pada saat tanggap darurat, tersedianya bantuan sosial bagi korban bencana sosial, adanya pelayanan sosial bagi lanjut usia, tersedianya rehabilitasi dan perlindungan penyandang cacat, dan adanya penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan. Mendorong pemberdayaan sosial sasaran utamanya adalah tersedianya mekanisme penanggulangan kemiskinan, adanya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil, dan adanya pemberdayaan keluarga. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sasaran utamanya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif sasarannya adalah meningkatnya kerukunan hidup masyarakat.

Melalui perspektif sosial sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, diharapkan problematika sosial yang dapat mengancam kerukunan hidup dalam masyarakat dapat dieliminasi sedemikian rupa sehingga dapat tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis yang hidup berdampingan dengan damai dan saling bekerjasama membangun masyarakat dan daerah. Adapun rincian singkat tentang misi ke lima dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5.
Tujuan dan sasaran Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	1. Tersedianya data base perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya kualitas pekerja sosial dan koordinasi penanganan masalah sosial
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	1. Tersedianya bantuan bagi korban bencana alam pada saat tanggap darurat 2. Tersedianya bantuan sosial bagi korban bencana sosial pada saat tanggap darurat
Mendorong pemberdayaan sosial	1. Tersedianya data penduduk dan rumah miskin 2. Tersedianya mekanisme penanggulangan kemiskinan
Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Menopang Perekonomian Keluarga 2. Terwujudnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak 3. Terwujudnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUGA) 4. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 5. Meningkatnya promosi kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan di masyarakat 6. Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera 7. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan perempuan
Meningkatkan ketersediaan data kependudukan sebagai basis pengambilan kebijakan	1. Tersedianya data kependudukan yang selalu diperbaharui
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatnya stabilitas keamanan masyarakat

Mendasarkan pada uraian tentang visi, misi tujuan dan sasaran yang menjadi arah pembangunan bagi kabupaten Puncak Jaya, maka dapatlah dikatakan bahwa pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Puncak Jaya telah memiliki konsep dan arah pembangunan yang terorganisir, tersistimasi dan terukur melalui pembangunan yang terintegrasi pada berbagai sektor sebagaimana tercantum pada misi pembangunan yang ada.



Bab VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu diperjelas dengan menentukan sasaran pokok, arah kebijakan, dan prioritas tahapan untuk mencapainya. Bab VI memaparkan ketiga hal itu secara komprehensif dan berurutan. Sasaran pokok merupakan kondisi yang menjadi target untuk diwujudkan dari setiap misi yang telah ditetapkan selama 5 tahun ke depan. Sedangkan arah kebijakan adalah strategi yang relevan untuk diterapkan dalam rangka mencapai setiap sasaran pokok. Agar pencapaian sasaran pokok lebih realistis, sistematis, dan berkesinambungan untuk dicapai maka pada bagian terakhir Bab ini dipaparkan tahapan pencapaian yang berisi capaian-capaian yang diprioritaskan dari setiap tahapan pembangunan lima tahunan.

Pada tahun 2017, Kabupaten Puncak Jaya diharapkan telah dapat meningkatkan kemandirian, kemajuan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada nilai agama dan budaya local dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Visi pembangunan inilah yang menjadi acuan bekerjanya seluruh SKPD dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya selama lima tahun mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerangka metodologis sehingga tujuan yang abstrak tersebut dapat diturunkan dalam beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang sinergis.

Namun demikian, upaya mencapai visi pembangunan tentunya tidaklah mudah karena kompleksitas isu dan aktor yang terlibat di dalamnya. Kompleksitas semakin tinggi untuk pemerintahan yang berada di wilayah yang rentan konflik seperti di Kabupaten Puncak Jaya. Sebagai kabupaten yang sangat rentan terjadinya konflik vertical, Kabupaten Puncak Jaya memiliki persoalan stabilitas keamanan yang menopang keberhasilan program pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka perencanaan strategis untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan strategis merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan bahwa tujuan pembangunan akan memberikan nilai tambah bagi stakeholder pemerintah daerah. Nilai tambah diukur berdasarkan parameter objektif yang telah ditentukan. Keberadaan indikator mutlak adanya dalam proses perumusan strategi pembangunan. Selain berisikan program indikatif dan parameter pengukur kinerja, rumusan strategi pembangunan juga memuat langkah-langkah untuk memperbaiki

kinerja dan kapasitas birokrasi, baik dari sisi infrastruktur fisik, sistem manajemen maupun soft skills aparatur pemerintah.

6.1. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman dan Telekomunikasi

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Puncak Jaya sudah relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di wilayah pegunungan tengah. Akses darat dari dan menuju Mulia sudah terbangun. Infrastruktur air bersih, komunikasi serta kelistrikan juga sudah mulai terbangun. Sayangnya kondisi tersebut belum merata di seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya, sementara ini hanya di Mulia sebagai ibukota kabupaten. Infrastruktur di beberapa distrik yang lain masih sangat memprihatinkan, terutama infrastruktur di distrik yang berlokasi di kawasan yang secara geografis sangat sulit dijangkau. Dengan adanya perbaikan infrastruktur dasar terutama infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih, diharapkan gerak pembangunan di Puncak Jaya secara umum akan dapat lebih dipercepat dan kesejahteraan masyarakat sedikit demi sedikit dapat terangkat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Puncak Jaya.

Secara umum strategi yang diterapkan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar bidang transportasi, energi, pemukiman, dan telekomunikasi di Kabupaten Puncak Jaya dalam periode 2013-2017 ini adalah:

1. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur dan sarana perhubungan darat.
2. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur perhubungan udara.
3. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Sungai.
4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur bidang energi.
5. Peningkatan ketersediaan jaringan komunikasi.
6. Pengembangan Infrastruktur pemukiman sederhana yang sehat.
7. Lebih detil arah kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur dasar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1: Meningkatkan
Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi,
Energi, Pemukiman dan Telekomunikasi

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang sudah ada	Perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan
Menyediakan jaringan jalan antar distrik dan ibukota kabupaten	Pembangunan jalan dan jembatan antara distrik dengan ibukota kabupaten. Prioritas dilakukan di distrik Mewoluk, Silamburawi, Tingginambut, Gubume dan Wonwi. Termasuk pembangunan rute jalan strategis seperti di distrik Muara (jalan aspal dari bandara ke Kulirik) dan di distrik Tingginambut (jalur distribusi hasil bumi)
Menyediakan jaringan jalan antar kampung	
Menyediakan moda transportasi darat	Pengembangan moda transportasi darat. Termasuk penyediaan transportasi umum di distrik Kalome
Meningkatkan kapasitas Bandara Mulia	Peningkatan kapasitas bandara
	Pemeliharaan Bandara Mulia

Strategi	Arah Kebijakan
Membangun bandara perintis di beberapa distrik	Pembangunan lapangan terbang perintis terutama di distrik Lumo serta rehabilitasi lapangan terbang di distrik Torere
Meningkatkan arus lalu lintas perhubungan sungai	Peningkatan jumlah perahu/sampan terutama di distrik Torere dan Fawi. Pembangunan tambatan/dermaga perahu
Memfungsikan fasilitas pembangkit listrik jaringan kelistrikan	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan dan sumberdaya listrik yang ada Pengembangan potensi sumber energi listrik alternatif. Prioritas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di distrik Yamo, Yamoneri dan Nume Potensi sumber energi listrik alternatif Jaringan distribusi listrik
Menyediakan Masterplan Pembangunan Daerah	
Meningkatkan sarana komunikasi	Peningkatan sarana komunikasi
Meningkatkan jangkauan komunikasi	Pembangunan sarana komunikasi. Prioritas di distrik yang belum memiliki sarana telekomunikasi seperti Nioga Penyediaan SDM Radio Daerah
Meningkatkan sarana dan jangkauan jaringan internet	Pemeliharaan dan peningkatan prasarana internet
Menyediakan kawasan pemukiman sederhana dan sehat	Pengembangan perumahan sederhana dan sehat. Prioritas pembangunan di distrik Mewoluk, Taganombak, Torere, Yamo, Nume, Nioga, Gubume, Kalome, Wonwi, Silamburawi, Yamoneri dan Fawi (rumah kopel)
Memfungsikan sistem dan jaringan air bersih di setiap kampung	Memelihara dan meningkatkan sistem dan jaringan air. Pembangunan fokus di distrik Guragi, Mewoluk, Molanikime, Torere, Yamo, Kalome, Nume, Wonwi, Nioga dan Lumo Konservasi kawasan-kawasan sumber air bersih
Menyediakan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah	Mengembangkan sistem sanitasi, termasuk pembangunan MCK di distrik-distrik seperti Mewoluk dan lainnya Mengembangkan pengelolaan limbah

6.2. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

6.2.1. *Pelayanan Pendidikan*

Salah satu persoalan yang menjadi penghambat laju pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya adalah rendahnya kualitas SDM. Karena itu pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan menengah secara lebih memadai menjadi solusi mutlak untuk memperbaiki kondisi ini. Permasalahan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya adalah terbatasnya jumlah pengajar dengan persebaran yang tidak merata antardistrik dan antarsekolah. Kondisi ini disebabkan oleh keengganan para guru untuk ditempatkan di daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan atau sulit dijangkau karena kondisi geografisnya. Infrastruktur pendidikan secara umum juga tidak memadai. Pembangunan pendidikan di Puncak Jaya bukan hanya menghadapi persoalan dari aspek *supply* tetapi juga dari aspek *demand*. Minat untuk bersekolah masih relatif rendah karena masih banyak masyarakat Puncak Jaya yang belum memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka.

Memperhatikan sejumlah tantangan tersebut dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab V, strategi umum pembangunan pendidikan Kabupaten Puncak Jaya periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah

2. Peningkatan jumlah, redistribusi dan penguatan komitmen tenaga pengajar
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk sekolah
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan yang lebih terperinci dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 6.2a.
Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Strategi	Arah Kebijakan
Pembangunan gedung sekolah baru untuk tingkat SD dan SMP	Pembangunan gedung sekolah baru diprioritaskan di distrik yang belum memiliki gedung sekolah atau jumlahnya masih terbatas sementara jumlah anak usia sekolah cukup banyak
	Pembangunan unit baru SD diprioritaskan di Distrik Mewoluk, Taganombak, Torere, Kalome, Silamburawi, Wonwi, Lumo dan Guragi
	Pembangunan unit baru SMP diprioritaskan di Distrik Mewoluk, Torere Gubume, Kalome, Nume, Lumo dan Guragi
Penyelenggaraan layanan pendidikan tingkat SD dan SMP dengan memanfaatkan fasilitas publik yang telah ada	Mengembangkan kerjasama dengan gereja sebagai tempat penyelenggaraan layanan pendidikan tanpa mengganggu aktivitas peribadatan

Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan sekolah satu atap dan berasrama untuk tingkat SD dan SMP	Sekolah satu atap diprioritaskan untuk diselenggarakan di SD atau SMP yang telah ada di kawasan-kawasan yang sulit untuk membangun gedung sekolah yang baru. Distrik Torere merupakan distrik yang mendapatkan prioritas sebagai lokasi pengembangan sekolah SD dan SMP satu atap berasrama.
Meningkatkan pemerataan sebaran guru antardistrik dan antarsekolah melalui pendistribusian ulang guru	Pendistribusian guru diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah yang mengalami keterbatasan jumlah guru. Redistribusi tenaga pendidikan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan. Penambahan tenaga pendidik diprioritaskan di Distrik Mewoluk dan Kalome.
Penyediaan rumah dinas bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat dasar dan menengah	Pembangunan rumah dinas dilakukan di pusat distrik atau daerah yang strategis dan diprioritaskan bagi guru yang belum/ tidak memiliki rumah di tempat bertugas. Penyediaan rumah diprioritaskan di Distrik Taganombak, Torere dan Guragi.
Pembangunan gedung sekolah baru untuk tingkat SMA	Pembangunan gedung sekolah baru diprioritaskan di distrik yang paling strategis di setiap satuan wilayah pengembangan (SWP)
Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dalam jumlah yang lebih memadai untuk tingkat SMA	Pengadaan tenaga pendidik CPNS untuk tingkat SMA Redistribusi tenaga pendidik SMA yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah yang mengalami keterbatasan jumlah tenaga pendidik Pengembangan kerjasama dengan institusi mitra (perguruan tinggi, NGO, yayasan) dalam pengelolaan guru kontrak pada tingkat SMA
Pembangunan asrama bagi pelajar SMA dan penyediaan fasilitas pendukungnya	Pembangunan asrama dilakukan di lokasi SMA

Strategi	Arah Kebijakan
Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga tidak mampu	Pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa tidak mampu di luar yang ditanggung program pemerintah pusat (BOS dan BSM)
	Pemberian beasiswa untuk SD dan SMP diprioritaskan di Distrik Fawi
Pengembangan layanan pendidikan non-formal	Pengembangan kerjasama dengan gereja/ yayasan dalam pengelolaan pendidikan non-formal
	Pengembangan pendidikan non-formal (Program Kejar Paket A, B, C) yang ditujukan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi pendidikan terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi dan yang masih memiliki angka buta huruf tinggi
Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bekerjasama dengan gereja/ yayasan	Promosi dilakukan melalui kegiatan keagamaan terutama terhadap warga yang tidak lagi berusia sekolah (orang dewasa atau orang tua) sehingga selain bersedia mengikuti pendidikan non-formal mereka juga dapat mendorong anak dan saudaranya untuk mengikuti pendidikan formal
Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan pendidikan melalui wadah komite sekolah	Pemberdayaan terutama dilakukan terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan pengusaha
Mengembangkan skema fasilitasi bagi guru untuk studi lanjut S1	Fasilitasi studi lanjut diprioritaskan untuk menambah guru bidang studi tertentu yang jumlahnya masih terbatas
Mengembangkan skema fasilitasi bagi guru untuk studi lanjut S1	Fasilitasi studi lanjut diprioritaskan untuk menambah guru bidang studi tertentu yang jumlahnya masih terbatas
Mengembangkan skema fasilitasi bagi guru untuk mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas (pendidikan non-gelar)	Pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas guru yang telah berkualifikasi minimal S1 atau yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan bergelar

Strategi	Arah Kebijakan
Pengalokasian insentif daerah bagi guru	Penentuan besaran insentif didasarkan pada sebuah standar yang secara khusus dibuat dengan memperhatikan tingkat keterisolasian lokasi sekolah, beban tugas, dan kedisiplinan guru dalam memenuhi kewajiban mengajar
Pengadaan perlengkapan kelas	Pengadaan perlengkapan untuk memenuhi standar minimal kelas
Penyediaan fasilitas perpustakaan	Penyediaan fasilitas perpustakaan untuk memenuhi standar minimal
Penyediaan fasilitas komputer dan internet	Penyediaan fasilitas komputer dan internet dilakukan untuk mendukung layanan perpustakaan
Pengadaan fasilitas laboratorium	Pengadaan fasilitas laboratorium untuk memenuhi standar minimal

6.2.2. *Pelayanan Kesehatan*

Pelayanan kesehatan di Puncak Jaya masih jauh dari kata memadai. Ketersediaan pelayanan kesehatan masih terbatas dan belum berfungsi optimal karena beberapa fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan puskesmas pembantu, tidak berfungsi dengan baik. Keterbatasan jumlah dan rendahnya komitmen dari sebagian petugas pelayanan menjadi penyebab sejumlah fasilitas kesehatan di beberapa wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesadaran dan wawasan masyarakat tentang kesehatan, terutama di sejumlah wilayah, juga masih rendah. Masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berobat ke dukun dan semacamnya daripada ke fasilitas kesehatan. Masih banyak pula ibu yang melahirkan hanya dibantu oleh pihak keluarga tanpa sentuhan tenaga kesehatan termasuk pada pascapersalinan dan perawatan balita.

Untuk mengatasi persoalan tersebut dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi umum yang dilakukan mencakup:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
2. Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan.
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan pada lima tahun ke depan dijabarkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 6.2b.
Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi puskesmas dan pustu sebagai penyelenggara layanan kesehatan dasar	Puskesmas dan pustu di setiap distrik
Pemerataan sebaran tenaga kesehatan di puskesmas/ pustu di tiap distrik dan atau kampung	Pendistribusian tenaga kesehatan diprioritaskan untuk puskesmas/pustu yang kekurangan tenaga kesehatan.
	Penambahan tenaga medis diprioritaskan di distrik Mewolu dan Yamo.
Penyediaan rumah dinas bagi tenaga kesehatan	Pembangunan rumah dinas dilakukan di pusat distrik atau daerah yang strategis dan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang belum/ tidak memiliki rumah di tempat bertugas.
	Pembangunan rumah dinas diprioritaskan di Distrik Kalome dan Guragi.

Strategi	Arah Kebijakan
Pemenuhan obat-obatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan	Penyediaan obat-obatan yang lebih memadai diutamakan bagi puskesmas dan puskesmas yang memiliki angka kunjungan tinggi
Pengadaan unit pelayanan fungsional tambahan di RSUD	Penambahan 5 unit pelayanan fungsional di RSUD: ICU, IGD, Perawatan Anak, Instalasi Farmasi, dan Klinik VCT
Pengembangan unit pelayanan spesialis di RSUD	Unit pelayanan spesialis yang ditambahkan mencakup Spesialis Kandungan, Anak, Penyakit Dalam, Bedah, dan Patologi Klinik
Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan RSUD	Pengadaan unit ambulan untuk melakukan layanan penjemputan pasien gawat darurat
Penambahan ketersediaan obat-obatan secara lebih memadai	Diprioritaskan untuk jenis obat yang diperlukan oleh unit pelayanan spesialis yang baru dikembangkan
Peningkatan kualitas dan daya jangkau unit layanan kesehatan keliling	Pengadaan unit kendaraan darat maupun air untuk memperkuat armada pelayanan kesehatan keliling. Diprioritaskan untuk dikembangkan di distrik-distrik yang memiliki wilayah luas dengan fasilitas kesehatan yang terbatas.
Peningkatan ketersediaan layanan perawatan (rawat inap) di tingkat puskesmas	Diprioritaskan untuk dikembangkan di tiga distrik yang jauh dari RSUD
Penyelenggaraan kerjasama dengan gereja dalam pelayanan kesehatan	Kerjasama dilakukan dengan gereja yang memiliki jemaat terbanyak dan yang berlokasi di daerah terpencil.
Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan	Diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas bidan dalam menangani kasus komplikasi persalinan dan dokter dalam menangani kasus kegawatdaruratan
Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu hamil	Diutamakan untuk meningkatkan proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan serta peningkatan pelayanan ibu hamil dan pascapersalinan
Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi	Pelayanan bayi ditujukan terutama untuk pemberian imunisasi lengkap dan peningkatan kualitas gizi balita

Strategi	Arah Kebijakan
Penyediaan Jumlah Tenaga Pendidik yang memadai	Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga pendidik D3 Keperawatan berstatus dosen tetap
Penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan yang memadai	Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga kependidikan D3 Keperawatan berstatus pegawai tetap
Penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pengajar D3 Keperawatan	Pembangunan rumah dinas dilakukan di dekat lokasi D3 Keperawatan dan diprioritaskan bagi tenaga pengajar D3 Keperawatan yang belum/ tidak memiliki rumah di tempat bertugas
Peningkatan kualitas tenaga pengajar D3 Keperawatan	Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga pengajar yang berpendidikan minimal S1
	Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga pengajar yang memiliki Sertifikat PEKERTI dan Akta IV
Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Belajar	Memfokuskan pada penyediaan sarana prasarana dasar penunjang belajar semisal ruang kelas dan laboratorium
Perubahan status dari Program Khusus menjadi Program Studi (Prodi) D3 Keperawatan	Fokus pada inisiasi kerjasama dengan Poltekkes Jayapura untuk memperoleh perubahan status menjadi Program Studi (Prodi) D3 Keperawatan
Peningkatan kualitas lulusan D3 Keperawatan	Fokus pada peningkatan persentase Lulusan D3 Keperawatan yang Lulus Uji Kompetensi

6.3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Pemerintahan

Persoalan utama yang menghambat pembangunan daerah di Papua pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Puncak Jaya adalah persoalan infrastruktur dan aparatur. Infrastruktur merupakan aspek utama yang harus diperbaiki agar pembangunan dan sistem pemerintahan dapat berjalan baik. Sementara, sebagai penggerak sistem pemerintahan adalah aparatur pemerintah. Apabila kuantitas dan kualitas kinerja aparatur masih kurang baik, maka pembangunan dan pewujudan *good governance* akan terhambat.

Sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya akan melakukan beberapa strategi dan arah kebijakan seperti dijabarkan dalam table berikut:

Tabel 6.3.
Misi 3: Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur Serta
Akuntabilitas Pemerintahan

Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan kerjasama khusus dengan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tugas belajar	Perguruan Tinggi yang memiliki prodi yang relevan dan tergantung dengan hasil pemetaan kebutuhan
Pengiriman dan fasilitasi bagi PNS untuk tugas belajar di perguruan tinggi baik untuk pendidikan diploma, sarjana, maupun pascasarjana	Pengiriman PNS yang belum memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan untuk tugas belajar
Penyediaan mekanisme pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bagian Perijinan, Puskesmas, Perijinan
Kontrak dan insentif kinerja	Semua SKPD dan Setda
Pengelolaan arsip data dan informasi	Bidang perijinan dan administrasi keuangan
Penyediaan website	Pemerintah Kabupaten
Penyediaan sistem informasi	Bidang Perencanaan dan pengendalian, bidang pengelolaan aset, bidang <i>e-government</i> , dan TU
Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran	Fokus pada Setda dan semua SKPD
Optimalisasi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah kabupaten	46 instansi pemerintah
Peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan mengenai korupsi dan transparansi keuangan	46 instansi pemerintah
Penguatan fungsi legislatif	Di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran
Peningkatan fungsi representasi	Sekretariat DPRD dan humas DPRD

6.4. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan ekonomi yang terarah sesuai kebutuhan setempat. Berdasarkan pemetaan potensi daerah di bab sebelumnya, masyarakat Puncak Jaya merupakan masyarakat yang ditopang oleh aktivitas pertanian. Kondisi mata pencaharian tersebut sekaligus bisa menjelaskan potensi ekonomi masyarakat Puncak Jaya yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian, halnya kasus di Indonesia, merupakan sektor yang seringkali menghadapi tantangan baik dari sisi support produktivitas ekonomi dan kebutuhan untuk merawat kedaulatan pangan.

Dari rumusan tujuan tersebut, diperlukan sebuah strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk mencapai produktivitas ekonomi masyarakat Puncak Jaya berbasis potensi lokal yang diuraikan dalam table berikut:

Tabel 6.4.
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Strategi	Arah Kebijakan
Penguatan iklim berwirausaha dan potensi perdagangan	Identifikasi potensi ekonomi
	Pelatihan wirausaha (enterpreneur) dan bimbingan manajemen dan pemasaran
	Pengembangan Unit usaha masyarakat (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
	Pengembangan Lembaga keuangan mikro tingkat distrik untuk meningkatkan aksesibilitas permodalan masyarakat
	Pengembangan pasar tradisional sebagai tempat pemasaran produk-produk lokal. Adapun pembangunan pasar dapat diprioritaskan di distrik Mewoluk, Nume, Kalome, Fawi, Wonwi dan Lumo
Pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja	Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan pengelolaan usaha kepada warga lokal
	Pemberian dukungan usaha: kredit modal usaha, bantuan peralatan, bantuan bibit, bantuan pemasaran dan bimbingan dan penyuluhan usaha
Peningkatan produktivitas potensi pertanian	Penyiapan sumberdaya manusia di bidang pertanian melalui pelatihan dan penyuluhan
	Pengenalan dan bantuan sekaligus pendampingan penggunaan teknologi tepat guna untuk pengembangan pertanian
	Penguatan sistem ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai
	Pemasaran dan distribusi hasil pertanian
	Pengembangan sistem ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian
	Pendampingan dan penyuluhan kegiatan pertanian yang produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan produksi perkebunan	Penyiapan sumberdaya manusia di bidang perkebunan melalui pelatihan dan penyuluhan
	Pengenalan dan bantuan sekaligus pendampingan penggunaan teknologi tepat guna untuk pengembangan perkebunan
	Pemasaran dan distribusi hasil perkebunan
	Pengembangan sistem ekstensifikasi dan intensifikasi lahan perkebunan
	Pendampingan dan penyuluhan kegiatan perkebunan yang produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan petani kebun
Peningkatan produksi peternakan	Pengembangan budidaya peternakan
	Pendampingan dan penyuluhan kegiatan peternakan
Peningkatan produksi perikanan	Pendampingan dan penyuluhan tentang produktivitas perikanan
	Pengembangan produksi perikanan melalui pelatihan dan bimbingan pemasaran
Pengembangan daerah wisata	Identifikasi potensi pariwisata
	Pengembangan obyek wisata potensial dan strategis
Pengembangan industri kreatif rakyat	Kelompok Industri Kecil Menengah di Puncak Jaya
Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten	Distrik yang rawan pangan
Penguatan kesadaran membayar pajak	Wajib pajak di tiap distrik

6.5. Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

Pembangunan sosial merupakan upaya kolektif yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sasaran utama pelayanan pembangunan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan sosial masyarakatnya. Di Kabupaten Puncak Jaya, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum ditangani secara penuh oleh pemerintah karena peran tersebut masih menjadi tanggung jawab keluarga besar terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Persoalan lain adalah masyarakat Kabupaten Puncak Jaya yang majemuk berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial, terutama antara penduduk asli dan pendatang sehingga dibutuhkan upaya untuk mendorong kerukunan hidup bermasyarakat.

Dalam rangka memperkuat harmonisasi pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya, diperlukan strategi yang dapat meningkatkan pembangunan sosial dan kerukunan hidup bermasyarakat. Strategi utama dalam meningkatkan pembangunan sosial dan kerukunan hidup bermasyarakat diuraikan dalam table berikut:

Tabel 6.5.
Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan
Hidup Bermasyarakat

Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan <i>database</i> Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pembuatan database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Penyediaan pekerja sosial	Penyediaan pekerja sosial yang berimbang berdasarkan gender
Peningkatan kualitas SDM pekerja sosial melalui pendidikan non gelar	Pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan pendampingan bagi pekerja sosial
Peningkatan kualitas SDM pekerja sosial melalui pendidikan bergelar	Penyediaan beasiswa S1 untuk pendamping PMKS
	Penyediaan beasiswa D3 untuk pendamping PMKS
Penyusunan SOP penanganan korban bencana alam pada saat tanggap darurat	Pengkoordinasian lintas SKPD dalam penanganan korban bencana alam. Kegiatan siaga bencana misal dapat diprioritaskan di distrik Silamburawi
Penyusunan SOP penanganan korban bencana sosial	Pengkoordinasian lintas SKPD dalam penanganan korban bencana sosial
	Pembangunan pos-pos keamanan di distrik-distrik tertentu seperti Kalome, Yamoneri, Tingginambut dan Silamburawi
Pengembangan kerjasama dengan organisasi/yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial luar panti	Kerjasama dengan organisasi/yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial luar panti.
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial bagi lanjut usia	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sosial bagi lanjut usia
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial bagi penyandang cacat	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sosial bagi penyandang cacat

Strategi	Arah Kebijakan
Pemberian santunan kepada Rumah tangga miskin dan korban konflik sosial	Pemberian santunan berupa uang kepada korban konflik sosial
Pendataan penduduk miskin di seluruh distrik	Fokus pada Rumah Tangga miskin
Pembangunan rumah sosial dan infrastruktur bagi KAT	Pengalokasian anggaran untuk pembangunan sosial dan infrastruktur bagi KAT
Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Berwirausaha	Fokus pada peningkatan keterampilan wirausaha perempuan melalui 5 kelompok pemberdayaan perempuan
Penyerasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Fokus pada sinkronisasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perempuan dan anak
Penguatan Kelembagaan PUGA (Pengarusutamaan Gender dan Anak)	Fokus pada aktivitas yang bermuatan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	Fokus pada kelompok masyarakat berdasarkan distrik
Promosi Kesehatan Ibu dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat	Memprioritaskan pada kegiatan sosialisasi kesehatan ibu dan anak di masyarakat
Pembinaan Keluarga Sejahtera	Kelompok masyarakat berdasarkan distrik
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberdayaan Perempuan	Fokus pada pengadaan fasilitas sarana prasarana (TI, gedung, kendaraan) di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Penyediaan data kependudukan yang diperbarui	Data kependudukan yang perlu diperbarui
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Distrik yang rawan terhadap gangguan keamanan
Sosialisasi peraturan daerah	Perda strategis yang tidak dipatuhi

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan akan diturunkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Lebih detail tentang arah kebijakan dan program pembangunan daerah akan dijelaskan pada bab selanjutnya.



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Puncak Jaya akan dipaparkan di dalam Bab VII ini. Bagian ini akan lebih jelas memberikan rincian mulai dari tujuan pembangunan, sasaran yang akan dicapai, indikator capaian kinerja sampai pada SKPD yang bertanggung jawab atas setiap program pembangunan.

Bab VII akan merinci program-program pembangunan sesuai misi RPJMD Puncak Jaya. Kelima misi RPJMD Puncak Jaya yaitu bidang (i) infrastruktur dasar, (ii) pendidikan dan kesehatan, (iii) aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan, (iv) produktivitas ekonomi serta (v) pembangunan sosial dan kerukunan hidup bermasyarakat.

7.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pada tahap pembangunan jangka menengah pertama 2013-2017 ini pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur dasar yang terdiri dari infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi, dan infrastruktur pemukiman dengan program prioritas sebagai berikut:

7.1.1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi. *Dengan Prioritas pembangunan sebagai berikut:*

1. Program pemeliharaan/rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan
2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Program Pembangunan dan Pengembangan Bandara
4. Program peningkatan angkutan sungai

7.1.2. Pengembangan Infrastruktur Energi. *Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:*

1. Program pembangunan infrastruktur bidang ketenagalistrikan

7.1.3. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi. *Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:*

1. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

7.1.4. Pengembangan Infrastruktur Pemukiman. *Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:*

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Tabel 7.1. menggambarkan rincian program prioritas beserta SKPD yang bertanggungjawab sebagai pelaksananya.

**Tabel 7.1. Kebijakan Umum & Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar
Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana perhubungan darat	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan yang sudah ada	Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda empat	145.72 KM	185.72KM	Program pemeliharaan/ rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	PU
	Tersedianya jaringan jalan antar distrik	Jumlah distrik yang terhubung	6 Distrik	17 Distrik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PU
	Tersedianya jaringan jalan antar kampung	Jumlah/persentase kampung yang terhubung dengan jalan distrik	58 Kampung	98 Kampung			
	Tersedianya moda transportasi darat	Jumlah distrik yang bisa diakses dengan kendaraan roda empat	5 (Yamo, Tingginambut, Mulia, Ilu, Jigonikme)	6 (Yamo, Tingginambut, Mulia, Ilu, Jigonikme, Mewoluk)			
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan udara	Meningkatnya kapasitas bandara Mulia	Luas Bangunan Bandara Mulia	N/A	N/A	Program Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan/ PU
		Frekuensi penerbangan	912	1400			
		Kapasitas Penumpang Bandara Per tahun	8.028 penumpang	30.000 penumpang			
	Terbangunnya bandara perintis	Kapasitas kargo pertahun	330.580 kg	1.000.000 kg		Pekerjaan Umum	PU
		Frekuensi penerbangan	N/A	N/A			
		Jumlah distrik yang bisa diakses dengan pesawat perintis	4 (Fawi, Torere, Mewoluk)	4			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan perhubungan sungai	Meningkatnya arus lalu lintas perhubungan sungai	jumlah perahu tersedia	3	9	Program peningkatan angkutan sungai	Pekerjaan Umum	Perhubungan
		jumlah tambatan yang terbangun	1 (Fawi)	4 (2 Fawi, 1 Dagai, 1 Torere)			
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur bidang energi	Berfungsinya fasilitas pembangkit listrik dan jaringan kelistrikan	Jumlah jaringan listrik yang berfungsi	4	11	Program pembangunan infrastruktur bidang ketenagalistrikan	Pekerjaan Umum	PU
		Jumlah Pembangkit Listrik Mikrohidro	5	11		Pekerjaan Umum/Perumahan	PU
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	20%	40%			
		Persentase unit pelayanan pemerintah yang teraliri listrik	75%	100%			
Meningkatnya ketersediaan dokumen induk pembangunan	Tersedianya Masterplan Pembangunan Daerah	Jumlah masterplan tersusun	0	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	PU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya sarana komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	2	8	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informatika	Setda
		Jumlah BTS seluler	1	5			
		Jumlah warpostel	2 Ilu dan Fawi)	Ilu, Fawi, Yamo, Mewoluk, Torere, Jigonikme, Tingginambut (7)			
	Meningkatnya jangkauan komunikasi	Berfungsinya Stasiun Radio Daerah/ Peningkatan Frekuensi	1 FM	1 FM dan 1 MW			
		Jumlah/persentase distrik yang memiliki SSB efektif	4 (Ilu, Fawi, Torere, Mulia)	11 (Ilu, Fawi, Torere, Mulia, Mewoluk, Yamo, Tingginambut, Jigonikme, Dagai, Kiyage, Yambi)			
	Meningkatnya sarana dan jangkauan jaringan internet	Jumlah peranti internet	2	6			
		Jumlah fasilitas publik terpasang internet	2	10		Komunikasi dan Informatika	Setda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Mengembangkan infrastruktur pemukiman sederhana yang sehat	Tersedianya kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana	Jumlah pemukiman dalam keadaan baik	30	50	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinsosnaker
		Debit sumber air bersih	2.5 l/s	2.5 l/s			
	Berfungsinya sistem dan jaringan air bersih di setiap kampung	Jumlah jaringan air bersih terbangun	8	14	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pekerjaan Umum/ Perumahan	PU
		Daya tampung reservoir terbangun	450	750			
		Jumlah sarana penampungan air bersih	9	15			
		Tersedianya Peta Lokasi	0	1			
	Tersedianya sistem sanitasi dan pengolahan limbah	Tersedianya Perda	0	1		Pekerjaan Umum	PU
		Tersedianya desain pengembangan sistem sanitasi	0	1			
		Panjang saluran sanitasi	N/A	N/A		Lingkungan Hidup	PU
		jumlah MCK di setiap kampung	15	30			
		Tersedianya septictank	500 buah	1000 buah		Lingkungan Hidup	PU
		Tersedianya desain pengelolaan limbah	0	1			
		Tersedianya TPA	0	1			
		Tersedianya jalur pengambilan sampah	0	1			

7.2. Percepatan Pembangunan dalam Bidang Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Bagian ini akan merinci pogram-program pembangunan dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam upaya nya untuk meningkatkan pelayanan dasar. Outcome yang harus terwujud adalah naiknya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Puncak yang ditandai dengan kenaikan angka APM, APK, derajat kesehatan dan IPM. Program-program tersebut meliputi:

7.2.1. Peningkatan ketersediaan pelayanan pendidikan dasar

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2. Program Distribusi Guru
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7.2.2. *Peningkatan ketersediaan pelayanan pendidikan menengah*

1. Program Pengembangan SDM Kependidikan

7.2.3. *Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan*

1. Program Pendidikan Menengah
2. Program beasiswa bagi siswa miskin
3. Program pendidikan non-formal

7.2.4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat

7.2.5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan

1. Program peningkatan kualitas pendidikan
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
5. Program peningkatan media pembelajaran modern

7.2.6. Pengoptimalan operasionalisasi pelayanan kesehatan

1. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya
2. Program pengembangan SDM kesehatan
3. Program Kesejahteraan tenaga kesehatan
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7.2.7. Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah
2. Program pengembangan SDM kesehatan

3. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4. Program Pembangunan Rumah Dinas bagi Tenaga Kesehatan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7.2.8. Peningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

1. Program Pengembangan Puskesmas Keliling
2. Program Pengadaan dan Operasionalisasi Mobil Ambulan
3. Program Pengembangan Kerjasama Pelayanan Kesehatan
4. Program Pengembangan Layanan Puskesmas

7.2.9. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

1. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya
2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7.2.10. Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan

1. Program pengembangan SDM kesehatan
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Berikut adalah tabel yang menjelaskan tujuan perencanaan pembangunan yang sudah diperinci menjadi program-program prioritas sekaligus SKPD penanggungjawabnya.

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan dasar	Tersedianya fasilitas pendidikan dasar di setiap distrik dalam jumlah yang lebih memadai	Jumlah distrik yang memiliki minimal 5 unit sekolah tingkat SD	2	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora
		Jumlah distrik yang memiliki minimal 2 unit sekolah tingkat SMP	1	4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya tenaga pengajar di setiap sekolah dengan jumlah yang memadai	Persentase jumlah SD yang memiliki jumlah guru minimal 6 orang	41%	90%	Program Distribusi Guru	Pendidikan	Disdikpora
		Persentase jumlah SMP yang memiliki jumlah guru sesuai standar minimal	0	20%			Disdikpora
Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan menengah	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase rumah dinas guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP)	17%	21%	Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya fasilitas pendidikan menengah di setiap satuan wilayah pengembangan (SWP)	Rasio jumlah SMA/SMK terhadap jumlah distrik	4:8	8:25	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya tenaga pengajar yang memadai di setiap sekolah	Persentase jumlah SMA yang memiliki jumlah guru sesuai standar minimal	0%	20%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	Tersedianya asrama pelajar tingkat SMA di setiap SWP	Rasio jumlah asrama pelajar terhadap jumlah SMA/SMK	0:4	4:04	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya dan tersalurinya bantuan biaya pendidikan bagi warga tidak mampu	Persentase jumlah siswa tidak mampu di tingkat SD yang menerima bantuan biaya pendidikan	100%	100%	Program beasiswa bagi siswa miskin	Pendidikan	Disdikpora
	Terselenggaranya pendidikan non formal	Jumlah unit layanan pendidikan non-formal yang fungsional	1	2	Program Pendidikan Non-Formal	Pendidikan	Disdikpora
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	Persentase guru yang berkualifikasi sarjana (S1)	37%	100%	Program peningkatan partisipasi masyarakat	Pendidikan	Disdikpora
		Persentase jumlah guru yang memiliki latarbelakang pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang diajar	87,80%	90%		Pendidikan	Disdikpora

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya kompetensi guru	Persentase jumlah guru yang telah bersertifikat pendidik	6,62%	40%	Program peningkatan kualitas pendidikan	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya insentif yang memadai bagi tenaga pengajar	Persentase guru di lokasi terisolasi yang mendapatkan insentif	100%	100%			
	Tersedianya sarana pendukung yang memadai di setiap sekolah	Persentase jumlah kelas yang berkategori baik di tingkat SD	65,63%	80%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora
		Persentase jumlah kelas yang berkategori baik di tingkat SMP	45,45%	70%			
		Persentase jumlah kelas yang berkategori baik di tingkat SMA	55,56%	80%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
		Persentase jumlah SD yang memiliki perpustakaan	5%	15%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Disdikpora
		Persentase jumlah SMP yang memiliki perpustakaan	29%	57%			
		Persentase jumlah SMA yang memiliki perpustakaan	50%	70%			
		Persentase jumlah SD yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	13%	Pengadaan fasilitas komputer dan jaringan internet	Pendidikan	Disdikpora
		Persentase jumlah SMP yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	10%			
		Persentase jumlah SMA yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	13%			
		Persentase jumlah SMP yang memiliki laboratorium yang jumlah dan jenisnya sesuai standar minimal	0%	10%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
		Persentase jumlah SMA yang memiliki laboratorium yang jumlah dan jenisnya sesuai standar minimal	0%	10%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Mengoptimalkan operasionalisasi pelayanan kesehatan	Tersedianya layanan kesehatan yang fungsional	Persentase puskesmas yang fungsional	37,5% (3 dari 8 puskesmas)	100%	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas pembantu (Pustu) yang fungsional	38,8% (7 dari 18 pustu)	100%			
	Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai di setiap Puskesmas dan Pustu	Persentase puskesmas yang memiliki jumlah dokter minimal 2 orang	25%	75%	Program pengembangan SDM kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang memiliki jumlah perawat minimal 4 orang	25%	75%			
		Persentase puskesmas yang memiliki jumlah bidan minimal 3 orang	25%	75%			
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan	Persentase distrik yang memiliki rumah dinas tenaga kesehatan minimal 7 unit	37,50%	100%	Program Kesejahteraan tenaga kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya obat-obatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan	Persentase puskesmas yang menyediakan obat secara memadai	100%	100%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit yang lebih memadai	Jumlah unit pelayanan fungsional di RSUD	12	17 (penambahan 5 unit pelayanan fungsional ICU, IGD, Perawatan Anak, Instalasi Farmasi dan Klinik VCT)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah	Kesehatan	RSUD
		Jenis pelayanan kesehatan spesialis	1 (radiologi)	6 (Spesialis Kandungan, Anak, Penyakit Dalam, Bedah, dan Patologi Klinik)		Kesehatan	RSUD
	Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang lebih memadai di RSUD	Jumlah unit mobil ambulance penjemput pasien gawat darurat di RSUD	1 Unit	4 Unit		Kesehatan	RSUD
		Jumlah dokter umum	4	10	Program pengembangan SDM kesehatan	Kesehatan	RSUD
		Jumlah dokter spesialis	1	8		Kesehatan	RSUD
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan	Jumlah paramedis	77	100	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSUD
		Jumlah unit rumah dinas tenaga kesehatan rumah sakit	17 Unit	30 Unit	Program Pembangunan Rumah Dinas bagi Tenaga Kesehatan	Kesehatan	RSUD
	Tersedianya obat-obatan yang memadai	Jumlah jenis obat yang dibutuhkan di RSUD	300 jenis	500 jenis	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	RSUD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Tersedianya layanan kesehatan keliling dan antar-jemput warga	Persentase puskesmas yang memiliki unit pelayanan keliling darat atau air yang fungsional	50%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya ketersediaan layanan perawatan di tingkat distrik	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan rawat inap	25% (2 dari 8 puskesmas)	63%		Kesehatan	RSUD
	Terselenggaranya kemitraan dengan gereja dalam pengelolaan layanan kesehatan	Persentase puskesmas yang bekerjasama dengan gereja	100%	100%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya kapasitas SDM tenaga kesehatan	Persentase bidan yang memenuhi standar kompetensi dalam penanganan komplikasi kelahiran	0	100%	Program pengembangan SDM kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Persentase dokter yang memiliki keahlian penanganan kegawatdaruratan	0	100%		Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD
	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	5,30%	70%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan ibu pasca melahirkan	13%	75%		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan balita yang mendapatkan imunisasi lengkap	22,50%	80%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rata-rata jumlah kasus balita gizi buruk dan gizi kurang perbulan	74	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan	Tersedianya jumlah tenaga pengajar yang memadai di D3 Keperawatan	Jumlah Tenaga Pendidik berstatus Dosen Tetap	8 orang	15 orang	Program Kemitraan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya jumlah Tenaga Kependidikan yang memadai Meningkatkan kualitas tenaga pengajar D3 Keperawatan	Jumlah Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap	2 orang	5 orang	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pengajar D3 Keperawatan	Jumlah unit rumah dinas	3 kopel 6 pintu	5 kopel 10 pintu	Program Pembangunan Rumah Dinas bagi Tenaga Pengajar D3 Keperawatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas tenaga pengajar D3 Keperawatan	Jumlah tenaga pengajar yang berpendidikan minimal S1	7 orang	24 orang	Program Pemberian Beasiswa	Pendidikan	Dinas Kesehatan
		Jumlah tenaga pengajar yang memiliki Sertifikat PEKERTI dan Akta IV	1 orang	14 orang	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengajar D3 Keperawatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Belajar	Jumlah Ruang Kelas	3 ruang kelas	6 ruang kelas	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laboratorium	1 laboratorium	3 laboratorium		Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Berubahnya status dari Program Khusus menjadi Program Studi (Prodi) D3 Keperawatan	Status menjadi Prodi D3 Keperawatan	Program Khusus D3 Keperawatan	Prodi D3 Keperawatan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas lulusan D3 Keperawatan	Persentase Lulusan yang Lulus Uji Kompetensi	0	100% lulus	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan

7.3. Pembangunan Aparatur Pemerintahan

Kebijakan umum yang direncanakan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan dengan operasionalisasi bertahap. Operasionalisasi tersebut meliputi beberapa strategi dan program prioritas. Sasaran yang harus diwujudkan untuk dapat mencapai misi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan meliputi: Meningkatnya jumlah aparatur yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

7.3.1. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Sasaran ini akan dioperasionalkan ke dalam program-program yang nantinya akan dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur pemerintahan, agar sesuai dengan standar tingkat pendidikan bagi pejabat eselon tertentu.

1. Program pengembangan kapasitas aparatur

7.3.2. Optimalisasi komitmen aparatur

Komitmen aparatur pemerintahan sangat penting ditingkatkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Maka program prioritasnya adalah penyediaan mekanisme kontrak dan insentif kinerja.

1. Program kpeningkatan kinerja aparatur
2. Program peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintahan

7.3.3. Peningkatan kualitas penyediaan data, informasi dan instrumen survei yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Program pembangunan ini meliputi:

1. Program Peningkatan penerapan kearsipan
2. Program Pengembangan data dan informasi
3. Program Pembaruan dan pengelolaan data dan informasi
4. Program penyediaan media komunikasi
5. Program pengembangan sistem informasi manajemen pemerintah

7.3.4. Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran

Untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya perlu Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran. Program-program yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan
2. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

7.3.5. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan di kabupaen Puncak Jaya perlu mendapatkan intervensi yang cukup banyak, terutama

dalah upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan. Program-program yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan pengawasan dan pelaporan
2. Program penguatan kapasitas aparatur
3. Program peningkatan kapasitas representasi (DPRD)

Program-program prioritas untuk mengimplementasikan perencanaan pembangunan di bidang aparatur dan pemerintahan akan dijabarkan dalam tabel 7.3 berikut ini:

7.3. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Aparatur Kabupaten Puncak Jaya 2013 – 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan	MoU dengan PT	N/A	3	Program pengembangan kapasitas aparatur	Kepegawaian	BKD
		Jumlah PNS Diploma	216	226		Kepegawaian	BKD
		Jumlah PNS S1	453	468		Kepegawaian	BKD
		Jumlah PNS S2	16	26		Kepegawaian	BKD
	Meningkatnya keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugasnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	80%	Program peningkatan kinerja aparatur	kesekretariatan Daerah	Setda
		Jumlah PNS yang dikirim pelatihan dan bintek	N/A	88 (4 orang per SKPD)		Kearsipan dan data	Setda
Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan	Optimalnya Komitmen Aparatur	Kontrak dan insentif kinerja	N/A	Ada	Program Peningkatan penerapan kearsipan data dan informasi	Kepegawaian	BKD
		Persentase kehadiran pegawai per bulan	N/A	100%		Kepegawaian	BKD
		Menurunnya persentase pelanggaran disiplin	N/A	0%		Kepegawaian	BKD
		Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	N/A	100%		Kearsipan dan data	Setda
	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data, Informasi dan Instrumen Survei yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Bank data dan informasi	N/A	ada	Program Pembaruan dan pengelolaan data dan informasi	Data dan informasi	Bappeda
		Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada		Litbang	Bappeda
		Website	1	3		Komunikasi dan informasi	Setda
		Periode update website	Tidak terupdate	Terupdate sebulan sekali		Komunikasi dan informasi	Setda
		Sistem Informasi	5	9	Program pengembangan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	Komunikasi dan informatika	Setda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Renja	N/A	24	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	Perencanaan	Bappeda
		Dokumen Renstra	N/A	24			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	Belum ada	ada	Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	Perencanaan	Bappeda
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Belum ada	ada		Perencanaan	Bappeda
		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Belum ada	Ada		Perencanaan	Bappeda
		Nilai /status audit dokumen	Disclaimer	WTP		Pelaporan	Bappeda
	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD	PKPT dan monitoring ke 46 instansi pemerintah	N/A	26 distrik, 22 SKPD	Program Peningkatan Pengawasan dan Pelaporan	Pengawasan	Inspektorat
		Frekuensi kegiatan penguatan kapasitas anggota DPRD	0	3 (legislasi, penganggaran dan pengawasan)	Program pengembangan kapasitas aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	Sekretariat DPRD
		Persentase perda yang disahkan tepat waktu	0%	100%		Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
		Mekanisme komplain masyarakat	0	1			
	Meningkatnya kualitas representasi	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat (jaring asmara)	0	5 (satu tahun sekali)	Program peningkatan kapasitas representasi (DPRD)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD

7.4. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Keselarasan pembangunan ekonomi dalam perencanaan secara umum ditujukan untuk meningkatkan produktivitas warga setempat untuk mengatasi tantangan dengan mengelola potensi yang ada. Sektor ekonomi merupakan komponen vital yang wajib dihadirkan dalam RPJMD guna mencapai beberapa tujuan yaitu, pertama, menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan produktivitas ekonomi sesuai potensi lokal. Ketiga, menciptakan nilai tambah ekonomi bagi produk lokal.

Untuk mendukung keselarasan pembangunan, sektor ekonomi ditujukan dalam beberapa sasaran pembangunan dan strategi kebijakan yang telah tersebutkan pada bab sebelumnya. Sedangkan pemaparan kebijakan umum direpresentasikan dalam tiga kebijakan yaitu:

7.4.1. Peningkatan iklim usaha dan perdagangan

Melalui kebijakan umum tersebut, program indikatif dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan iklim usaha
2. Program penguatan kapasitas pelaku usaha
3. Program Pembangunan unit usaha masyarakat
4. Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
5. Program Pengembangan pasar tradisional

7.4.2. Pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja

Turunan kebijakan umum tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang prioritas, yakni:

1. Pemberdayaan kelompok ekonomi warga asli

7.4.3. Peningkatan produktivitas potensi pertanian

Untuk memastikan proses pengembangan industri lokal bisa dilaksanakan secara efektif, program prioritas terperinci sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pertanian untuk warga
2. Program fasilitasi pemasaran hasil produksi
3. Program ekstensifikasi lahan pertanian
4. Program peningkatan pendapatan petani

7.4.4. Peningkatan produktivitas perkebunan

Untuk memastikan proses pengembangan industri lokal berbasis potensi perkebunan bisa dilaksanakan secara efektif, dirumuskanlah sejumlah program prioritas yang terperinci sebagai berikut:

1. Program peningkatan produktivitas perkebunan
2. Program pengenalan dan pendampingan teknologi tepat guna
3. Program fasilitasi pemasaran hasil produksi

4. Program ekstensifikasi lahan perkebunan
5. Program peningkatan pendapatan petani

7.4.5. Peningkatan produktivitas peternakan

Untuk memastikan proses pengembangan industri lokal berbasis potensi peternakan bisa dilaksanakan secara efektif, dirumuskanlah program prioritas di bawah ini:

1. Program pengenalan dan pendampingan budidaya ternak potensial

7.4.6. Peningkatan produktivitas perikanan

Untuk memastikan proses pengembangan industri lokal berbasis potensi perikanan bisa dilaksanakan secara efektif, dirumuskanlah program prioritas di bawah ini:

1. Program pengembangan budidaya perikanan

7.4.7. Pengembangan daerah wisata

Untuk memastikan proses pengembangan industri lokal berbasis potensi pariwisata bisa dilaksanakan secara efektif, dirumuskanlah program prioritas di bawah ini:

1. Program pengembangan potensi pariwisata

7.4.8. Pengembangan industri kreatif

Untuk memastikan proses pengembangan industri lokal

berbasis potensi industri kreatif bisa dilaksanakan secara efektif, dirumuskanlah program prioritas di bawah ini:

1. Program pengembangan industri kreatif
2. Program peningkatan kapasitas pemasaran

7.4.9. Penguatan ketahanan pangan kabupaten

Untuk memastikan ketahanan pangan di Kabupaten Puncak Jaya dapat dilakukan secara efektif, dirumuskanlah program prioritas di bawah ini:

1. Program peningkatan ketahanan pangan

7.4.10. Penguatan kesadaran membayar pajak

Untuk memastikan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya memiliki kesadaran yang cukup dalam membayar pajak, dirumuskanlah program prioritas di bawah ini:

1. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya akan diprioritaskan dalam program-program yang dijelaskan dalam tabel 7.4 berikut:

**Tabel 7.4. Kebijakan Umum & Program Prioritas Pembangunan Ekonomi Kabupaten Puncak
Jaya 2013-2017**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan iklim usaha dan perdagangan	Menguatnya iklim berwirausaha dan potensi perdagangan	Peta potensi ekonomi tiap distrik	4 dari 26 distrik	13 dari 26 distrik	Program pengembangan iklim usaha	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
		Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan dan bimbingan usaha	10 % dari 525 = 52 pelaku usaha	50 % dari 525 = 160 pelaku usaha	Program pengembangan kapasitas pelaku usaha	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
		Jumlah unit usaha masyarakat yang berfungsi baik	90 % dari 525 = 468	100 % dari 525 = 525	Pengembangan unit usaha masyarakat	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
		Jumlah lembaga keuangan mikro yang berfungsi baik dan efektif	100 % dari 1 = 1	100 % dari 1 = 1	Program pengembangan lembaga keuangan mikro	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
		Jumlah pasar tradisional yang berfungsi sebagai media pemasaran yang memadai	25 % dari 26 = 6 pasar tradisional	100 % dari 26 = 26 pasar tradisional	Program pengembangan pasar tradisional	Koperasi dan UKM	Kantor PPKB
	Meratanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja	Jumlah lapangan kerja bagi penduduk asli Papua	3% dari 110 ribu penduduk = 3.300	7% dari 110 ribu penduduk = 7.700	Program Pemberdayaan kelompok ekonomi warga asli	Ketenagakerjaan	BPMK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan produktivitas ekonomi sesuai potensi lokal	Meningkatnya produktivitas pertanian	Tingkat produktivitas pertanian	11 kw/ha	50 kw/ha	Program pemberdayaan pertanian untuk warga	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Frekuensi pengenalan dan pemberian bantuan	1 x untuk 6 kelompok di 1 distrik	1 x untuk 102 kelompok di 17 Distrik		pertanian	
		Frekuensi pendampingan penggunaan teknologi tepat guna	1 x untuk 6 kelompok di 1 distrik	1 x untuk 102 kelompok di 17 Distrik		pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Sirkulasi pemasaran hasil produksi pertanian	40 % dari kapasitas produksi	60 % dari kapasitas produksi	Program fasilitasi pemasaran hasil produksi	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
		luas lahan ekstensifikasi	110 Ha	150 Ha	Program ekstensifikasi lahan pertanian	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan/ Ketahanan Pangan
	Meningkatnya produktivitas perkebunan	Cakupan pendampingan dan penyuluhan	26 % kel tani di 7 distrik	65 % kel tani di 17 distrik	Program Peningkatan Pendapatan Petani	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Tingkat produktivitas perkebunan	7 kw/ha	9 kw/ha	Program Peningkatan produktivitas Perkebunan	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		Frekuensi pendampingan penggunaan teknologi tepat guna	7 %	30 %	Program pengenalan dan pendampingan teknologi tepat guna	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		Sirkulasi pemasaran hasil produksi perkebunan	18 % kapasitas produksi	62 % kapasitas produksi	Program fasilitasi pemasaran hasil produksi	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		Luas lahan perkebunan	215 Ha	280 Ha	Program ekstensifikasi lahan perkebunan	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		Cakupan pendampingan dan penyuluhan	60 % petani kopi	100 % petani kopi	Program Peningkatan Pendapatan Petani	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Meningkatnya produktivitas potensi peternakan	Produktivitas peternakan meningkat	20 %	80 %	Program pengenalan dan pendampingan budidaya ternak potensial	peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Terselenggaranya peternakan produktif	0 % peternak	80 % peternak		peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Berkembangnya budi daya perikanan	Tercapainya produktivitas perikanan	40 %	80 %	Program pengembangan budidaya perikanan	perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Cakupan pemasaran produk perikanan yang luas	40 % dari kapasitas produksi	100 % dari kapasitas produksi		perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Berkembangnya daerah tujuan wisata	Adanya peta potensi pariwisata	1	1	Pengembangan potensi pariwisata	Pariwisata	Disbudpar
		Jumlah obyek, jenis atau destinasi wisata yang dikembangkan	15	15		Pariwisata	Disbudpar
		Jumlah kunjungan wisatawan	0	250			
	Berkembangnya industri kreatif rakyat	Jumlah industri kreatif	18 industri kreatif	28 industri kreatif	Pengembangan industri kreatif	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
Menguatnya Ketahanan Pangan	Tersedianya Peta Data Kerawanan Pangan	Tingkat daya saing produk lokal	0 kali	5 kali	Peningkatan kapasitas pemasaran	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
		Cakupan penjualan meluas	10% dari kapasitas produksi	15 % dari kapasitas produksi		Pertdagangan	Diskoperindag
	Menguatnya kesadaran kewajiban membayar pajak daerah	Adanya Peta Data Kerawanan Pangan	0	1	Program peningkatan ketahanan pangan	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan
		Peta potensi wajib pajak di setiap distrik	0	100%	Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak	Perpajakan	Dispenda

7.5. Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

Prioritas program pembangunan yang terangkum dalam misi Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat difokuskan pada upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, mendorong pemberdayaan sosial, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan masyarakat yang inklusif. Pemaparan kebijakan umum direpresentasikan dalam lima kebijakan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial
3. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
4. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan masyarakat yang inklusif

Masing-masing kebijakan tersebut diturunkan dalam program-program berikut:

7.5.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

1. Program Pengembangan Data Based Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Program Peningkatan SDM Pekerja Sosial
3. Program pengembangan tata kelola penanganan masalah kesejahteraan sosial

7.5.2. Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial

1. Program Rehabilitasi Sosial

7.5.3. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial

2. Program Penyusunan Tata Kelola Penanganan Korban Bencana Sosial
3. Program Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Alam
4. Program Penyusunan Tata Kelola Penanganan Korban Bencana Alam

7.5.4. Peningkatan penanggulangan kemiskinan

1. Program Penanggulangan Kemiskinan

7.5.5. Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan

1. Program Pemberdayaan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUGA)
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak
5. Program Pembinaan Keluarga Sejahtera

7.5.6. Peningkatan ketersediaan data kependudukan sebagai basis pengambilan kebijakan

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

7.5.7. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat
2. Program Penegakan Peraturan Daerah

7.5.8. Peningkatan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

1. Program Penyuluhan Hukum
2. Program Peningkatan SDM Pekerja Sosial

Dalam tabel 7.5 akan dijabarkan program-program prioritas pembangunan untuk melaksanakan misi pengembangan pembangunan sosial Kabupaten Puncak Jaya. Program-program prioritas, indikator capaian, dan SKPD yang bertanggung jawab.

**Tabel 7.5. Kebijakan Umum Pengembangan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup
Bermasyarakat Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Tersedianya <i>database</i> perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial	<i>Database</i> perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I)	0	1	Program Pengembangan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertem
	Tersedianya pekerja sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah pekerja sosial	872	NA	Program Peningkatan SDM Pekerja Sosial	Sosial	Dinsosnakertem
		Jumlah pendamping PMKS penerima beasiswa S1	0	10 (tiap tahun 2 orang)			
		Jumlah pendamping PMKS penerima beasiswa D3	0	10 (tiap tahun 2 orang)			
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Terbentuknya mekanisme koordinasi penanganan masalah kesejahteraan sosial	SOP penanganan masalah kesejahteraan sosial	0	1	Program Pengembangan tata kelola Penanganan Masalah	Sosial	Dinsosnakertem
		Jumlah fasilitas sosial bagi penyandang cacat	0	1		Sosial	Dinsosnakertem
	Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial	Jumlah fasilitas sosial bagi lansia	0	1	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinsosnakertem
		Jumlah kerjasama dengan organisasi/ yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial luar panti	0	2		Sosial	Dinsosnakertem

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Tersedianya bantuan sosial bagi korban bencana sosial	SOP Penanganan Bencana Sosial	0	1	Program Penyusunan tata kelola Penanganan Korban Bencana Sosial	Sosial	Dinsosnakerpem
		Jumlah pos keamanan	0	4		Sosial	Dinsosnakerpem
		Skema santunan bagi korban konflik sosial	0	1		Sosial	Dinsosnakerpem
		Peta kawasan rawan bencana alam	0	1	Program Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Alam	Sosial	BPBD
		Cakupan daerah bencana yang mendapatkan bantuan	0	75% dari keseluruhan daerah rawan bencana	Program Penyusunan tata kelola penanganan korban bencana sosial	Sosial	BPBD
		Cakupan jalur evakuasi	0	1		Sosial	BPBD
Meningkatkan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya data penduduk dan rumah tangga miskin	Database penduduk dan Rumah Tangga miskin	0	1	Program Penanggulangan Kemiskinan	Sosial	Dinsosnakerpem
	Tersedianya mekanisme penanggulangan kemiskinan	Cakupan rumah tangga miskin dan KAT yang mendapatkan bantuan	3960 KK	10000 KK		Sosial	Dinsosnakerpem

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Menopang Perekonomian Keluarga	Jumlah pelatihan wirausaha bagi perempuan	N/A	10	Program pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB dan Disperindakop
	Terwujudnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Jumlah Kebijakan yang diserasikan	N/A	5		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
	Terwujudnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUGA) yang kuat	Jumlah kegiatan	N/A	5	Program Penguatan Kelembagaan PUGA (Pengarusutamaan Gender dan Anak)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Belum ada pengaduan	0	Program perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
	Meningkatnya Promosi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melalui kegiatan di Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi Kesehatan ibu dan Anak (KIA)	N/A	10	Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB dan Dinas Kesehatan
	Meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera	Jumlah keluarga sejahtera	N/A	40%	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemberdayaan Perempuan	Persentase ketersediaan sarana prasarana TI	0	80%	Program Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
		Jumlah Gedung	1 unit	1 unit		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
		Jumlah Kendaraan	1 mobil dinas	1 mobil dinas		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan data kependudukan sebagai basis pengambilan kebijakan	Tersedianya data kependudukan yang selalu diperbarui	Data Kependudukan	N/A	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya stabilitas keamanan masyarakat	Jumlah pos keamanan	N/A	26 (1 untuk masing-masing distrik)	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Satpol PP	Kesbangpol
	Menurunnya jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran perda yang dilakukan masyarakat	N/A	0	Program Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	Satpol PP
Meningkatnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Frekuensi sosialisasi ke masyarakat di semua distrik	N/A	26 (1 untuk masing-masing distrik)	Program penyuluhan Hukum	Kesbangpol	Kesbangpol
	Meningkatnya kesadaran kewarganegaraan masyarakat	Frekuensi penyuluhan P4 dan wawasan kebangsaan di tiap distrik	N/A	26 (1 untuk masing-masing distrik)	Program Peningkatan SDM Pekerja Sosial	Kesbangpol	Kesbangpol

Susunan indikator-indikator dalam Bab VII ini merupakan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang harus dipenuhi pada 5 tahun ke depan. Indikator-indikator tersebut untuk mengukur kinerja pemerintah serta keseriusannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, telah dijabarkan pula program-program prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 5 tahun mendatang berdasarkan lima misi Pemerintah Kabupaten. Dalam Bab VIII, indikator dan program akan lebih diperjelas lagi dalam tahapan per tahun.



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Berikut adalah rencana program berdasarkan jenis urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya pada periode 2013-2017.

8.1. Urusan Wajib

Urusan wajib adalah program-program pembangunan yang harus dilakukan oleh setiap daerah dengan tujuan untuk menyelaraskan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Daerah harus berkomitmen untuk menyelenggarakan program-program yang tercakup di dalam urusan wajib ini, sesuai dengan Peraturan pemerintah.

Analisis kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD sesuai bidang-bidang berikut ini:

1. Pendidikan (Disdikpora)
2. Kesehatan (Dinkes)
3. Lingkungan Hidup (Bappeda)

4. Pekerjaan Umum (Dinas PU, Bappeda)
5. Penataan Ruang (Bappeda&Dinas PU)
6. Perencanaan Pembangunan (Bappeda)
7. Perumahan (Dinas PU & Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemukiman)
8. Kepemudaan & Olah Raga (Disdikpora)
9. Penanaman Modal (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Bappeda)
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
11. Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
12. Ketenagakerjaan (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemukiman)
13. Ketahanan Pangan (Kantor Ketahanan Pangan)
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)
16. Perhubungan (Dinas Perhubungan)
17. Komunikasi dan Informatika (Setda)
18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpolinmas)
19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (Sekretariat Daerah, Inspektorat dan DPPKAD)
 - Sekda
 - Inspektorat

- DPPKAD
 - Dispenda
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kampung (Kantor PMK)
 21. Sosial (Dinsos)
 22. Budaya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
 23. Statistik (Bappeda)

8.2. Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

1. Pertanian (Dinas Pertanian & Perikanan)
2. Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan)
3. Energi dan Sumber Daya Mineral (PU)
4. Pariwisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
5. Industri (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
6. Perdagangan (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)

Tabel 8.1 berikut ini merupakan penjabaran dan penentuan indikator capaian kinerja dari misi pertama RPJMD Puncak Jaya. Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar bidang transportasi, energi, pemukiman dan telekomunikasi, maka telah disusun program-program pembangunan dengan capaian kinerja terperinci seperti dalam tabel berikut:

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Puncak Jaya

MISI 1: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP					
Program pemeliharaan/ rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda 4	145,72 km	8 km		8 km		8 km		8 km		8 km		185,72 km	PU	
	Jumlah distrik yang terhubung	6	2		2		2		2		3		17		
Program Pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah kampung yang terhubung dengan jalan distrik	58	8		8		8		8		8		98	PU	
	Jumlah distrik yang bisa diakses dengan kendaraan roda empat	5	0	1		0			0		0		6		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Luas bangunan bandara mulia	N/A											N/A		Dishub, PU
	Frekuensi penerbangan	912	98		100		100		100		100		1400		
	Kapasitas penumpang bandara per tahun	8.028	972		5250		5250		5250		5250		30.000		
	Kapasitas kargo per tahun	330.580 kg	69.420 kg		150.000 kg		150.000 kg		150.000 kg		150.000 kg		1.000.000 kg		
	Frekuensi penerbangan	N/A											N/A		
Program peningkatan angkutan sungai	Jumlah distrik yang bisa diakses dengan pesawat perintis	3 (Fawi, Torere, Mewoluk)	0	0		0		1		0		4		Dishub, PU	
	Jumlah perahu	3	1	1	1	1	1	1	2	9					
	Jumlah tambahan perahu	1 (Fawi)	1	1	1	1	1	1	0	4 (2 Fawi, 1 Dagai, 1 Torere)					
Program pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah jaringan listrik yang berfungsi	4	2	2	2		1		1		0		11		PU
	Jumlah pembangkit listrik mikrohidro	5	2	1	1		1		1		1		11		
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	20%	25%	30%	35%		35%		35%		40%		40%		
	Persentase unit pelayanan pemerintah yang teraliri listrik	75%	80%	80%	85%		90%		95%		100%				

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masterplan pembangunan	0	1	0		0	0			0	0	1		PU	
	Jumlah jaringan komunikasi	2	1	1		1	1			2		8		Setda	
	Jumlah piranti internet	2	1	1		1	1			0		6			
	Fasilitas publik yang terpasangi internet	2	1	1		2	2			2		10			
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berfungsinya stasiun radio daerah/ peningkatan frekuensi	1 FM	1 FM	1 MW								1 FM dan 1 MW			
	Jumlah warpostel	2 (llu dan Fawi)	1	1	1	1	1			1	1	7 (llu, Fawi, Yamo, Mewoluk<Torere, Jagonikme, Tingginambut)			
	Jumlah distrik yang memiliki SSB efektif	4 (llu, Fawi, Torere, Mulia)	1	1	1	1	2			2		11 (llu, Fawi, Torere, Mulia, Mewoluk, yamo, Tingginambut, Jigonikme, Dagai, Kiyage, Yambi)			
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah BTS seluler	1	1	1	1	1				1	1	5			
	Jumlah permukiman dalam keadaan baik	30	4	4	4	4				4		50		PU	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Debit sumber air bersih	2,5 l/s	0	0	0		4 l/s		5 l/s		5 l/s				PU
	Jaringan air bersih terinstalasi	8	1	1		1		1		2		14			
	Daya tampung reservoir terbangun	450	60	60		60		60		60		750			
	Sarana penampungan air bersih	9	1	1		1		1		2		15			
	Peta lokasi konservasi kawasan sumber air bersih	0	0	1		0		0		0		1			
	Perda konservasi air	0	0	1		0		0		0		1			
	Desain pengembangan sistem sanitasi	0	0	1		0		0		0		1			
	Panjang saluran sanitasi	N/A										N/A			
	MCK di setiap kampung	15	3	3		3		3		3		30			
	Jumlah Septic tank	500	100	100		100		100		100		1000			
	Desain pengelolaan limbah	0	0	0		1		0		0		1		PU	
	Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA)	0	1	1		1		1		1		5			

Tabel 8.2 berikut ini merupakan penjabaran dan penentuan indikator capaian kinerja dari misi kedua RPJMD Puncak Jaya. Untuk Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, maka akan dilaksanakan program-program pembangunan dengan capaian kinerja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Puncak Jaya

Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			SKPD Penanggung-jawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	Target		RP
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP					
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Distrik yang memiliki minimal 5 unit sekolah tingkat SD	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6			Disdikpora		
	Jumlah distrik yang memiliki minimal 2 unit sekolah tingkat SMP	1	0	1	1	1	1	1	1	0	4						
Program Distribusi Guru	Persentase jumlah SD yang memiliki jumlah guru minimal 6 orang	41%	45%	50%	60%		75%		80%		100%			Disdikpora			
	Persentase jumlah SMP yang memiliki jumlah guru sesuai standar minimal	0%	15%	30%	40%		50%		60%		70%						
Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase rumah dinas guru dan tenaga kependidikan jenjang SD dan SMP	17%	18%	20%	25%		30%		40%		50%			Disdikpora			

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RP/JMD		SKPD Penanggung jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Pendidikan Menengah	Rasio jumlah SMA / SMK terhadap jumlah distrik	1:2	4:26		5:26		6:26		7:26		8:26		8:26		Disdikpora
	Rasio jumlah asrama pelajar terhadap jumlah SMA / SMK	0:4	1:4		1:3		1:2		1:1		1:1		1:1		
Program pengembangan SDM Kependidikan	Persentase jumlah SMA yang memiliki jumlah guru sesuai standar minimal	0%	5%		10%		15%		20%		20%		20%		Disdikpora
Program beasiswa bagi siswa miskin	Persentase jumlah siswa tidak mampu di tingkat SD yang menerima bantuan biaya pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Disdikpora
Program Pendidikan Non-Formal	Jumlah unit layanan pendidikan non formal yang fungsional	1	0		0		1		0		0		2		Disdikpora
Program peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase guru sarjana S1	37%	37%		52%		67%		84%		100%		100%		Disdikpora
	Persentase jumlah guru yang memiliki kesesuaian latar belakang dengan bidang studi yang diampu	88%	88%		88,9%		89,4%		90%		100%		100%		
Program peningkatan kualitas pendidikan	Persentase jumlah guru bersertifikasi	6,6%	6,6%		15%		20%		30%		35%		40%		Disdikpora
	Persentase guru di lokasi terisolir yang mendapatkan insentif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung- jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase jumlah kelas yang berkondisi baik di tingkat SD	65,63%	70%		70%		80%		80%		80%		80%		Disdikpora
	Persentase jumlah kelas yang berkondisi baik di tingkat SMP	45,45%	50%		55%		60%		65%		70%		70%		
Program Pendidikan Menengah	Persentase jumlah kelas yang berkondisi baik di tingkat SMA	55,6%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		Disdikpora
	Persentase jumlah SD yang memiliki perpustakaan	5%	7%		10%		12%		15%		15%		15%		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah SMP yang memiliki perpustakaan	29%	30%		35%		40%		45%		50%		57%		Disdikpora
	Persentase jumlah SMA yang memiliki perpustakaan	50%	55%		60%		60%		60%		70%		70%		
Program peningkatan media pembelajaran modern	Persentase jumlah SD yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	5%		8%		10%		13%		13%		13%		Disdikpora
	Persentase jumlah SMP yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	0%		2%		5%		8%		10%		10%		
	Persentase jumlah SMA yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	0%		5%		7%		10%		13%		13%		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			SKPD Penanggung-jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
Program Pendidikan Menengah	Persentase jumlah SMP yang memiliki laboratorium sesuai SPM	0%		2%		5%		8%		10%		10%		10%	Disdikpora	
	Persentase jumlah SMA yang memiliki laboratorium sesuai SPM	0%		4%		6%		8%		10%		10%		10%		
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya	Persentase Puskesmas yang fungsional	37,5%		40%		45%		50%		60%		80%		100%	Dinkes	
	Persentase Pustu yang berfungsi	38,8% (7 dari 8 Pustu)		40%		50%		60%		70%		80%		100%		
Program pengembangan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki jumlah dokter minimal 2 orang	25%		30%		40%		50%		60%		75%		75%	Dinkes	
	Persentase Puskesmas yang memiliki jumlah perawat minimal 4 orang	25%		30%		40%		50%		60%		75%		75%		
	Persentase Puskesmas yang memiliki jumlah bidan minimal 3 orang	25%		35%		45%		55%		65%		75%		75%		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RP/JMD		SKPD Penanggung-jawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
Program Kesejahteraan tenaga kesehatan	Persentase distrik yang memiliki rumah dinas tenaga kesehatan minimal 7 unit	37,5%	40%		45%		60%					80%		100%	Dinkes	
	Persentase Puskesmas yang menyediakan obat secara memadai	100%	100%		100%		100%					100%		100%	Dinkes	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah	Jumlah unit pelayanan fungsional di RSUD	12	1		1		1		1		1	1		17	RSUD	
	Jenis pelayanan kesehatan spesialis	1 (radiologi)	1		1		1		1		1			6 (spesialis kandungan, anak, penyakit dalam, bedah dan patologi klinis)		
	Jumlah unit ambulans untuk UGD	1	0		1		0		1		1		0	4		
Program pengembangan SDM kesehatan	Jumlah dokter umum	4	2		1		1		1		1		1	10	RSUD	
	Jumlah dokter spesialis	1	1		1		2		1		1		2	8		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah paramedis	77	7		7		7		6		6		6	100	RSUD	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RP/JMD		SKPD Penanggung-jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Program peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	Jumlah unit rumah dinas tenaga kesehatan RS	17	2	2		3	3			3			30	RSUD	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jenis obat yang disediakan RSUD	300	40	40		40	40			40			500	RSUD	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Persentase Puskesmas yang memiliki unit pelayanan keliling	50%	60%	65%		70%	70%			80%			100%	Dinkes	
	Persentase Puskesmas yang menyediakan rawat inap	25% (2 dari 8 Puskesmas)	25%	25%		50%	50%			100%			100%	Dinkes	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang bekerjasama dengan gereja	100%	100%	100%		100%	100%			100%			100%	Dinkes	
Program peningkatan SDM kesehatan	Persentase bidan yang memenuhi standar kompetensi dalam penanganan kelahiran	0%	15%	30%		50%	75%			80%			100%	RSUD, Dinkes	
	Persentase dokter yang memiliki keahlian penanganan kegawatdaruratan	0%	25%	40%		60%	80%			90%			100%		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis	5,3%	10%	25%		40%		60%		70%		70%		Dinkes	
	Cakupan pelayanan ibu pasca melahirkan	13%	20%	35%		50%		65%		75%		75%			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan balita yang mendapat imunisasi lengkap	22,5%	30%	50%		60%		70%		80%		80%		Dinkes	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rata-rata jumlah kasus balita gizi buruk dan gizi kurang per bulan	74	60	50		40		30		20		20		Dinkes	
Program Kemitraan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dosen tetap di akademi keperawatan	8	2	2		1		1		1		15		Dinkes	
	Jumlah tenaga kependidikan akademi keperawatan yang berstatus pegawai tetap	2	1	1		1		0		0		5			
Program Pembangunan Rumah Dinas bagi Tenaga Pengajar D3 Keperawatan	Jumlah unit rumah dinas	3 kopel 6 pintu	1 kopel 2 pintu	0		1 kopel 2 pintu		0		1 kopel 2 pintu		5 kopel 10 pintu		Dinkes	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RP/JMD			SKPD Penanggung-jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
Program Beasiswa	Jumlah tenaga pengajar minimal S1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Dinkes		
	Jumlah tenaga pengajar minimal S2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10				
Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengajar D3 Keperawatan	Jumlah tenaga pengajar bersertifikat akta IV dan PEKERTI	1	2	3		2	2	3	2			14		Dinkes		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah ruang kelas di akademi keperawatan	3	1	0		1		0		1		6		Dinkes		
	Jumlah laboratorium di akademi keperawatan	1	0	1		0		0		1		3				
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Status jenjang	Program khusus D3 keperawatan	-	-	-			-		-		Prodi D3 keperawatan		Dinkes		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase lulusan yang lulus uji kompetensi	0%	0%	0%		90%		95%		100%		100%		Dinkes		

Tabel 8.3 berikut ini merupakan penjabaran dan penentuan indikator capaian kinerja dari misi ketiga RPJMD Puncak Jaya. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, akan dilaksanakan program-program pembangunan dengan capaian kinerja terperinci seperti dalam tabel berikut:

Tabel 8.3. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Misi 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung- jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pengembangan kapasitas aparatur	MoU dengan PT	NA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3		BKD	
	Jumlah PNS Diploma	216 orang	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	226 orang		BKD	
	Jumlah PNS S1	453 orang	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org	468 orang		BKD		
	Jumlah PNS S2	16 orang	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	26 orang		BKD			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	Ada	50%	50%	60%	60%	70%	80%	80%	80%		Setda		
Program peningkatan kinerja aparatur	Jumlah PNS yang dikirim pelatihan dan bintek	NA	20	17	17	17	17	17	17	17	88 (4 orang per SKPD)		Setda		
	Kontrak dan Insentif Kinerja	Tidak Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		BKD		
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	Persentase pelanggaran kedisiplinan	NA									0%		BKD, Satpol pp		
	Persentase Kehadiran pNS	NA	75%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%				

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung- jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Peningkatan Penerapan Kearsipan	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	NA	75%	80%		100%	100%		100%		100%		100%		Setda
Program Pengembangan data dan informasi	Bank data dan informasi	NA													Bappeda
Program Pembaruan dan pengelolaan data dan informasi	Buku Kabupaten dalam angka	1	1	1		1	1		1		1		1		Bappeda
	Buku PDRB dalam Angka	1	1	1		1	1		1		1		1		Bappeda
Program Penyediaan media komunikasi dan informasi	Website	1	1	1		0	1		1		0		3		Setda
	Periode update website	Tidak terupdate	tiga bulan sekali	tiga bulan sekali		tiga bulan sekali	sebulan sekali		sebulan sekali		sebulan sekali		Terupdate secara periodik (sebulan sekali)		Setda
Program pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah	Sistem Informasi	5	1	1		1	1		1		0		9		Setda
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	Renja dan Renstra														Bappeda

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung- jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Peningkatan indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	Belum ada	1		1		1		1		1		1		Bappeda
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Belum ada	1		1		1		1		1		1		Bappeda
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Belum ada	1		1		1		1		1		1		Bappeda
	Nilai/status audit dokumen	Disclaimer	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Bappeda
Program Peningkatan pengawasan dan pelaporan	PKPT dan monitoring ke 46 instansi pemerintah	NA	10	9	9		9		9		9		46		Inspektorat
	Frekuensi kegiatan penguatan kapasitas anggota DPRD	0	0	1	1	1		1		1		0	3		
Program Penguatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	0%	20%	40%	60%		80%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD
	Mekanisme komplain masyarakat	0	0	1	0	0		0		0		0	1		
Program peningkatan kapasitas representasi	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan penjangran aspirasi masyarakat	0	1	1	1		1		1		1		5		Sekretariat DPRD

Tabel 8.4 berikut ini merupakan penjabaran dan penentuan indikator capaian kinerja dari misi keempat RPJMD Puncak Jaya. Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, maka telah disusun program-program pembangunan dengan capaian kinerja terperinci seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 8.4. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN**

Misi 4: Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengembangan iklim usaha	Peta potensi ekonomi tiap distrik	4 dari 26 distrik	6 dari 26 distrik		8 dari 26 distrik		10 dari 26 distrik		12 dari 26 distrik		13 dari 26 distrik		13 dari 26 distrik		Diskoperindag
Program Pengembangan kapasitas pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan dan bimbingan usaha	10 % dari 525 = 52 pelaku usaha	20 % dari 525 = 104 pelaku usaha		30 % dari 525 = 156 pelaku usaha		40 % dari 525 = 208 pelaku usaha		50 % dari 525 = 260 pelaku usaha		50 % dari 525 = 260 pelaku usaha		50 % dari 525 = 260 pelaku usaha		Diskoperindag
Program Pengembangan Unit usaha masyarakat	Jumlah unit usaha masyarakat yang berfungsi baik	90 % dari 525 = 468											100 % dari 525 = 525		Diskoperindag
Program Pengembangan lembaga keuangan mikro	Jumlah lembaga keuangan mikro yang berfungsi baik dan efektif	1	1		1		1		1		1		6		Diskoperindag
Program Pengembangan pasar tradisional	Jumlah pasar tradisional yang berfungsi sebagai media pemasaran yang memadai	25 % dari 26 = 6 pasar tradisional	4 pasar		4 pasar		4 pasar		4 pasar		4 pasar		100 % dari 26 = 26 pasar tradisional		Kantor PPKB

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pemberdayaan kelompok ekonomi warga asli	Jumlah lapangan kerja bagi penduduk asli Papua	3% dari 110 ribu penduduk= 3.300	4%		5%		5,5%		6%		7%		7% dari 110 ribu penduduk= 7.700		BMPK
Program Pemberdayaan pertanian warga	Tingkat produktivitas pertanian	Padi 35 %	40%		45%		50%		55%		60%		Padi 60 %		Dinas Pertanian dan Perikanan
		Ubi 85 %	88%		91%		94%		97%		100%		Ubi 100 %		
		Palawija 40 %	46%		52%		58%		64%		70%		Palawija 70 %		
Program Pemberdayaan pertanian warga	1) Frekuensi pengenalan dan pemberian bantuan.	1 x untuk 6 kelompok di 1 distrik											1 x untuk 102 kelompok di 17 Distrik		Dinas Pertanian dan Perikanan
	2) Frekuensi pendampingan penggunaan teknologi tepat guna	1 x untuk 6 kelompok di 1 distrik											1 x untuk 102 kelompok di 17 Distrik		
Program fasilitasi pemasaran hasil produksi	Sirkulasi pemasaran hasil produksi pertanian	40 % dari kapasi -tas produk-si	44%		48%		52%		56%		60%		60 % dari kapasi -tas produk-si		Dinas Pertanian dan Perikanan
Program ekstensifikasi lahan pertanian	luas lahan ekstensifikasi pertanian	110 Ha	118 Ha		126 Ha		134 Ha		142 Ha		150 Ha		150 Ha		Dinas Pertanian dan Perikanan/ Ketahanan Pangan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Program peningkatan pendapatan petani	Cakupan pendampingan dan penyuluhan	26 % petani di 7 distrik											65 % petani di 17 distrik		Dinas Pertanian dan Perikanan
Program peningkatan produktivitas perkebunan	Tingkat produktivitas perkebunan	30 %	40%		50%		60%		70%		80%		80 %		Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Program pengenalan dan pendampingan teknologi tepat guna	1) Frekuensi pendampingan penggunaan teknologi tepat guna	7 %	12%		17%		23%		27%		30%		30 %		Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Program fasilitasi pemasaran hasil produksi-	Sirkulasi pemasaran hasil produksi perkebunan	18 % kapasitas produksi	28%		37%		45%		54%		62%		62 % kapasitas produksi		Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Program Ekstensifikasi perkebunan	luas lahan perkebunan	215 Ha	228 Ha		241Ha		254 Ha		267 Ha		280 Ha		280 Ha		Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Program peningkatan pendapatan petani kopi	Cakupan pendampingan dan penyuluhan	60 % petani kopi	68%		76%		84%		92%		100%		100 % petani kopi		Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Program pengenalan dan pendampingan budidaya ternak potensial	produktivitas peternakan	20 %	32%		44%		56%		68%		80%		80 %		Dinas Pertanian dan Perikanan
	peternakan produktif	0 % peternak	16%		32%		48%		64%		80%		80 % peternak		Dinas Pertanian dan Perikanan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pengembangan budidaya perikanan	produktivitas perikanan	40 %	48%		56%		64%		72%		80%		80 %		Dinas Pertanian dan Perikanan
	cakupan pemasaran produk perikanan	40 % dari kapasi -tas produk-si	52%		64%		76%		88%		100%		100 % dari kapasi -tas produk-si		Dinas Pertanian dan Perikanan
	Peta potensi pariwisata	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		Disbudpar	
Pengembangan potensi pariwisata	Jumlah obyek, jenis, atau destinasi wisata yang dikembangkan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		Disbudpar	
	Jumlah kunjungan wisatawan	0	25	50	50	50	50	50	50	75	250				
Pengembangan industri kreatif	Jumlah industri kreatif	18 industri kreatif	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28 industri kreatif		Diskoperindag	
	tingkat daya saing produk lokal	0 kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 kali		Diskoperindag	
Program Peningkatan ketahanan pangan	Peta Kerawanan Pangan Kabupaten	0	0	1		0	0	0	0	0	0	1 peta		Kantor Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan kapasitas pemasaran	cakupan penjualan	10 % dari kapasitas produk-si	11%		12%		13%		14%		15%	15 % dari kapasitas produk-si		Diskoperindag	
Program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Peta potensi wajib pajak di setiap distrik	0%	20%		40%		60%		80%		100%	100%		Dispenda	

Tabel 8.5 berikut ini merupakan penjabaran dan penentuan indikator capaian kinerja dari misi kelima RPJMD Puncak Jaya. Untuk meningkatkan pembangunan sosial dan kerukunan hidup bermasyarakat, maka telah disusun program-program pembangunan dengan capaian kinerja terperinci seperti dalam tabel berikut:

Tabel 8.5. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Misi 5: Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RP/JMD		SKPD Penanggung-jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Pengembangan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Database perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I)	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		Dinsosnakerpem
	Jumlah pekerja sosial	872 orang			872 orang		872 orang		872 orang		872 orang		872 orang		Dinsosnakerpem
Program Peningkatan SDM Pekerja Sosial	Jumlah pendamping PMKS penerima beasiswa S1	0	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	10 orang		Dinsosnakerpem
	Jumlah pendamping PMKS penerima beasiswa D3	0	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	10 orang		Dinsosnakerpem
Program Pengembangan tata kelola Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	SOP penanganan masalah kesejahteraan sosial	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		Dinsosnakerpem
	Jumlah fasilitas sosial bagi penyandang cacat	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		Dinsosnakerpem
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah fasilitas sosial bagi lansia	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		Dinsosnakerpem
	Jumlah kerjasama dengan organisasi/ yayasan /LSM yang menyediakan sarana prasarana	0	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2		Dinsosnakerpem

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung-jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Penyusunan tata kelola Penanganan Korban Bencana Sosial	SOP Penanganan Bencana Sosial	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinsosnakertem	
	Jumlah pos keamanan	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Dinsosnakertem bekerjasama dengan TNI dan POLRI	
	Skema santunan bagi korban konflik sosial	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinsosnakertem	
Program Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Alam	Peta kawasan rawan bencana alam	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	BPBD	
Program penyusunan tata kelola penanganan korban bencana	Cakupan daerah bencana yang mendapatkan bantuan	0	10%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	15%	75% dari keseluruhan daerah rawan bencana	-	-	BPBD	
	Cakupan jalur evakuasi	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	BPBD	
Program Penanggulangan Kemiskinan	Data Kependudukan	N/A	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinsosnakertem	
	Cakupan rumah tangga miskin dan KAT yang mendapatkan bantuan	3.960 KK	540 KK	1.000 KK	1.500 KK	1.500 KK	2.000 KK	2.000 KK	1.000 KK	10.000 KK	10.000 KK	-	-	Dinsosnakertem	
Program pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah pelatihan wirausaha bagi perempuan	N/A	2	2	2	2	2	2	2	2	10	-	-	PPKB dan Disperindagkop	
	Jumlah kebijakan yang diserasikan	N/A	1	2	2	2	-	-	-	-	5	-	-	PPKB	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RP/JMD		SKPD Penanggung-jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP					
Program Penguatan Kelengkapan PUGA (Pengarusutamaan Gender dan Anak)	Jumlah kegiatan PUGA (Pengarusutamaan Gender dan Anak)	N/A	1		1		1				1		5		PPKB
			2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		10 kali untuk tiap distrik per tahun		
Program perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Belum ada pengaduan	2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		10 kali untuk tiap distrik per tahun		PPKB
			2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		2 kali untuk tiap distrik per tahun		10 kali untuk tiap distrik per tahun		
Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah kegiatan sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	N/A	10%		10%		10%		10%		10%		50%		PPKB dan Dinas Kesehatan
			10%		10%		10%		10%		10%		80%		
Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga sejahtera	N/A													PPKB
Program pemberdayaan perempuan	Persentase ketersediaan sarana prasarana TI	0													PPKB
	Jumlah gedung	1 unit	-		-		-		-		-		1 unit		PPKB
		1 mobil dinas	-		-		-		-		-		1 mobil dinas		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kendaraan	N/A													PPKB
	Data Kependudukan	N/A	-		1		-		-		-		1		Disdukcapil
			-		1		-		-		-		1		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		SKPD Penanggung-jawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	RP	
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Jumlah pos keamanan	N/A	5	5	5	5					5	6	26 (1 untuk masing-masing distrik)		Kesbangpol
Program Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah pelanggaran perda yang dilakukan masyarakat	N/A	-	-	-	-					-	-	0		Kesbangpol
Program Penyuluhan Hukum	Frekuensi sosialisasi ke masyarakat di semua distrik	N/A	5	5	5	5					5	6	26 (1 kegiatan per distrik)		Kesbangpol
Program peningkatan SDM	Frekuensi penyuluhan P4 dan wawasan kebangsaan di tiap distrik	N/A	5	5	5	5					5	6	26 (1 kegiatan per distrik)		Kesbangpol



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan rincian rencana program prioritas berdasarkan target per tahun hingga masa akhir periode RPJMD. Bab ini secara khusus akan membahas penetapan indikator kinerja daerah yang berfungsi memberikan gambaran keberhasilan umum daerah dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penetapan indikator kinerja daerah menyertakan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun dalam masa lima tahun RPJMD.

Terdapat tiga aspek indikator yang menjadi komponen penetapan indikator kinerja daerah, yaitu :

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus : Kesejahteraan Masyarakat

Fokus : Seni Budaya dan Olahraga

2) Aspek Pelayanan Umum

Fokus : Pelayanan Urusan Wajib

Fokus : Pelayanan Urusan Pilihan

3) Aspek Daya Saing Daerah

Fokus : Kemampuan Ekonomi

Fokus : Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus : Iklim Berinvestasi

Fokus : Sumber Daya Manusia

Penetapan indikator kinerja daerah tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya**

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Pertumbuhan PDRB	6,74 %	6,77 %	6,80 %	6,95 %	7,01 %	7,10 %	7,10 %
	Laju inflasi di Kabupaten Puncak Jaya	n.a	-	-	-	-	-	-
	PDRB per kapita	6,188 juta	6,235 juta	6,305 juta	6,396 juta	6,514 juta	6,668 juta	6,668 juta
	Pemerataan pendapatan (Indeks Gini)	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19
	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	59,75 %	62,73 %	65,86 %	69,15 %	72,60 %	76,23 %	76,23 %
	Angka kriminalitas yang tertangani	n.a	-	-	-	-	-	-
Fokus: Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf	26,05 %	27,35%	29,26 %	32,18 %	35,00 %	40,01 %	40,01 %
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	6,12 thn	7 thn	8 thn	9 thn	10 thn	12 thn	12 thn
1.3.	Angka partisipasi kasar	SD (40,32%) SMP (45,26%) SMU (23,99%)	SD (43,1%) SMP (48,4%) SMU (25,8%)	SD (46,1%) SMP (51,7%) SMU (27,6%)	SD (49,2%) SMP (55,3%) SMU (29,5%)	SD (54,3%) SMP (60,8%) SMU (32,1%)	SD (60,3%) SMP (66,8%) SMU (35,3%)	SD (60,3%) SMP (66,8%) SMU (35,3%)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	n.a	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Angka Partisipasi Murni								
1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	33,03 %	34,68 %	36,41 %	38,23 %	40,14 %	42,14 %	42,14 %	42,14 %
1.7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	23,31 %	24,47 %	25,69 %	26,97 %	28,31 %	30,01 %	30,01 %	30,01 %
1.8.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/ SMK/MA/Paket C	16,83 %	17,67 %	18,90 %	20,22 %	21,63 %	23,79 %	23,79 %	23,79 %
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	n.a	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Angka usia harapan hidup	67,62 thn	67,90 thn	68,10 thn	68,30 thn	69,25 thn	69,75 thn	69,75 thn	69,75 thn
2.3.	Persentase balita gizi buruk	n.a	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pertanahan								
3.1	Persentase penduduk yang memiliki lahan	n.a	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ketenagakerjaan								
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	0,93	0,94	0,96	0,97	0,98	1,00	1,00	1,00
Fokus: Seni Budaya dan Olahraga.									
1.	Kebudayaan								
1.1.	Jumlah grup kesenian	5 grup	6 grup	7 grup	8 grup	9 grup	10 grup	10 grup	10 grup
1.2.	Jumlah gedung kesenian	24 unit	24 unit	25 unit	26 unit	27 unit	30 unit	30 unit	30 unit

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	6 klub	7 klub	9 klub	12 klub	15 klub	20 klub	20 klub
2.2.	Jumlah gedung olahraga	2 unit	3 unit	4 unit	6 unit	8 unit	10 unit	10 unit
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus: Pelayanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	36,13 %	38,9%	41%	46,23%	55%	65%	75%
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,1.056	0,970	0,820	0,730	0,660	0,660	0,660
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	0,194	0,175	0,155	0,123	0,100	0,80	0,80
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	8,71 %	15,2%	22%	30%	42%	55%	55%
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0,314	0,298	0,266	0,235	0,119	0,100	0,100
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	0,372,67	0,340	0,289	0,230	0,200	0,150	0,150
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	n.a	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	26,05 %	28,65 %	32,08 %	36,89 %	42,42 %	48,78 %	48,78 %

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.	Fasilitas Pendidikan							
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	77,84 %	80,33%	85,10%	89,9%	94,30%	100%	100%
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	77,84 %	84,55%	87,4%	90,425	96,63%	100%	100%
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);							
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,15 %	3,21%	5,34%	7,9%	9,11%	11%	11%
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,63%	0,33%	0,20%	0,11%	0,07%	0%	0%
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,08%	0,07%	0,06%	0,05%	0,03%	0%	0%
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,08%	0,07%	0,06%	0,05%	0,03%	0%	0%
1.6.	Angka Kelulusan:							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	n.a	23%	40%	60%	80%	100%	100%
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	92,75 %	93,2%	95,3%	96,3%	97,2%	100%	100%
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	34,10 %	37,51%	41,26%	47,44%	54,55%	64,21%	64,00%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	n.a	-	-	-	-	-	-
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	0,07	0,10	0,25	0,55	0,75	1,00	1,00
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0	-	-	-	-	-	0,125.000
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,085	0,13	0,20	0,45	0,75	0,90	0,90
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,88	0,90	0,93	0,95	0,96	1,00	1,00
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	10 %	11,5%	13,8%	17,25%	21,56%	26,9%	20%
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80,54 %	86,17%	92,20%	96,82%	96,82%	100%	100%
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	7,62 %	8,11%	9,43%	11,1%	13,24%	15,21%	15%
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	89,9 %	91,22%	93,42%	96,8%	98,2%	100%	100%
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	n.a	-	-	-	-	-	n.a
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,33 %	2,21%	4,33%	6,6%	8,9%	10%	10%
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	27,27 %	29,99%	34,48%	41,37%	51,71%	64,63%	64,63%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)	(9)
(1)	(2)							
2.14.	Cakupan puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	5,96%	7,6%	9,21%	11,43%	14,22%	18%	18%
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	7 %	12%	15%	18%	23%	25,30%	25,30%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	n.a	-	-	-	-	-	n.a
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	1,84 %	2,10%	4,30%	6,9%	8,38%	10,70%	10%
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	12 TPU	12 TPU	13 TPU	14 TPU	15 TPU	17 TPU	17 TPU
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.7.	Rasio rumah layak huni	n.a	-	-	-	-	-	-
3.8.	Rasio permukiman layak huni	n.a	-	-	-	-	-	-
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	145,72 Km	155,20 Km	165,77 Km	175,20 Km	175,80 Km	185,72 Km	185,72 Km
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	80 Km	88 Km	95 Km	100 Km	105 Km	110 Km	110 Km
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	7,03%	10,54%	13,17%	17,12%	22,25%	28,92%	25%
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	n.a	-	-	-	-	-	-

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n.a	-	-	-	-	-	-
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	n.a	-	-	-	-	-	-
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	n.a	-	-	-	-	-	-
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	n.a	-	-	-	-	-	-
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	n.a	-	-	-	-	-	-
3.18.	Lingkungan Pemukiman	n.a	-	-	-	-	-	-
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	15 %	17%	21%	24%	28%	33%	33%
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	20 %	21,37%	26,71%	33,38%	36,72%	40%	40%
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	1,84 %	2,94%	4,88%	7,30%	8,80%	10,60%	10%
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
4.5.	Rumah layak huni	n.a	-	-	-	-	-	-
5.	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	n.a	-	-	-	-	-	-
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	n.a	-	-	-	-	-	-

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n.a	-	-	-	-	-	-
6.	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Belum tersedia	-	-	Tersedia	Tersedia	tersedia	Tersedia
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	tersedia	Tersedia
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Perhubungan							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	29.609 org	31.300 org	33.600 org	35.600 org	38.500 org	41.000 org	41.000 org
7.2.	Rasio ijin trayek	n.a	-	-	-	-	-	-
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	n.a	-	-	-	-	-	-
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	6	7	8	9	10	10
7.5.	Angkutan darat	11,75 %	13,20%	15,20%	18,10%	21%	25%	25%
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	n.a	-	-	-	-	-	-
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	n.a	-	-	-	-	-	-
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	n.a	-	-	-	-	-	-

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu	n.a	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lingkungan Hidup								
8.1.	Persentase penanganan sampah	33,32 %	44,98%	60,72%	81,97%	90,50%	100%	100%	100%
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	23 %	28%	33%	37%	40%	45%	45%	45 %
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	n.a	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	Pencemaran status mutu air	n.a	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	n.a	-	-	-	-	-	-	-
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	n.a	-	-	-	-	-	-	-
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,1 %	1%	3%	5%	7%	10%	10%	10%
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	n.a	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pertanahan								
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	14,23 %	15,20%	16,21%	17,80%	18,90%	20%	20%	20%
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	n.a	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Penyelesaian izin lokasi	n.a	-	-	-	-	-	-	-
10	Kependudukan dan Catatan Sipil								
10.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	55%	57%	67%	78%	85%	100%	100%	100%
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	n.a	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	93%	94%	95%	97%	98%	100%	100%
10.4.	Kepemilikan KTP	53,54 %	60%	70%	80%	90%	100%	100%
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	0,63	0,70	0,78	0,88	0,96	0,100	0,100
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n.a	3,4%	5,5%	7%	9%	12%	12%
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	n.a	-	-	-	-	-	-
11.3.	Rasio KDRT	n.a	-	-	-	-	-	-
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	n.a	-	-	-	-	-	-
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	4,11%	5,90%	7,21%	8,33%	9,25%	11%	11%
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	n.a	20%	35%	55%	85%	100%	100%
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	5 org	5 org	5 org	4 org	4 org	4 org	4 org
12.2.	Rasio akseptor KB	1,5	2,6	4,0	6,7	8,9	10	10

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	19 %	20%	21%	22%	23%	24%	24%	
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	9,97 %	8,20%	7,10%	6,40%	5,10%	5%	5%	
13.	Sosial								
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	n.a	1	1	1	1	1	1	
13.2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4.651	4.300	4.000	3.850	3.500	3.200	3.200	
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14	Ketenagakerjaan								
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	85,53%	87,7%	89,9%	90,1%	92,7%	94%	94%	
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	n.a	-	-	-	-	-	-	
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	85,53 %	86,32%	88,20%	90%	95%	100%	100%	
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	34,73 %	36,50%	38,30%	40,21%	44%	48%	48%	
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	3,55 %	3,30%	3%	2,80%	2,5%	2%	2%	
14.6.	Keselamatan dan perlindungan	n.a	-	-	-	-	-	-	
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	n.a	-	-	-	-	-	-	
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
15.1.	Persentase koperasi aktif	15,79 %	17,33%	20,21%	24%	27%	31%	31%	
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	309	309	309	309	309	309	309	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.3.	Jumlah BPR/LKM	n.a	-	-	-	-	-	-
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	40,77 %	41,22%	43,20%	45%	47,22%	49,5%	49,5%
16	Penanaman Modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	n.a	-	-	-	-	-	-
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	n.a	-	-	-	-	-	-
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	n.a	-	-	-	-	-	-
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	n.a	-	-	-	-	-	-
17	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	48 jenis	48 jenis	48 jenis	48 jenis	48 jenis	48 jenis	48 jenis
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis
18	Kepemudaan dan Olah Raga							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	2	2	2	3	3	3	3
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	0	0	1	1	1	1	1
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	3	3	4	4	5	5
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	0	3	3	4	4	5	5
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	2	2	3	3	5	5

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
18.6.	Lapangan olahraga	4 lap	4 lap	5 lap	5 lap	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
20.1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	n.a	-	-	-	-	-	-	-
20.2.	Rasio Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk	0,12	0,14	0,17	0,19	0,23	0,26	0,26	0,26
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	n.a	-	-	-	-	-	-	-
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	2,83 %	2,90%	2,96%	3,00%	3,12%	3,33%	3,33%	3,33%
20.5.	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	40,25 %	38,27%	35,10%	32%	29%	25%	25%	25%
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	0	0	1	1	1	1	1	1
20.7.	Penegakan PERDA	n.a	-	-	-	-	-	-	-
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	n.a	-	-	-	-	-	-	-
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten								

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	n.a	7%	10%	15%	20%	25%	25%	25%
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	n.a	12%	25%	44%	67%	100%	100%	100%
	Sistim Informasi Manajemen Pemda	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Ketahanan Pangan								
	Regulasi ketahanan pangan	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ketersediaan pangan utama	0,37 %	2,3%	4,4%	6,1%	8,2%	10%	10%	10%
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah LSM	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	LPM Berprestasi	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Posyandu aktif	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	112 org	140 org	170 org	200 org	244 org	275 org	275 org	275 org
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n.a	-	-	-	-	-	-	-
23	Statistik								
	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24	Kearsipan								
	Pengelolaan arsip secara baku	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0 Keg	1 keg	1 keg	2 keg	2 keg	3 keg	3 keg	3 keg
25	Komunikasi dan Informatika								
	Jumlah jaringan komunikasi	1	2	2	3	4	5	5	5
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,128.157	0,112.000	0,98.000	0,87.000	0,66.000	0,36.6161	0,36.616	0,36.616
	Jumlah surat kabar nasional/lokal	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	n.a	-	-	-	-	-	-	-
	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pameran/expo	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
26	Perpustakaan								
	Jumlah perpustakaan	0	0	1	1	1	1	1	1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)	(9)
(1)	(2)							
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	n.a	-	-	-	-	-	-
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	n.a	-	-	-	-	-	-
	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	n.a	-	-	-	-	-	-
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	36,84 %	37,80%	39,00%	40,67%	42,10%	43%	43%
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,21 %	1,33%	1,56%	1,87%	1,99%	2%	2%
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,44%	1,98%	2,15%	2,33%	2,76%	2,90%	2,90%
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	n.a	-	-	-	-	-	-
	Cakupan bina kelompok petani	n.a	-	-	-	-	-	-
2.	Kehutanan							
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,4%	1,7%	1,9%	2%	2,3%	2,5%	2,5%
	Kerusakan Kawasan Hutan	15,88 %	13,22%	12 %	10 %	7,22%	5%	5%
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	2,23%	2,65%	2,90%	3,10%	3,44%	3,76%	3,76%
3	Energi dan Sumberdaya Mineral							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,65 %	0,99%	1,12%	1,35%	1,66%	1,89%	1,89%
4	Pariwisata							
4.1.	Kunjungan wisata	n.a	-	-	-	-	-	-
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0	0,35%	0,77%	0,90%	1 %	1,20%	1,20 %
5	Kelautan dan Perikanan							
	Produksi perikanan	37,77 %	38,77%	39,66%	40,21%	41,33%	42,21%	42,21%
	Konsumsi ikan	37,77 Kg/hari	39,30 Kg/ hari	41,8 Kg/ hari	44,7 Kg/ hari	46,2 K/ hari	48,3 Kg/ hari	48,3 Kg/ hari
	Cakupan bina kelompok nelayan	n.a	-	-	-	-	-	-
	Produksi perikanan kelompok nelayan	n.a	-	-	-	-	-	-
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,54 %	9,88%	10,4%	11,45%	12 5	13,2%	13,2%
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	n.a	-	-	-	-	-	-
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	n.a	-	-	-	-	-	-
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,04 %	1,30%	1,70%	1,99%	2,33%	2,8%	2,8%
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	1,57%	1,98%	2,23%	2,55%	2,90%	3%	3%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.3.	Pertumbuhan Industri.	27,59 %	27,9%	28,6%	29,7%	30,5%	31%	31%
7.4..	Cakupan bina kelompok pengrajin	n.a	-	-	-	-	-	-
8.	Ketransmigrasian							
8.1.	Transmigrasi swakarsa	n.a	-	-	-	-	-	-
8.2.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	n.a	-	-	-	-	-	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Pada Kemampuan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	414.117	450.000	475.000	495.000	511.000	525.000	525.000
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	n.a	-	-	-	-	-	-
	Produktivitas total daerah	n.a	-	-	-	-	-	-
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani	n.a	-	-	-	-	-	-
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan							
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,54 Km	0,60 Km	0,70 Km	0,80 Km	0,90 Km	1,100 Km	1:100 Km
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	n.a	-	-	-	-	-	-

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah orang/barang-melalui-dermaga/ bandara/ terminal per tahun	17.154 org	20.500 org	23.700 org	27.000 org	30.600 org	35.000 org	35.000 org
2	Penataan Ruang							
	Ketaatan terhadap RTRW	n.a	-	-	-	-	-	-
	Luas wilayah produktif	n.a	-	-	-	-	-	-
	Luas wilayah industri	n.a	-	-	-	-	-	-
	Luas wilayah kebanjiran	n.a	-	-	-	-	-	-
	Luas wilayah kekeringan	n.a	-	-	-	-	-	-
	Luas wilayah perkotaan	n.a	-	-	-	-	-	-
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Jenis dan jumlah bank dan cabang	1	1	2	2	3	3	3
	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	0	0	1	1	2	2	2
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	n.a	-	-	-	-	-	-
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	n.a	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup							
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	15%	18%	21%	23%	26%	33%	33%
5	Komunikasi dan Informatika							
	Rasio ketersediaan daya listrik	10.000 KUA	13.000 KUA	16.300 KUA	19.400 KUA	23.000 KUA	25.000 KUA	25.000 KUA

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	17,1 %	20,54%	24%	29%	34%	38,80%	38,80%	
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	-	-	-	-	-	-	
	Fokus Iklim Berinvestasi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	Angka kriminalitas	n.a	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah demo	n.a	-	-	-	-	-	-	
	Lama proses perijinan	n.a	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	n.a	-	-	-	-	-	-	
	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	n.a	-	-	-	-	-	-	
	Fokus Sumberdaya Manusia								
1	Ketenagakerjaan								
	Rasio lulusan S1/S2/S3	n.a	-	-	-	-	-	-	
	Rasio ketergantungan	0,58	0,55	0,52	0,49	0,46	0,42	0,42	

Penetapan indikator kinerja daerah seperti ditampilkan di atas dapat memperlihatkan ukuran pencapaian daerah selama periode RPJMD. Target pencapaian tersebut dapat dilihat rinci pada masing-masing indikator maupun secara akumulatif. Namun demikian, penetapan indikator yang terpusat seperti ditampilkan di atas tidak serta merta dapat diterapkan langsung di setiap daerah terutama Kabupaten Puncak Jaya. Terdapat beberapa indikator kinerja daerah yang tidak kontekstual dengan kondisi daerah di Puncak Jaya.

Penetapan indikator dalam kasus Puncak Jaya berupaya mengakomodasi indikator yang bersifat terpusat tapi juga berupaya mengkonstektualisasikannya kondisi dan keadaan daerah. Implikasinya, seperti pada tabel di atas terdapat beberapa kolom indikator yang tidak bisa diisi karena berbagai alasan seperti: belum tersedianya data yang valid dan juga tidak sinkronnya indikator dengan konteks daerah. Meski begitu, penetapan indikator daerah untuk Kabupaten Puncak Jaya seperti dirinci pada tabel di atas berupaya menunjukkan kondisi kekinian dan target pencapaian selama periode RPJMD hingga tahun 2017.



BAB X

PEDOMAN TRANSISI

DAN KAIDAH

PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 disusun berdasarkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 untuk tahapan pembangunan lima tahunan tahun 2013-2017. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di akhir periode RPJMD maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepada daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) antarlain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2.Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2013-2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 menjadi pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas/Badan/Kantor dan merupakan pedoman bagi penyusunan

RKPD dan Dinas/Badan/Kantor dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas, Badan, Kantor serta masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas, Badan, dan Kantor berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, Badan, dan Kantor yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas/Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD;
3. Dinas, Badan, dan Kantor berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 dengan Rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor dan Rencana Kerja SKPD.



BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Puncak Jaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 akan menjadi pendorong dalam mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2017 menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, damai, dan sejahtera berlandaskan nilai agama dan budaya dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017 tersebut dapat

terwujud dengan dukungan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, kerjasama yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Papua, dukungan dan komitmen DPRD serta kerjasama masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Bupati Puncak Jaya

ttd/cap

Drs. Henok Ibo

LAMPIRAN : TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan

Visi: Tahun 2017 Masyarakat Puncak Jaya Semakin Mandiri, Maju dan Sejahtera yang Didukung Nilai Agama dan Budaya dengan Tata Pemerintahan yang Baik

Misi 1: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana perhubungan darat	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan yang sudah ada	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang sudah ada	Perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda empat	145.72 KM	185.72KM	Program pemeliharaan/ rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	PU
	Tersedianya jaringan jalan antar distrik	Menyediakan jaringan jalan antar distrik dan Ibukota kabupaten	Pembangunan jalan dan jembatan antara distrik dengan Ibukota kabupaten. Prioritas dilakukan di distrik Mewoluk, Silamburawi, Tinggihambut, Gubume dan Wonwi. Termasuk pembangunan rute jalan strategis seperti di distrik Muara (jalan aspal dari bandara ke Kulirik) dan di distrik Tinggihambut (jalur distribusi hasil bumi)	Jumlah distrik yang terhubung	6 Distrik	17 Distrik	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	PU

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Tersedianya jaringan jalan antar kampung	Menyediakan jaringan jalan antar kampung		Jumlah/ persentase kampung yang terhubung dengan jalan distrik	58 kampung	98 Kampung			
	Tersedianya moda transportasi darat	Menyediakan moda transportasi darat	Pengembangan moda transportasi darat. Termasuk penyediaan transportasi umum di distrik Kalome	Jumlah distrik yang bisa diakses dengan kendaraan roda empat	5 (Yamo, Tinggiranbut, Mulia Ilu, Jigonkeme)	6 (Yamo, Tinggiranbut, Mulia Ilu, Jigonkeme, Mewoluk)			
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan udara	Meningkatnya kapasitas bandara Mulia	Meningkatkan kapasitas Bandara Mulia	Peningkatan kapasitas bandara	Luas Bangunan Bandara Mulia	N/A	N/A	Program Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan/ PU
				Frekuensi penerbangan	912	1400			
				Kapasitas Penumpang Bandara Per tahun	8.028 penumpang	30.000 penumpang			
				Kapasitas kargo pertahun	330.580 kg	1.000.000 kg			
	Terbanggunya bandara perintis	Membangun bandara perintis di beberapa distrik	Pembangunan lapangan terbang perintis terutama di distrik Lumo serta rehabilitasi lapangan terbang di distrik Torore	Frekuensi penerbangan	N/A	N/A		Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan/ PU
				Jumlah distrik yang bisa diakses dengan pesawat perintis	4 (Fawi, Torore, Mewoluk)	4			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan perhubungan sungai	Meningkatnya arus lalu lintas perhubungan sungai	Meningkatkan arus lalu lintas perhubungan sungai	Peningkatan jumlah perahu/ sampan terutama di distrik Torere dan Fawi.	jumlah perahu tersedia	3	9	Program peningkatan angkutan sungai	Pekerjaan Umum	Perhubungan
			Pembangunan tambatan/ dermaga perahu	jumlah tambatan yang terbangun	1 (Fawi)	4 (2 Fawi, 1 Dagai, 1 Torere)			
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur bidang energi	Berfungsinya fasilitas pembangkit listrik dan jaringan kelistrikan	Memfungsikan fasilitas pembangkit listrik jaringan kelistrikan	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan dan sumberdaya listrik yang ada	Jumlah jaringan listrik yang berfungsi	4	11	Program Pembangunan Infrastruktur bidang kelistrikan	Pekerjaan Umum	PU
			Pengembangan potensi sumber energi listrik alternatif. Prioritas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di distrik Yamo, Yamoneri dan Nume	Jumlah Pembangkit Listrik Mikrohidro	5	11		Pekerjaan Umum/ Perumahan	PU
			Potensi sumber energi listrik alternatif	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	20%	40%			
			Jaringan distribusi listrik	Persentase unit pelayanan pemerintah yang teraliri listrik	75%	100%			
Meningkatnya ketersediaan dokumen induk pembangunan	Tersedianya Masterplan Pembangunan Daerah	Menyediakan Masterplan Pembangunan Daerah		Jumlah masterplan tersusun	0	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya sarana komunikasi	Meningkatkan sarana komunikasi	Peningkatan sarana komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	2	8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Setda
	Meningkatnya jangkauan komunikasi	Meningkatkan jangkauan komunikasi	Pembangunan sarana komunikasi. Prioritas di distrik yang belum memiliki sarana telekomunikasi seperti Nioga	Jumlah BTS seluler	1	5			
				Jumlah warpostel	2 Ilu dan Fawi)	Ilu, Fawi, Yamo, Mewoluk, Torere, Jigonikme, Tinggnambut (7)			
				Berfungsinya Stasiun Radio Daerah/ Peningkatan Frekuensi	1 FM	1 FM dan 1 MW			
				Jumlah/ persentase distrik yang memiliki SSB efektif	4 (Ilu, Fawi, Torere, Mulia)	11 (Ilu, Fawi, Torere, Mulia, Mewoluk, Yamo, Tinggnambut, Jigonikme, Dagai, Kiyage, Yambi)			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Meningkatnya sarana dan jangkauan jaringan internet		Penyediaan SDM Radio Daerah	Jumlah peranti internet	2	6		Komunikasi dan Informatika	Setda
		Meningkatkan sarana dan jangkauan jaringan internet	Pemeliharaan dan peningkatan prasarana internet	Jumlah fasilitas publik terpasang internet	2	10			
Mengembangkan infrastruktur pemukiman sederhana yang sehat	Tersedianya kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana	Menyediakan kawasan pemukiman sederhana dan sehat	Pengembangan perumahan sederhana dan sehat. Prioritas pembangunan di distrik Mewoluk, Taganombak, Torere, Yamo, Nume, Nioga, Gubume, Kalome, Wonwi, Silamburawi, Yamoneri dan Fawi (rumah kopel)	Jumlah pemukiman dalam keadaan baik	30	50	Program Pengembangan perumahan	Perumahan	Dinsosnaker
	Berfungsinya sistem dan jaringan air bersih di setiap kampung	Memfungsikan sistem dan jaringan air bersih di setiap kampung	Memelihara dan meningkatkan sistem dan jaringan air. Pembangunan fokus di distrik Guragi, Mewoluk, Molanikime, Torere, Yamo, Kalome, Nume, Wonwi, Nioga dan Lumo	Debit sumber air bersih	2.5 l/s	2.5 l/s	Program Lingkungan Sehat pemukiman	Pekerjaan Umum/Perumahan	PU
				Jumlah jaringan air bersih terbangun	8	14			
				Daya tampung reservoir terbangun	450	750			
				Jumlah sarana penampungan air bersih	9	15			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
			Konservasi kawasan-kawasan sumber air bersih	Tersedianya Peta Lokasi	0	1		Pekerjaan Umum	PU
				Tersedianya Perda	0	1			
	Tersedianya sistem sanitasi dan pengolahan limbah	Menyediakan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah	Mengembangkan sistem sanitasi, termasuk pembangunan MCK di distrik-distrik seperti Mewoluk dan lainnya	Tersedianya desain pengembangan sistem sanitasi	0	1		Lingkungan Hidup	PU
				Panjang saluran sanitasi	N/A	N/A			
				Jumlah MCK di setiap kampung	15	30			
				Tersedianya septictank	500 buah	1000 buah			
			Mengembangkan pengelolaan limbah	Tersedianya desain pengelolaan limbah	0	1		Lingkungan Hidup	PU
				Tersedianya TPA	0	1			
				Tersedianya jalur pengambilan sampah	0	1			

Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan dasar	Tersedianya fasilitas pendidikan dasar di setiap distrik dalam jumlah yang lebih memadai	Pembangunan gedung sekolah baru untuk tingkat SD dan SMP	Pembangunan gedung sekolah baru diprioritaskan di distrik yang belum memiliki gedung sekolah atau jumlahnya masih terbatas sementara jumlah anak usia sekolah cukup banyak	Jumlah distrik yang memiliki minimal 5 unit sekolah tingkat SD	2	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora
			Pembangunan unit baru SD diprioritaskan di Distrik Mewoluk, Taganombak, Torere, Kalome, Silamburawi, Wonwi, Lumo dan Guragi						
			Pembangunan unit baru SMP diprioritaskan di Distrik Mewoluk, Torere Gubume, Kalome, Nume, Lumo dan Guragi						
		Penyelenggaraan layanan pendidikan tingkat SD dan SMP dengan memanfaatkan fasilitas publik yang telah ada	Mengembangkan kerjasama dengan gereja sebagai tempat penyelenggaraan layanan pendidikan tanpa mengganggu aktivitas peribadatan	Jumlah distrik yang memiliki minimal 2 unit sekolah tingkat SMP	1	4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora
		Pengembangan sekolah satu atap dan berasrama untuk tingkat SD dan SMP	Sekolah satu atap diprioritaskan untuk diselenggarakan di SD atau SMP yang telah ada di kawasan-kawasan yang sulit untuk membangun gedung sekolah yang baru. Distrik Torere merupakan distrik yang mendapatkan prioritas sebagai lokasi pengembangan sekolah SD dan SMP satu atap berasrama.						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Tersedianya tenaga pengajar di setiap sekolah dengan jumlah yang memadai	Meningkatkan pemerataan sebaran guru antardistrik dan antarsekolah melalui pendistribusian ulang guru	Pendistribusian guru diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah yang mengalami keterbatasan jumlah guru. Redistribusi tenaga pendidikan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan.	Persentase jumlah SD yang memiliki jumlah guru minimal 6 orang	41%	90%	Program Distribusi Guru	Pendidikan	Disdikpora
			Penambahan tenaga pendidik diprioritaskan di Distrik Mewoluk dan Kalome.	Persentase jumlah SMP yang memiliki jumlah guru sesuai standar minimal	0	20%			Disdikpora
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Penyediaan rumah dinas bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat dasar dan menengah	Pembangunan rumah dinas dilakukan di pusat distrik atau daerah yang strategis dan diprioritaskan bagi guru yang belum/ tidak memiliki rumah di tempat bertugas	Persentase rumah dinas guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP)	17%	21%	Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Disdikpora
			Penyediaan rumah diprioritaskan di Distrik Taganombak, Torere dan Guragi.						
Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan menengah	Tersedianya fasilitas pendidikan menengah di setiap satuan wilayah pengembangan (SWP)	Pembangunan gedung sekolah baru untuk tingkat SMA	Pembangunan gedung sekolah baru diprioritaskan di distrik yang paling strategis di setiap satuan wilayah pengembangan (SWP)	Rasio jumlah SMA/ SMK terhadap jumlah distrik	4:8	8:25	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya tenaga pengajar yang memadai di setiap sekolah	Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dalam jumlah yang lebih memadai untuk tingkat SMA	Pengadaan tenaga pendidik CPNS untuk tingkat SMA	Persentase jumlah SMA yang memiliki jumlah guru sesuai standar minimal	0%	20%	Program pengembangan SDM Kependidikan	Pendidikan	Disdikpora

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
			Redistribusi tenaga pendidik SMA yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah yang mengalami keterbatasan jumlah tenaga pendidik						
			Pengembangan kerjasama dengan institusi mitra (perguruan tinggi, NGO, yayasan) dalam pengelolaan guru kontrak pada tingkat SMA						
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	Tersedianya asrama pelajar tingkat SMA di setiap SWP	Pembangunan asrama bagi pelajar SMA dan penyediaan fasilitas pendukungnya	Pembangunan asrama dilakukan di lokasi SMA	Rasio jumlah asrama pelajar terhadap jumlah SMA/SMK	0:4	4:04	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya dan tersalurkannya bantuan biaya pendidikan bagi warga tidak mampu	Pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa tidak mampu di luar yang ditanggung program pemerintah pusat (BOS dan BSM)	Pemberian beasiswa untuk SD dan SMP diprioritaskan di Distrik Fawi	Persentase jumlah siswa tidak mampu di tingkat SD yang menerima bantuan biaya pendidikan	100%	100%	Program beasiswa bagi siswa miskin	Pendidikan	Disdikpora
	Terselenggaranya pendidikan non formal	Pengembangan layanan pendidikan non-formal	Pengembangan kerjasama dengan gereja/yayasan dalam pengelolaan pendidikan non-formal	Jumlah unit layanan pendidikan non-formal yang fungsional	1	2	Program Pendidikan Non-Formal	Pendidikan	Disdikpora
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bekerjasama dengan gereja/yayasan	Promosi dilakukan melalui kegiatan keagamaan terutama terhadap warga yang tidak lagi berusia sekolah (orang dewasa atau orang tua) sehingga selain bersedia mengikuti pendidikan non-formal mereka juga dapat mendorong anak dan saudaranya untuk mengikuti pendidikan formal	Persentase guru yang berkualifikasi sarjana (S1)	37%	100%	Program peningkatan partisipasi masyarakat	Pendidikan	Disdikpora

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
		Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan pendidikan melalui wadah komite sekolah	Pemberdayaan terutama dilakukan terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan pengusaha	Persentase jumlah guru yang memiliki latarbelakang pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang diajar	87,80%	90%		Pendidikan	Disdikpora
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya kompetensi guru	Mengembangkan skema fasilitasi bagi guru untuk studi lanjut S1	Fasilitasi studi lanjut diprioritaskan untuk menambah guru bidang studi tertentu yang jumlahnya masih terbatas	Persentase jumlah guru yang telah bersertifikat pendidik	6,62%	40%	Program peningkatan kualitas pendidikan	Pendidikan	Disdikpora
	Tersedianya insentif yang memadai bagi tenaga pengajar	Mengembangkan skema fasilitasi bagi guru untuk studi lanjut S1	Fasilitasi studi lanjut diprioritaskan untuk menambah guru bidang studi tertentu yang jumlahnya masih terbatas	Persentase guru di lokasi terisolasi yang mendapatkan insentif	100%	100%		Pendidikan	Disdikpora
		Mengembangkan skema fasilitasi bagi guru untuk mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas (pendidikan non-gelar)	Pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas guru yang telah berkualifikasi minimal S1 atau yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan bergelar						
		Pengalokasian insentif daerah bagi guru	Penentuan besaran insentif didasarkan pada sebuah standar yang secara khusus dibuat dengan memperhatikan tingkat keterisolasian lokasi sekolah, beban tugas, dan kedisiplinan guru dalam memenuhi kewajiban mengajar						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Tersedianya sarana pendukung yang memadai di setiap sekolah	Pengadaan perlengkapan kelas	Pengadaan perlengkapan untuk memenuhi standar minimal kelas	Persentase jumlah kelas yang berkondisi baik di tingkat SD	65,63%	80%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora
				Persentase jumlah kelas yang berkondisi baik di tingkat SMP	45,45%	70%			
				Persentase jumlah kelas yang berkondisi baik di tingkat SMA	55,56%	80%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
		Penyediaan fasilitas perpustakaan	Penyediaan fasilitas perpustakaan untuk memenuhi standar minimal	Persentase jumlah SD yang memiliki perpustakaan	5%	15%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Disdikpora
				Persentase jumlah SMP yang memiliki perpustakaan	29%	57%			
				Persentase jumlah SMA yang memiliki perpustakaan	50%	70%			
		Penyediaan fasilitas komputer dan internet	Penyediaan fasilitas komputer dan internet dilakukan untuk mendukung layanan perpustakaan	Persentase jumlah SD yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	13%	Program peningkatan media pembelajaran modern	Pendidikan	Disdikpora
				Persentase jumlah SMP yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	10%			
				Persentase jumlah SMA yang memiliki fasilitas komputer dan internet	0%	13%			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
		Pengadaan fasilitas laboratorium	Pengadaan fasilitas laboratorium untuk memenuhi standar minimal	Persentase jumlah SMP yang memiliki laboratorium yang jumlah dan jenisnya sesuai standar minimal	0%	10%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Disdikpora
				Persentase jumlah SMA yang memiliki laboratorium yang jumlah dan jenisnya sesuai standar minimal	0%	10%		Pendidikan	Disdikpora
Mengoptimalkan operasionalisasi pelayanan kesehatan	Tersedianya layanan kesehatan yang fungsional	Optimalisasi puskesmas dan pusku sebagai penyelenggara layanan kesehatan dasar	Puskesmas dan pusku di setiap distrik	Persentase puskesmas yang fungsional	37,5% (3 dari 8 puskesmas)	100%	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas pembantu (Pustu) yang fungsional	38,8% (7 dari 18 pusku)	100%			
	Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai di setiap Puskesmas dan Pusku	Pemerataan sebaran tenaga kesehatan di puskesmas/pustu di tiap distrik dan atau kampung	Pendistribusian tenaga kesehatan diprioritaskan untuk puskesmas/pustu yang kekurangan tenaga kesehatan.	Persentase puskesmas yang memiliki jumlah dokter minimal 2 orang	25%	75%	Program pengembangan SDM kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Penambahan tenaga medis diprioritaskan di distrik Mewolu dan Yamo.	Persentase puskesmas yang memiliki jumlah perawat minimal 4 orang	25%	75%			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
				Persentase puskesmas yang memiliki jumlah bidan minimal 3 orang	25%	75%			
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan	Penyediaan rumah dinas bagi tenaga kesehatan	Pembangunan rumah dinas dilakukan di pusat distrik atau daerah yang strategis dan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang belum/ tidak memiliki rumah di tempat bertugas.	Persentase distrik yang memiliki rumah dinas tenaga kesehatan minimal 7 unit	37,50%	100%	Program Kesejahteraan tenaga kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pembangunan rumah dinas diprioritaskan di Distrik Kalome dan Guragi.						
	Tersedianya obat-obatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan	Pemenuhan obat-obatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan	Penyediaan obat-obatan yang lebih memadai diutamakan bagi puskesmas dan pusat yang memiliki angka kunjungan tinggi	Persentase puskesmas yang menyediakan obat secara memadai	100%	100%	Program Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit yang lebih memadai	Pengadaan unit pelayanan fungsional tambahan di RSUD	Penambahan 5 unit pelayanan fungsional di RSUD: ICU, IGD, Perawatan Anak, Instalasi Farmasi, dan Klinik VCT	Jumlah unit pelayanan fungsional di RSUD	12	17 (penambahan 5 unit pelayanan fungsional: ICU, IGD, Perawatan Anak, Instalasi Farmasi dan Klinik VCT)		Kesehatan	RSUD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
		Pengembangan unit pelayanan spesialis di RSUD	Unit pelayanan spesialis yang ditambahkan mencakup Spesialis Kandungan, Anak, Penyakit Dalam, Bedah, dan Patologi Klinis	Jenis pelayanan kesehatan spesialis	1 (radiologi)	6 (Spesialis Kandungan, Anak, Penyakit Dalam, Bedah, dan Patologi Klinis)	Program pengembangan Sarana dan Prasarana kesehatan		
		Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan RSUD	Pengadaan unit ambulans untuk melakukan layanan penjemputan pasien gawat darurat	Jumlah unit mobil ambulans penjemput pasien gawat darurat di RSUD	1 unit	4 unit			
	Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang lebih memadai di RSUD	Peningkatan jumlah tenaga kesehatan sehingga menjadi lebih memadai	Penambahan tenaga kesehatan diprioritaskan untuk dokter umum, dokter spesialis, dan paramedis	Jumlah dokter umum	4	10	Program pengembangan SDM kesehatan	Kesehatan	RSUD
				Jumlah dokter spesialis	1	8		Kesehatan	RSUD
				Jumlah paramedis	77	100		Kesehatan	RSUD
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan	Peningkatan jumlah rumah dinas bagi tenaga kesehatan RSUD	Diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang belum memiliki rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas tenaga kesehatan rumah sakit	17 Unit	30 Unit	Program peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	Kesehatan	RSUD
	Tersedianya obat-obatan yang memadai	Penambahan ketersediaan obat-obatan secara lebih memadai	Diprioritaskan untuk jenis obat yang diperlukan oleh unit pelayanan spesialis yang baru dikembangkan	Jumlah jenis obat yang dibutuhkan di RSUD	300 jenis	500 jenis	Program pengembangan Sarana dan Prasarana kesehatan	Kesehatan	RSUD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Tersedianya layanan kesehatan keliling dan antar-jemput warga	Peningkatan kualitas dan daya jangkau unit layanan kesehatan keliling	Pengadaan unit kendaraan darat maupun air untuk memperkuat armada pelayanan kesehatan keliling. Diprioritaskan untuk dikembangkan di distrik-distrik yang memiliki wilayah luas dengan fasilitas kesehatan yang terbatas.	Persentase puskesmas yang memiliki unit pelayanan keliling darat atau air yang fungsional	50%	100%	Program pengembangan Sarana dan Prasarana kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya ketersediaan layanan perawatan di tingkat distrik	Peningkatan ketersediaan layanan perawatan (rawat inap) di tingkat puskesmas	Diprioritaskan untuk dikembangkan di tiga distrik yang jauh dari RSUD	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan rawat inap	25% (2 dan 8 puskesmas)	63%			
	Terselenggaranya kemitraan dengan gereja dalam pengelolaan layanan kesehatan	Penyelenggaraan kerjasama dengan gereja dalam pelayanan kesehatan	Kerjasama dilakukan dengan gereja yang memiliki jemaat terbanyak dan yang berlokasi di daerah terpencil.	Persentase puskesmas yang bekerjasama dengan gereja	100%	100%	Program pengembangan Kemitraan untuk Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya kapasitas SDM tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan	Diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas bidan dalam menangani kasus komplikasi persalinan dan dokter dalam menangani kasus kegawatdaruratan	Persentase bidan yang memenuhi standar kompetensi dalam penanganan komplikasi kelahiran	0	100%	Program pengembangan SDM kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD
				Persentase dokter yang memiliki keahlian penanganan kegawatdaruratan	0	100%			
	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu hamil	Diutamakan untuk meningkatkan proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan serta peningkatan pelayanan ibu hamil dan pascapersalinan	Persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	5,30%	70%	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan ibu pascamelahirkan	13%	75%			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
		Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi	Pelayanan bayi ditujukan terutama untuk pemberian imunisasi lengkap dan peningkatan kualitas gizi balita	Cakupan balita yang mendapatkan imunisasi lengkap	22,50%	80%		Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Rata-rata jumlah kasus balita gizi buruk dan gizi kurang perbulan	74	20	Program Peningkatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan	Tersedianya jumlah tenaga pengajar yang memadai di D3 Keperawatan	Penyediaan Jumlah Tenaga Pendidik yang memadai	Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga pendidik D3 Keperawatan berstatus dosen tetap	Jumlah Tenaga Pendidik berstatus Dosen Tetap	8 orang	15 orang	Program pengembangan SDM kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Jumlah Tenaga Kependidikan yang memadai Meningkatkan kualitas tenaga pengajar D3 Keperawatan	Penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan yang memadai	Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga kependidikan D3 Keperawatan berstatus pegawai tetap	Jumlah Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap	2 orang	5 orang		Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pengajar D3 Keperawatan	Penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga pengajar D3 Keperawatan	Pembangunan rumah dinas dilakukan di dekat lokasi D3 Keperawatan dan diprioritaskan bagi tenaga pengajar D3 Keperawatan yang belum/ tidak memiliki rumah di tempat bertugas	Jumlah unit rumah dinas	3 kopel 6 pintu	5 kopel 10 pintu	Program peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas tenaga pengajar D3 Keperawatan	Peningkatan kualitas tenaga pengajar D3 Keperawatan	Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga pengajar yang berpendidikan minimal S1	Jumlah tenaga pengajar yang berpendidikan minimal S1	7 orang	24 orang	Program Pemberian Beasiswa	Pendidikan	Dinas Kesehatan
			Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah tenaga pengajar yang memiliki Sertifikat PEKERTI dan Akta IV	Jumlah tenaga pengajar yang memiliki Sertifikat PEKERTI dan Akta IV	1 orang	14 orang	Program pengembangan SDM kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Belajar	Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Belajar	Memfokuskan pada penyediaan sarana prasarana dasar penunjang belajar semisal ruang kelas dan laboratorium	Jumlah Ruang Kelas	3 ruang kelas	6 ruang kelas	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pendidikan	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laboratorium	1 laboratorium	3 laboratorium		Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Berubahnya status dari Program Khusus menjadi Program Studi (Prodi) D3 Keperawatan	Perubahan status dari Program Khusus menjadi Program Studi (Prodi) D3 Keperawatan	Fokus pada inisiasi kerjasama dengan Poltekkes Jayapura untuk memperoleh perubahan status menjadi Program Studi (Prodi) D3 Keperawatan	Status menjadi Prodi D3 Keperawatan	Program Khusus D3 Keperawatan	Prodi D3 Keperawatan		Pendidikan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas lulusan D3 Keperawatan	Peningkatan kualitas lulusan D3 Keperawatan	Fokus pada peningkatan persentase Lulusan D3 Keperawatan yang Lulus Uji Kompetensi	Persentase Lulusan yang Lulus Uji Kompetensi	0	100% lulus		Pendidikan	Dinas Kesehatan

Misi 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas dan Komitmen Aparatur serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan	Pengembangan kerjasama khusus dengan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tugas belajar	Perguruan Tinggi yang memiliki prodi yang relevan dan tergantung dengan hasil pemetaan kebutuhan	MoU dengan PT	N/A	3	Program pengembangan kapasitas aparatur	Kepegawaian	BKD
				Jumlah PNS Diploma	216	226		Kepegawaian	BKD
				Jumlah PNS S1	453	468		Kepegawaian	BKD
				Jumlah PNS S2	16	26		Kepegawaian	BKD
	Meningkatnya keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugasnya	Pengiriman dan fasilitasi bagi PNS untuk tugas belajar di perguruan tinggi baik untuk pendidikan diploma, sarjana, maupun pascasarjana	Pengiriman PNS yang belum memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan untuk tugas belajar	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	80%		keseekretarian Daerah	Setda
				Jumlah PNS yang dikirim pelatihan dan bintek	N/A	88 (4 orang per SKPD)		Kearsipan dan data	Setda
Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan	Optimalnya Komitmen Aparatur Pemerintahan	Penyediaan mekanisme pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bagian Perjinan, Puskesmas, Perjinan	Kontrak dan insentif kinerja	N/A	Ada	Program peningkatan kinerja aparatur	Kepegawaian	BKD
		Kontrak dan insentif kinerja	semua SKPD dan Setda	Persentase kehadiran pegawai per bulan	N/A	100%	Program peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintahan	Kepegawaian	BKD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
				Menurunnya persentase pelanggaran disiplin	N/A	0%		Kepegawaian	BKD
	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data, Informasi dan Instrumen Survei yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengelolaan arsip data dan informasi	Bidang perijinan dan administrasi keuangan	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	N/A	100%	Program Peningkatan penerapan kearsipan	Kearsipan dan data	Setda
				Bank data dan informasi	N/A	ada	Program Pengembangan data dan informasi	Data dan informasi	Bappeda
				Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Program Pembaruan dan pengelolaan data dan informasi	Litbang	Bappeda
		Penyediaan website	Pemerintah Kabupaten	Website	1	3	Program Penyediaan media komunikasi	Komunikasi dan informasi	Setda
				Periode update website	Tidak terupdate	Terupdate sebulan sekali		Komunikasi dan informasi	Setda
		Penyediaan sistem informasi	Bidang Perencanaan dan pengendalian, bidang pengelolaan aset, bidang e-government, dan TU	Sistem Informasi	5	9	Program pengembangan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	Komunikasi dan informatika	Setda
Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran	fokus pada Setda dan semua SKPD	Dokumen Renja	N/A	24	Program Penyediaan media komunikasi	Perencanaan	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
				Dokumen Renstra	N/A	24			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Belum ada	ada	Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	Perencanaan	Bappeda
				Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPDP yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Belum ada	ada		Perencanaan	Bappeda
				Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	Belum ada	Ada		Perencanaan	Bappeda
	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Optimalisasi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah kabupaten	46 instansi pemerintah	Nilai/status audit dokumen	Disclaimer	WTP	Program Peningkatan Pengawasan dan Pelaporan	Pelaporan	Bappeda
		Peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan mengenai korupsi dan transparansi keuangan	46 instansi pemerintah	PKPT dan monitoring ke 46 instansi pemerintah	N/A	26 distrik, 22 SKPD		Pengawasan	Inspektorat
	Menguatnya kapasitas anggota DPRD	Penguatan fungsi legislatif	Di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran	Frekuensi kegiatan penguatan kapasitas anggota DPRD	0	3 (legislasi, penganggaran dan pengawasan)	Program pengembangan kapasitas aparaturnya	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
				Persentase perda yang disahkan tepat waktu	0%	100%			
				Mekanisme komplain masyarakat	0	1			
	Meningkatnya kualitas representasi	Peningkatan fungsi representasi	Sekretariat DPRD dan humas DPRD	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat (jaring asmara)	0	5 (satu tahun sekali)	Program peningkatan kapasitas representasi (DPRD)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD

Misi 4: Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan iklim usaha dan perdagangan	Menguatnya iklim berwirausaha dan potensi perdagangan	Penguatan iklim berwirausaha dan potensi perdagangan	Identifikasi potensi ekonomi	Peta potensi ekonomi tiap distrik	4 dari 26 distrik	13 dari 26 distrik	Pengembangan iklim usaha	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
			Pelatihan wirausaha (entrepreneur) dan bimbingan manajemen dan pemasaran	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan dan bimbingan usaha	10 % dari 525 = 52 pelaku usaha	50 % dari 525 = 160 pelaku usaha	Program pengembangan kapasitas pelaku usaha	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
			Pengembangan Unit usaha masyarakat (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Jumlah unit usaha masyarakat yang berfungsi baik	90 % dari 525 = 468	100 % dari 525 = 525	Pengembangan Unit usaha masyarakat	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
			Pengembangan Lembaga keuangan mikro tingkat distrik untuk meningkatkan aksesibilitas permodalan masyarakat	Jumlah lembaga keuangan mikro yang berfungsi baik dan efektif	100 % dari 1 = 1	100 % dari 1 = 1	Pengembangan lembaga keuangan mikro	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
			Pengembangan pasar tradisional sebagai tempat pemasaran produk-produk lokal. Adapun pembangunan pasar dapat diprioritaskan di distrik Mewoluk, Nume, Kalome, Fawi, Wonwi dan Lumo	Jumlah pasar tradisional yang berfungsi sebagai media pemasaran yang memadai	25 % dari 26 = 6 pasar tradisional	100 % dari 26 = 26 pasar tradisional	Pengembangan pasar tradisional	Koperasi dan UKM	Kantor PPKB
	Meratanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja	Pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja	Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan pengelolaan usaha kepada warga lokal	Jumlah lapangan kerja bagi penduduk asli Papua	3% dari 110 ribu penduduk = 3.300	7% dari 110 ribu penduduk = 7.700	Pemberdayaan kelompok ekonomi warga asli	Ketenagakerjaan	BPMK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
			Pemberian dukungan usaha: kredit modal usaha, bantuan peralatan, bantuan bibit, bantuan pemasaran dan bimbingan dan penyuluhan usaha						
Meningkatkan produktivitas ekonomi sesuai potensi lokal	Meningkatnya produktivitas potensi pertanian	Peningkatan produktivitas potensi pertanian	Penyiapan sumberdaya manusia di bidang pertanian melalui pelatihan dan penyuluhan	Tingkat produktivitas pertanian	11 kw/ha	50 kw/ha	Pemberdayaan pertanian untuk warga	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Pengenalan dan bantuan sekaligus pendampingan penggunaan teknologi tepat guna untuk pengembangan pertanian	Frekuensi pengenalan dan pemberian bantuan.	1 x untuk 6 kelompok di 1 distrik	1 x untuk 102 kelompok di 17 Distrik			
			Penguatan sistem ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai	Frekuensi pendampingan penggunaan teknologi tepat guna	1 x untuk 6 kelompok di 1 distrik	1 x untuk 102 kelompok di 17 Distrik			
			Pemasaran dan distribusi hasil pertanian	Sirkulasi pemasaran hasil produksi pertanian	40 % dari kapasi -tas produk-si	60 % dari kapasi -tas produk-si	Program fasilitasi pemasaran hasil produksi	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Pengembangan sistem ekstensifikasi	luas lahan ekstensifikasi	110 Ha	150 Ha	Program ekstensifikasi lahan pertanian	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan/ Ketahanan Pangan
			Pendampingan dan penyuluhan kegiatan pertanian yang produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.	Cakupan pendampingan dan penyuluhan	26 % kel tani di 7 distrik	65 % kel tani di 17 distrik	Program Peningkatan Pendapatan Petani	pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatnya produktivitas potensi perkebunan	Peningkatan produksi perkebunan		Penyiapan sumberdaya manusia di bidang perkebunan melalui pelatihan dan penyuluhan	Tingkat produktivitas perkebunan	7 kw/ha	9 kw/ha	Program Peningkatan produktivitas Perkebunan	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			Pengenal dan bantuan sekaligus pendampingan penggunaan teknologi tepat guna untuk pengembangan perkebunan	1) Frekuensi pengenalan dan pemberian bantuan.2) Frekuensi pendampingan penggunaan teknologi tepat guna	7 %	30 %	Program pengenalan dan pendampingan teknologi tepat guna	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			Pemasaran dan distribusi hasil perkebunan	Sirkulasi pemasaran hasil produksi perkebunan	18 % kapasitas produksi	62 % kapasitas produksi	Program fasilitasi pemasaran hasil produksi	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			Pengembangan sistem ekstensifikasi dan intensifikasi lahan perkebunan	Luas lahan perkebunan	215 Ha	280 Ha	Ekstensifikasi perkebunan	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			Pendampingan dan penyuluhan kegiatan perkebunan yang produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan petani kebun	Cakupan pendampingan dan penyuluhan	60 % petani kopi	100 % petani kopi	Program Peningkatan Pendapatan Petani	pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Meningkatnya produktivitas potensi peternakan	Peningkatan produksi peternakan		Pengembangan budidaya peternakan	Produktivitas peternakan meningkat	20 %	80 %	Program pengenalan dan pendampingan budidaya ternak potensial	peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Pendampingan dan penyuluhan kegiatan peternakan	Terselenggaranya peternakan produktif	0 % peternak	80 % peternak		peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Berkembangnya budidaya perikanan	Peningkatan produksi perikanan	Pendampingan dan penyuluhan tentang produktivitas perikanan	Tercapainya produktivitas perikanan	40 %	80 %	Program pengembangan budidaya perikanan	perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Pengembangan produksi perikanan melalui pelatihan dan bimbingan pemasaran	Cakupan pemasaran produk perikanan yang luas	40 % dari kapasitas produksi	100 % dari kapasitas produksi		perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Berkembangnya daerah tujuan wisata	Pengembangan daerah wisata	Identifikasi potensi pariwisata	Adanya Peta potensi pariwisata	1	1	Pengembangan potensi pariwisata	Pariwisata	Disbudpar
			Pengembangan obyek wisata potensial dan strategis	Jumlah obyek, jenis atau destinasi wisata yang dikembangkan	15	15			
				Jumlah kunjungan wisatawan	0	250			
	Berkembangnya industri kreatif rakyat	Pengembangan industri kreatif rakyat	Kelompok Industri Kecil Menengah di Puncak Jaya	Jumlah industri kreatif	18 industri kreatif	28 industri kreatif	Pengembangan industri kreatif	Koperasi dan UKM	Diskoperindag
				Tingkat daya saing produk lokal	0 kali	5 kali		Koperasi dan UKM	Diskoperindag
				Cakupan penjualan meluas	10 % dari kapasitas produksi	15 % dari kapasitas produksi	Peningkatan kapasitas pemasaran	Perdagangan	Diskoperindag
Menguatnya Ketahanan Pangan Kabupaten	Tersedianya Peta Data Kerawanan Pangan Kabupaten	Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten	Distrik yang rawan pangan	Adanya Peta Data Kerawanan Pangan Kabupaten	0	1	Program peningkatan ketahanan pangan	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan
Meningkatnya hasil pajak daerah	Menguatnya kesadaran kewajiban membayar pajak	Penguatan kesadaran membayar pajak	Wajib pajak di tiap distrik	Peta potensi wajib pajak di setiap distrik	0	100%	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Perpajakan	Dispenda

Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sosial dan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Tersedianya <i>database</i> perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial	Pengembangan <i>database</i> Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pembuatan database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<i>Database</i> perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I)	0	1	Program Pengembangan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertem
	Tersedianya pekerja sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Penyediaan pekerja sosial	Penyediaan pekerja sosial yang berimbang berdasarkan gender	Jumlah pekerja sosial	872	NA	Program Peningkatan SDM Pekerja Sosial	Sosial	Dinsosnakertem
			Penyediaan beasiswa S1 untuk pendamping PMKS	Jumlah pendamping PMKS penerima beasiswa S1	0	10 (tiap tahun 2 orang)			
			Penyediaan beasiswa D3 untuk pendamping PMKS	Jumlah pendamping PMKS penerima beasiswa D3	0	10 (tiap tahun 2 orang)			
	Terbentuknya mekanisme koordinasi penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas SDM pekerja sosial melalui pendidikan non gelar	Pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan pendampingan bagi pekerja sosial	SOP penanganan masalah kesejahteraan sosial	0	1	Program Pengembangan tata kelola Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial	Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial bagi penyandang cacat dan lansia di panti dan luar panti	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sosial bagi penyandang cacat	Jumlah fasilitas sosial bagi penyandang cacat	0	1	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinasnakerperem
			Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sosial bagi lanjut usia	Jumlah fasilitas sosial bagi lansia	0	1		Sosial	Dinasnakerperem
			Kerjasama dengan organisasi/yayasan/LSM penyedia sarana prasarana pelayanan sosial luar panti	Jumlah kerjasama dengan organisasi/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial luar panti	0	2		Sosial	Dinasnakerperem
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Tersedianya bantuan sosial bagi korban bencana sosial	Penyusunan SOP penanganan bencana sosial	Pengkoordinasian lintas SKPD dalam penanganan korban bencana sosial	SOP Penanganan Bencana Sosial	0	1	Program Penyusunan tata kelola Penanganan Korban Bencana Sosial	Sosial	Dinasnakerperem
			Pembangunan pos-pos keamanan di distrik-distrik tertentu seperti Kalome, Yamoneri, Tinggimambut dan Silamburawi	Jumlah pos keamanan	0	4		Sosial	Dinasnakerperem
			Pemberian santunan berupa uang kepada korban konflik sosial	Skema santunan bagi korban konflik sosial	0	1		Sosial	Dinasnakerperem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Tersedianya bantuan sosial bagi korban bencana alam pada saat tanggap darurat	Pemetaan kawasan rawan bencana alam	Pemetaan kawasan rawan bencana alam di semua distrik	Peta kawasan rawan bencana alam	0	1	Program Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Alam	Sosial	BPBD
		Penyusunan SOP penanganan korban bencana alam pada saat tanggap darurat	Pengkoordinasian lintas SKPD dalam penanganan korban bencana alam. Kegiatan siaga bencana, misal diprioritaskan di distrik Silamburawi	Cakupan daerah bencana yang mendapatkan bantuan	0	75% dari keseluruhan daerah rawan bencana	Program Penyusunan tata kelola Penanganan Korban Bencana Sosial	Sosial	BPBD
			Pembangunan jalur evakuasi di setiap distrik	Cakupan jalur evakuasi	0	1		Sosial	BPBD
Meningkatkan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya data penduduk dan rumah tangga miskin	Pendataan penduduk dan rumah tangga miskin di seluruh distrik	Fokus pada rumah tangga miskin	Database penduduk dan rumah tangga miskin	0	1	Program Penanggulangan Kemiskinan	Sosial	Dinsosnakerpem
	Tersedianya mekanisme penanggulangan kemiskinan	Pembangunan rumah sosial dan infrastruktur bagi rumah tangga miskin dan KAT	Pengalokasian anggaran untuk pembangunan rumah sosial dan infrastruktur bagi rumah tangga miskin dan KAT	Cakupan rumah tangga miskin dan KAT yang mendapatkan bantuan	3960 KK	10000 KK		Sosial	Dinsosnakerpem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
Meningkatkan Peran Serta Peran dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam menopang perekonomian keluarga	Peningkatan keterampilan perempuan dalam berwirausaha	Fokus pada peningkatan keterampilan kewirausahaan perempuan melalui 5 kelompok pemberdayaan perempuan	Jumlah pelatihan wirausaha bagi perempuan	N/A	10	Program pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB dan Disperindagop
	Terwujudnya kesetaraan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	Penyerasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	Fokus pada sinkronisasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang diserasikan	N/A	5		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
	Terwujudnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUGA) yang kuat	Penguatan Kelembagaan PUGA (Pengarusutamaan Gender dan Anak)	Fokus pada aktivitas yang bermuatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah kegiatan PUGA (Pengarusutamaan Gender dan Anak)	N/A	5	Program Penguatan Kelembagaan PUGA (Pengarusutamaan Gender dan Anak)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	Fokus pada kelompok masyarakat berdasarkan distrik	Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Belum ada pengaduan	0	Program perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
	Meningkatnya Promosi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melalui kegiatan di Masyarakat	Promosi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melalui kegiatan di Masyarakat	Memprioritaskan pada kegiatan sosialisasi kesehatan ibu dan anak di masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan ibu dan anak (KIA)	N/A	10	Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB dan Dinas Kesehatan
	Meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Kelompok masyarakat berdasarkan distrik	Persentase keluarga sejahtera	N/A	40%	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program Prioritas	Bidang Urusan	SKPD
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemberdayaan Perempuan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberdayaan Perempuan	Fokus pada pengadaan fasilitas sarana prasarana (TI, gedung, kendaraan) di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Persentase ketersediaan sarana prasarana TI	0	80%	Program pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPKB
				Jumlah gedung	1 unit	1 unit			
				Jumlah kendaraan	1 mobil dinas	1 mobil dinas			
Meningkatkan ketersediaan data kependudukan sebagai basis pengambilan kebijakan	Tersedianya data kependudukan yang selalu diperbarui	Penyediaan data kependudukan yang diperbarui	Data kependudukan yang perlu diperbarui	Data Kependudukan	N/A	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya stabilitas keamanan masyarakat	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Distrik yang rawan terhadap gangguan keamanan	Jumlah pos keamanan	N/A	26 (1 untuk masing-masing distrik)	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Satpol PP	Kesbangpol
	Menurunnya jumlah pelanggaran perda	Sosialisasi peraturan daerah	Perda strategis yang tidak dipatuhi	Jumlah pelanggaran perda yang dilakukan masyarakat	N/A	0	Program Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	Kesbangpol
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat	Lembaga kemasyarakatan di semua distrik	Frekuensi sosialisasi ke masyarakat di semua distrik	N/A	26 (1 sosialisasi per distrik)	Program Penyuluhan Hukum	Kesbangpol	Kesbangpol
Meningkatnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara	Meningkatnya kesadaran kewarganegaraan masyarakat	Pembinaan kesadaran kewarganegaraan bagi masyarakat	Lembaga kemasyarakatan di semua distrik	Frekuensi penyuluhan P4 dan wawasan kebangsaan di tiap distrik	N/A	26 (1 kegiatan per distrik)	Program Peningkatan SDM Pekerja Sosial	Kesbangpol	Kesbangpol

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2013 – 2017**



**PEMERINTAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

